



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AUDITED

Periode yang Berakhir
31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 088
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



LAPORAN KEUANGAN (*Audited*)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

JL. LETJEN SUTOYO NO. 12 CILILITAN - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 8093008

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Negara. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 9 Mei 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	77
F. Pengungkapan Penting Lainnya	84
VI. Lampiran – Lampiran	
A. Lampiran A1 Daftar Rekening Bendahara Satker BKN	
B. Lampiran A2 Informasi Belanja Dibayar Dimuka	
C. Lampiran A3 Tabel Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
D. Lampiran A4 Tabel Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
E. Lampiran A5 Informasi Pendapatan Diterima Dimuka	
F. Lampiran A6 Daftar Hibah Langsung berupa Barang/Jasa	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13
Tabel 1.2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	14
Tabel 1.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	15
Tabel 1.4	Capaian Program Prioritas Nasional	16
Tabel 1.5	<i>Refocussing</i> Kegiatan/Realokasi Anggaran	18
Tabel 2.1	Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2021	20
Tabel 2.2	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	20
Tabel 2.3	Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program	21
Tabel 2.4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNB	21
Tabel 2.5	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	24
Tabel 2.6	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	24
Tabel 2.7	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker	25
Tabel 2.8	Rincian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji per Satker	25
Tabel 2.9	Rincian Pendapatan Anggaran Lain-Lain per Satker	25
Tabel 2.10	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB	26
Tabel 2.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	26
Tabel 2.12	Rincian Belanja Berdasarkan Program	27
Tabel 2.13	Perbandingan Realisasi Belanja	27
Tabel 2.14	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	28
Tabel 2.15	Rincian Realisasi Belanja Pegawai per Satker	28
Tabel 2.16	Perbandingan Realisasi Belanja Barang	29
Tabel 2.17	Rincian Belanja Barang per Satker	29
Tabel 2.18	Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	30
Tabel 2.19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	30
Tabel 2.20	Rincian Belanja Modal per Satker	31
Tabel 2.21	Rincian Belanja Modal Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19	31

Tabel 2.22	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah	32
Tabel 2.23	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32
Tabel 2.24	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker	33
Tabel 2.25	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker	33
Tabel 2.26	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34
Tabel 2.27	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker	34
Tabel 2.28	Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per Satker	34
Tabel 2.29	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35
Tabel 2.30	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya	35
Tabel 2.31	Rincian Belanja Modal Lainnya per Satker	36
Tabel 2.32	Rincian Capaian Output Prioritas Nasional	37
Tabel 3.1	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	38
Tabel 3.2	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	39
Tabel 3.3	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Tempat Penyimpanan	39
Tabel 3.4	Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka	40
Tabel 3.5	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak	40
Tabel 3.6	Rincian Persediaan	41
Tabel 3.7	Rincian Persediaan Per Satker	41
Tabel 3.8	Rincian Persediaan Usang per Satker	42
Tabel 3.9	Mutasi Tanah Per 31 Desember 2021	42
Tabel 3.10	Rincian Tanah Per Satker	43
Tabel 3.11	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021	44
Tabel 3.12	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	45
Tabel 3.13	Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker	46
Tabel 3.14	Rincian Pengembangan Nilai Aset	46
Tabel 3.15	Rincian Pengembangan Nilai Aset per Satker	47
Tabel 3.16	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin	48
Tabel 3.17	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per Satker	48
Tabel 3.18	Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker	49
Tabel 3.19	Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	50

Tabel 3.20	Rincian Pengembangan Nilai Aset per Satker	51
Tabel 3.21	Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker	52
Tabel 3.22	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021	52
Tabel 3.23	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker	53
Tabel 3.24	Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	54
Tabel 3.25	Rincian Aset Tetap Lainnya	55
Tabel 3.26	Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker	55
Tabel 3.27	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	56
Tabel 3.28	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	57
Tabel 3.29	Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021	58
Tabel 3.30	Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Software per Satker	59
Tabel 3.31	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud	59
Tabel 3.32	Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker	59
Tabel 3.33	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021	60
Tabel 3.34	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	60
Tabel 3.35	Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker	61
Tabel 3.36	Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan	61
Tabel 3.37	Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan per Satker	62
Tabel 3.38	Rincian Transaksi Normalisasi BMN	62
Tabel 3.39	Rincian Transaksi Normalisasi BMN per Satker	62
Tabel 3.40	Rincian Aset Lain-lain per Satker	63
Tabel 3.41	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	63
Tabel 3.42	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	64
Tabel 3.43	Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker	64
Tabel 3.44	Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker	65
Tabel 3.45	Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker	66
Tabel 3.46	Perbandingan Uang Muka dari KPPN	66
Tabel 4.1	Perbandingan Rincian PNBPN	67
Tabel 4.2	Perbandingan Rincian Beban Pegawai	68
Tabel 4.3	Rincian Beban Persediaan	68
Tabel 4.4	Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa	69

Tabel 4.5	Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	70
Tabel 4.6	Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan	70
Tabel 4.7	Rincian Beban Perjalanan Dinas	71
Tabel 4.8	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	72
Tabel 4.9	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	73
Tabel 4.10	Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional	73
Tabel 4.11	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	74
Tabel 4.12	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	75
Tabel 4.13	Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	75
Tabel 4.14	Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang	76
Tabel 5.1	Rincian Nilai Koreksi Aset Reklasifikasi	78
Tabel 5.2	Rincian Nilai Koreksi Aset Non Revaluasi	79
Tabel 5.3	Rincian Transaksi Antar Entitas	80
Tabel 5.4	Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2021	80
Tabel 5.5	Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2021	81
Tabel 5.6	Rincian Transfer Masuk Per Satker	82
Tabel 5.7	Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2021	82
Tabel 5.8	Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Per 31 Desember 2021	83
Tabel 6.1	Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2015-2019	85
Tabel 6.2	Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2020	86
Tabel 6.3	Rincian Penggantian MOU Pinjam Pakai dengan Hibah Tahun 2021	87

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 9 Mei 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



B. Bima Haria Wibisana



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 15034/B-AI.06/SD/K/2022 Jakarta, 28 April 2022
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Surat Representasi Manajemen Kepada Yth.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat
di
Jakarta

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. BKN memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. BKN telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2021 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;

11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan BKN dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan Negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BKN.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Harta Wibisana

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp18.440.310.807,00 atau mencapai 122,81 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp15.015.133.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp704.320.385.395,00 atau mencapai 93,61 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp752.415.051.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.170.270.173.254,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp10.958.445.518,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.153.091.063.975,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp6.220.663.761,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.386.535.436,00 dan Rp3.166.883.637.818,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.662.414.732,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp718.747.367.338,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp703.084.952.606,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.831.385.296,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp701.253.567.310,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp3.164.387.964.809,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp701.253.567.310,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp8.040.376.147,00 dan ditambah transaksi antar entitas senilai Rp695.708.864.172,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp3.166.883.637.818,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021		% thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	15.015.133.000,00	18.440.310.807,00	122,81	14.667.031.603,00
JUMLAH PENDAPATAN		15.015.133.000,00	18.440.310.807,00	122,81	14.667.031.603,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	318.364.495.000,00	294.015.021.961,00	92,35	298.246.157.774,00
Belanja Barang	B.4	366.227.590.000,00	344.648.111.027,00	94,11	258.381.290.483,00
Jumlah Belanja Operasi		684.592.085.000,00	638.663.132.988,00	93,29	556.627.448.257,00
Belanja Modal	B.5				
Belanja Modal Tanah	B.5.1	131.940.000,00	122.940.000,00	93,18	1.828.164.400,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	53.647.020.000,00	53.245.801.118,00	99,25	21.949.892.689,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	6.798.445.000,00	5.077.736.180,00	74,69	9.527.389.770,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4	974.000.000,00	972.229.240,00	99,82	-
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	6.271.561.000,00	6.238.545.869,00	99,47	5.392.848.500,00
Jumlah Belanja Modal		67.822.966.000,00	65.657.252.407,00	96,81	38.698.295.359,00
JUMLAH BELANJA		752.415.051.000,00	704.320.385.395,00	93,61	595.325.743.616,00

Jakarta, 9 Mei 2022
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara


 Bima Haria Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	789.050.702,00	2.205.725,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		4.071.600,00
Belanja Dibayar di Muka	C.4	10.162.052,00	19.259.312,00
Piutang Bukan Pajak	C.5		56.119.280,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6		(3.816.428,00)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.8		
Persediaan	C.9	10.159.232.764,00	11.732.536.375,00
Jumlah Aset Lancar		10.958.445.518,00	11.810.375.864,00
ASET TETAP			
Tanah	C.10	2.309.435.980.187,00	2.302.109.905.449,00
Peralatan dan Mesin	C.11	607.409.829.240,00	568.440.548.093,00
Gedung dan Bangunan	C.12	841.376.833.975,00	833.845.886.323,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	23.958.841.060,00	22.986.611.820,00
Aset Tetap Lainnya	C.14	19.534.460.093,00	13.625.162.893,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	1.470.688.262,00	224.384.887,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(650.095.568.842,00)	(595.293.645.979,00)
Jumlah Aset Tetap		3.153.091.063.975,00	3.145.938.853.486,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.17	142.393.801.295,00	150.148.317.195,00
Aset Lain-Lain	C.18	56.958.695.636,00	45.898.772.635,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(193.131.833.170,00)	(187.335.085.735,00)
Jumlah Aset Lainnya		6.220.663.761,00	8.712.004.095,00
JUMLAH ASET		3.170.270.173.254,00	3.166.461.233.445,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	1.502.059.270,00	1.537.404.551,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.21	1.095.425.464,00	533.658.360,00
Uang Muka dari KPPN	C.22	789.050.702,00	2.205.725,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.386.535.436,00	2.073.268.636,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.386.535.436,00	2.073.268.636,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.23	3.166.883.637.818,00	3.164.387.964.809,00
JUMLAH EKUITAS		3.166.883.637.818,00	3.164.387.964.809,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.170.270.173.254,00	3.166.461.233.445,00

Jakarta, 9 Mei 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	15.662.414.732,00	12.864.544.144,00
JUMLAH PENDAPATAN		15.662.414.732,00	12.864.544.144,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	294.050.255.528,00	298.270.216.854,00
Beban Persediaan	D.3	13.845.491.552,00	12.752.768.231,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	216.712.960.720,00	144.778.343.415,00
Beban Pemeliharaan	D.5	29.472.282.781,00	29.009.747.490,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	85.636.236.037,00	69.392.561.983,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	79.033.957.148,00	86.129.054.609,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(3.816.428,00)	(1.867.467,00)
JUMLAH BEBAN		718.747.367.338,00	640.330.825.115,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(703.084.952.606,00)	(627.466.280.971,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	D.9	1.285.783.033,00	571.698.250,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		545.602.263,00	694.764.477,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.831.385.296,00	1.266.462.727,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(701.253.567.310,00)	(626.199.818.244,00)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.10	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(701.253.567.310,00)	(626.199.818.244,00)

Jakarta, 9 Mei 2022
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara


Bima Harta Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
EKUITAS AWAL	E.1	3.164.387.964.809,00	3.472.135.583.010,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(701.253.567.310,00)	(626.199.818.244,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		8.040.376.147,00	(262.932.055.793,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	(70.097.741,00)	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4		14.577.025.804,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	8.791.359.734,00	(277.332.936.789,00)
LAIN-LAIN	E.5	(680.885.846,00)	(176.144.808,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	695.708.864.172,00	581.384.255.836,00
EKUITAS AKHIR	E.7	3.166.883.637.818,00	3.164.387.964.809,00

Jakarta, 9 Mei 2022
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara


 Bima Haria Wibisana

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, BKN berkomitmen dengan visi “**Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, BKN memiliki 5 (lima) pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 47 menyebutkan BKN memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN.
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun.
3. Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Sedangkan dalam lingkup tugas, BKN bertugas:

1. Mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN.
2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah.
3. Membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian.
4. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif.

5. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN.
6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN.
7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKN sebagai berikut:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN dalam bentuk:
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang Telah Menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima dalam bentuk:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan BKN.
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dalam bentuk Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN dalam bentuk Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi (SI) ASN.
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN dalam bentuk Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti.
7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam bentuk:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN BKN,
 - b. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKN,
 - c. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN,
 - d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKN, dan
 - e. Opini atas Laporan Keuangan BKN.

Adapun beberapa kebijakan teknis yang telah dibuat Kepala BKN selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKN.
2. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.
3. Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebutuhan ASN.
4. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*).
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BKN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional serta Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya. Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

BKN Tahun Anggaran 2021 ini memperoleh anggaran belanja yang berasal dari APBN sebesar sebesar Rp752.415.051.000,00 meliputi:

1. Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp464.471.544.000,00;
2. Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp287.943.507.000,00.

Jumlah satuan kerja di lingkup BKN adalah 16 (enam belas) satker yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta;
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Kantor Regional II BKN Surabaya;
4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional IV BKN Makassar;
6. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta;
7. Kantor Regional VI BKN Medan;
8. Kantor Regional VII BKN Palembang;
9. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
10. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
11. Kantor Regional X BKN Denpasar;
12. Kantor Regional XI BKN Manado;
13. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
14. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh;
15. Kantor Regional XIV BKN Manokwari; dan
16. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN).

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BKN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BKN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BKN Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada SAP serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening Kas Umum Negara (KUN). Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas Negara dari sumber pendapatan. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atas pendapatan dan /atau terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BKN adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening KUN atau pengesahan dari Bendahara

Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pengeluaran Negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan negara karena adanya tunggakan pungutan pendapatan yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 5) Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat

ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah.
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), kas yang dibatasi penggunaannya, uang muka rekening BUN, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan aset lain-lain.

- 1) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Capaian Output

A.6. Capaian Program Prioritas Nasional BKN

Selama periode Tahun Anggaran 2021, capaian program prioritas nasional yang telah dicapai oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Capaian Program Prioritas Nasional

No	Unit Kerja	Uraian Program Prioritas Nasional	Target Volume	Realisasi Volume	Progres Capaian
1	Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN	PN 1: Standar Penyusunan Kebutuhan ASN Nasional berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
2	Direktorat Kompensasi ASN	PN 2: Pembinaan Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Papua Barat	30 Lembaga	42 Lembaga	140%
3	Direktorat Jabatan ASN	PN 3: Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah	137 Lembaga	137 Lembaga	100%
4	Direktorat Kinerja ASN	PN 4: Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D	204 Lembaga	411 Lembaga	201,47%

No	Unit Kerja	Uraian Program Prioritas Nasional	Target Volume	Realisasi Volume	Progres Capaian
5	Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian	PN 5: Layanan Data Kepegawaian ASN Terintegrasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
6	Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN	PN 6: Sistem Informasi ASN	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%
7	Direktorat Wasdal IV	PN 7: Kebijakan Teknis Kepegawaian dan Pengendalian Integritas dan Moralitas ASN	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100%
8	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	PN 8: Sistem Seleksi Berbasis CAT	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%
9	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	PN 9: Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen ASN	1500 Orang	1435 Orang	95,67%
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	PN 10: Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen ASN khusus wilayah Papua dan Papua Barat	250 Orang	187 Orang	74,80%
11	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	PN 11: Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Berbasis Sistem Merit	625 Lembaga	502 Lembaga	80,32%

No	Unit Kerja	Uraian Program Prioritas Nasional	Target Volume	Realisasi Volume	Progres Capaian
12	Pusat Penilaian Kompetensi ASN	PN 12: Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	2000 Orang	1725 Orang	86,25%

Refocussing Kegiatan/ Realokasi Anggaran

A.7. Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka perlu dilakukan langkah strategis berupa **refocussing dan realokasi belanja K/L TA 2021**.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-30/MK.02/2021 Tentang *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, BKN melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran dengan anggaran semula sebesar Rp633.595.268.000,00 di *refocussing* kegiatan/realokasi melalui beberapa tahapan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan, sehingga anggaran BKN menjadi Rp752.415.051.000 dengan rincian pagu belanja sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran Non COVID-19 adalah sebesar Rp738.604.663.000,00;
2. Pagu Anggaran Penanganan COVID-19 adalah Rp13.810.388.000,00, yang terdiri dari Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp13.602.192.000,00 dan Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp208.196.000,00;

Adapun rincian atas *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran di masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran

No	Satuan Kerja	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	7.230.021.000,00
		Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan pandemi COVID-19	208.196.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	1.044.706.000,00

No	Satuan Kerja	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	356.778.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	335.658.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	659.575.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	583.206.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	625.275.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	664.261.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	391.500.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	107.900.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	624.204.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	272.931.000,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	395.381.000,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	121.756.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	154.040.000,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19	35.000.000,00
Total			13.810.388.000,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Kepegawaian Negara telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Anggaran pada Tahun Anggaran 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2021		NAIK (TURUN)
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	13.690.036.000,00	15.015.133.000,00	1.325.097.000,00
Jumlah Pendapatan	13.690.036.000,00	15.015.133.000,00	1.325.097.000,00
BELANJA			
Belanja Pegawai	345.541.716.000,00	318.364.495.000,00	(27.177.221.000,00)
Belanja Barang	223.088.807.000,00	366.227.590.000,00	143.138.783.000,00
Belanja Modal	64.964.745.000,00	67.822.966.000,00	2.858.221.000,00
Jumlah Belanja	633.595.268.000,00	752.415.051.000,00	118.819.783.000,00

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu Belanja Pegawai sebesar Rp27.177.221.000,00 terdiri atas pengurangan pada anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito. Penambahan pagu Belanja Barang sebesar Rp143.138.783.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp2.858.221.000,00. Penambahan Belanja Barang dan Belanja Modal ini dikarenakan adanya tambahan anggaran dari Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021. Adapun rincian perubahan anggaran berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	345.541.716.000,00	318.364.495.000,00
Belanja Barang	220.340.784.000,00	352.625.398.000,00
Belanja Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	2.748.023.000,00	13.602.192.000,00
Belanja Modal	64.953.545.000,00	67.614.770.000,00
Belanja Modal - Penanganan Pandemi COVID-19	11.200.000,00	208.196.000,00
Total Belanja	633.595.268.000,00	752.415.051.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari program BKN maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Berdasarkan Jenis Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	72.612.707.000,00	220.491.312.000,00
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	552.344.916.000,00	520.599.899.000,00
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	5.904.505.000,00	9.785.533.000,00
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	2.733.140.000,00	1.538.307.000,00
Total Belanja	633.595.268.000,00	752.415.051.000,00

Realisasi Pendapatan
Rp18.440.310.807,-

B.1 Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara BKN berasal dari Pendapatan PNBP. Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.440.310.807,00 atau mencapai 122,81% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp15.015.133.000,00. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP

(Dalam Rupiah)

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	-	2.635.239.163,00	-
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.561.644.000,00	459.030.000,00	29,39
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	13.453.489.000,00	14.396.445.000,00	107,01
Pendapatan Denda	-	194.246.920,00	-
Pendapatan Lain - lain	-	755.349.724,00	-
Jumlah	15.015.133.000,00	18.440.310.807,00	122,81

Realisasi Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp18.440.310.807,00 berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp2.635.239.163,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp533.887.309,00 yang berasal dari:

- 1) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp115.756.898,00 berupa 1 paket barang inventaris kantor sebesar Rp29.400.000,00, 1 paket BMN berupa UPS, Gordyn/Kray dan Peralatan Komputer sebesar Rp14.379.999,00, 1 unit kendaraan roda empat sebesar Rp63.009.000,00 dan 2 unit kendaraan roda dua sebesar Rp8.967.899,00.
 - 2) Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp135.000.089,00 berupa 2 unit kendaraan roda empat.
 - 3) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp7.474.000,00 berupa 1 paket barang inventaris kantor.
 - 4) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp12.222.222,00 berupa 1 paket barang milik negara berupa barang-barang inventaris kantor.
 - 5) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp263.434.100,00 berupa 1 unit *incinerator* (alat pencacah hijauan) sebesar Rp8.890.000,00, 4 unit kendaraan roda empat sebesar Rp254.544.100,00.
- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp960.635.359,00 yang berasal dari:
- 1) Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp701.029.000,00 berupa 2 paket barang inventaris kantor senilai Rp96.960.000,00 dan 5 unit kendaraan roda empat senilai Rp604.069.000,00.
 - 2) Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp141.818.899,00 berupa 2 unit kendaraan roda dua dan 2 unit kendaraan roda empat senilai Rp116.238.900,00, serta 1 paket barang inventaris kantor senilai Rp25.579.999,00.
 - 3) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp4.100.000,00 berupa 1 paket barang inventaris kantor.
 - 4) Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp9.325.239,00 berupa 1 paket BMN berupa peralatan dan mesin
 - 5) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp4.222.222,00 berupa 1 paket bongkaran Barang Milik Negara.
 - 6) Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp100.139.999,00 berupa 1 unit kendaraan roda empat, 2 unit kendaraan roda dua, dan 2 unit UPS senilai Rp75.440.000,00; 1 paket barang inventaris kantor senilai Rp15.999.999,00; serta 2 unit kendaraan roda dua senilai Rp8.700.000,00.
- c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.056.716.495,00 yang berasal dari:
- 1) Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp960.407.149,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan dan sewa terhadap ruangan kantor.
 - 2) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp851.740,00 berupa pendapatan sewa terhadap ruangan kantor dan terhadap rumah dinas pegawai.
 - 3) Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp2.752.300,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.

- 4) Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp5.799.504,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara.
 - 5) Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp7.564.317,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 6) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp1.459.040,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan dan rumah dinas pegawai.
 - 7) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp6.931.954,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 8) Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp13.807.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai dan pendapatan sewa terhadap tanah bangunan rumah negara.
 - 9) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp1.623.992,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 10) Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp3.730.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 11) Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp37.214.049,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 12) Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp2.990.950,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan dan rumah dinas pegawai.
 - 13) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp3.732.500,00 berupa pendapatan sewa terhadap rumah dinas pegawai.
 - 14) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp7.852.000,00 berupa pendapatan sewa terhadap tanah bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp84.000.000,00 berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa pendapatan penggunaan kamar asrama Pusbangpeg ASN pada agenda Pelatihan Dasar CPNS.
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp459.030.000,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi.
 3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp14.396.445.000,00 yang berasal dari Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN berupa Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp2.226.530.000,00 dan Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya dari Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp12.169.915.000,00.
 4. Pendapatan Denda sebesar Rp194.246.920,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
 5. Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp755.349.724,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp78.855.034,00 yang berasal dari:

Tabel 2.5 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	4.001.249,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	777,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	10.719.882,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2.388.123,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	22.385.250,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	10.693.360,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	9.551.050,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6.152.515,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	3.107.450,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	7.079.000,00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	585,00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	195,00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2.775.598,00
	Jumlah	78.855.034,00

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp548.459.858,00 yang berasal dari:

Tabel 2.6 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang
Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	398.865.671,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	4.230.000,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	5.911.195,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	350.100,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	39.960.000,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1.950.000,00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.489.400,00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	43.555.500,00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	15.543.352,00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	10.516.210,00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	26.088.430,00
	Jumlah	548.459.858,00

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Sebesar Rp77.633.121,00 yang berasal dari:

Tabel 2.7 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	16.600.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7.888.750,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	25.000.000,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.300.000,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4.125.000,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	779.371,00
7	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	19.940.000,00
	Jumlah	77.633.121,00

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp16.658.290,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
- e. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji sebesar Rp33.742.754,00 yang berasal dari:

Tabel 2.8 Rincian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	33.272.860,00
2	Kantor Regional X BKN Denpasar	469.894,00
	Jumlah	33.742.754,00

- f. Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp667,00 yang berasal dari:

Tabel 2.9 Rincian Pendapatan Anggaran Lain-Lain per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	662,00
2	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	5,00
	Jumlah	667,00

Realisasi Pendapatan PNBP TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 terdapat kenaikan sebesar 25,73%. Hal ini diakibatkan sejak diberlakukannya Kebijakan *New Normal* oleh Pemerintah maka BKN dapat melaksanakan kembali Program Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi oleh satuan kerja Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dan Pusat Penilaian Kompetensi yang ada di Kantor Pusat BKN yang sempat terhenti pelaksanaannya akibat adanya kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal di Wilayah Indonesia. Kenaikan pendapatan yang berasal dari pendapatan Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi ini tidak terlalu signifikan yang hanya mengalami kenaikan sebesar 17,05%, akan tetapi hal tersebut dapat menjadi awal yang sangat baik untuk dapat seoptimal mungkin pada tahun berikutnya.

Tabel 2.10 Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	2.635.239.163,00	1.780.143.651,00	48,04
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	459.030.000,00	-	-
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	14.396.445.000,00	12.299.883.000,00	17,05
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	4.000.000,00	-
Pendapatan Denda	194.246.920,00	2.468.988,00	7.767,47
Pendapatan Lain - lain	755.349.724,00	580.535.964,00	30,11
Jumlah	18.440.310.807,00	14.667.031.603,00	25,73

Realisasi Belanja
Rp704.320.385.395,-

B.2 Belanja

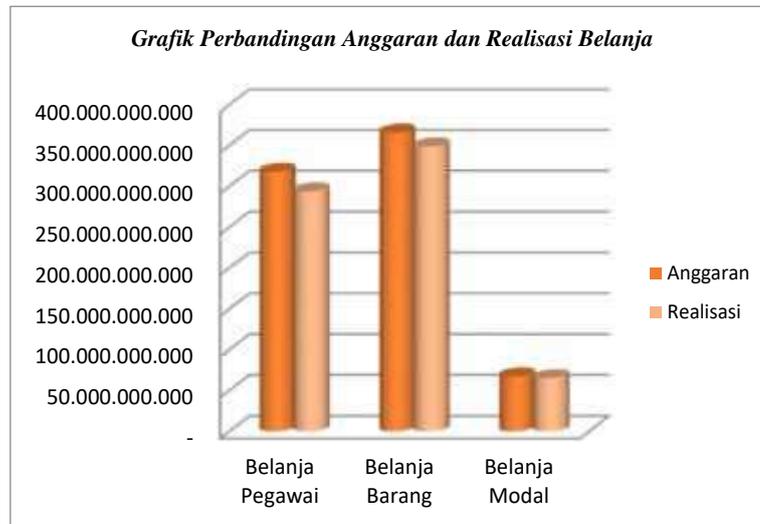
Realisasi Belanja BKN selama TA 2021 adalah sebesar Rp704.320.385.395,00 atau 93,61% dari anggaran belanja sebesar Rp752.415.051.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Belanja Pegawai	318.364.495.000,00	294.485.284.843,00	92,50
Belanja Barang	366.227.590.000,00	349.417.539.723,00	95,41
Belanja Modal	67.822.966.000,00	65.667.930.639,00	96,82
Jumlah Belanja Kotor	752.415.051.000,00	709.570.755.205,00	94,31
Pengembalian	-	(5.250.369.810,00)	
Jumlah	752.415.051.000,00	704.320.385.395,00	93,61

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	% Real Angg.
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (Rupiah Murni)	220.491.312.000,00	204.297.192.919,00	92,66
Program Dukungan Manajemen (Rupiah Murni)	520.599.899.000,00	489.717.671.358,00	94,07
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN (PNBP)	9.785.533.000,00	8.799.853.378,00	89,93
Program Dukungan Manajemen (PNBP)	1.538.307.000,00	1.505.667.740,00	97,88
Total Belanja	752.415.051.000,00	704.320.385.395,00	93,61

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 18,31% dibandingkan TA 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan realisasi Belanja Barang sebesar 33,39% dan Belanja Modal sebesar 69,66%, namun juga terdapat penurunan realisasi Belanja Pegawai sebesar 1,42%.

Tabel 2.13 Perbandingan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	294.015.021.961,00	298.246.157.774,00	(1,42)
Belanja Barang	344.648.111.027,00	258.381.290.483,00	33,39
Belanja Modal	65.657.252.407,00	38.698.295.359,00	69,66
Jumlah	704.320.385.395,00	595.325.743.616,00	18,31

Belanja Pegawai
Rp294.015.021.961,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp294.015.021.961,00 dan Rp298.246.157.774,00 atau terjadi penurunan sebesar 1,42%. Penurunan Realisasi Belanja Pegawai disebabkan adanya pegawai yang masuk masa purnabakti. Selain itu, terdapat juga kenaikan terhadap Realisasi Belanja Lembur sebesar 32,13% karena dengan adanya pemberlakuan Kebijakan *New Normal* oleh Pemerintah maka para pegawai dapat melaksanakan kegiatan lembur kembali dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna menyelesaikan pekerjaan yang tertunda akibat adanya kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	176.658.904.123,00	181.036.003.794,00	(2,42)
Belanja Lembur	711.747.000,00	538.657.250,00	32,13
Belanja Tunj. Khusus dan Pegawai Transit	117.114.633.720,00	116.750.081.777,00	0,31
Jumlah Belanja Kotor	294.485.284.843,00	298.324.742.821,00	(1,29)
Pengembalian Belanja Pegawai	(470.262.882,00)	(78.585.047,00)	
Jumlah Belanja	294.015.021.961,00	298.246.157.774,00	(1,42)

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2021 sebesar Rp294.015.021.961,00 berasal dari:

Tabel 2.15 Rincian Belanja Pegawai per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	196.830.458.128,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	11.387.389.458,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	10.192.187.158,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	10.387.329.706,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	8.620.747.505,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	7.017.337.291,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	6.433.410.464,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	5.966.225.459,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6.895.746.148,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4.300.642.049,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	5.470.989.771,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	4.605.399.139,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	5.834.953.341,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	3.571.955.396,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	3.647.317.160,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2.852.933.788,00
	Jumlah	294.015.021.961,00

Belanja Barang

Rp344.648.111.027,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp344.648.111.027,00 dan Rp258.381.290.483,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 33,39%. Peningkatan Realisasi Belanja Barang disebabkan oleh adanya peningkatan di setiap unsur jenis belanja dan yang cukup signifikan mengalami kenaikan adalah Belanja Jasa sebesar 92,42% walaupun pada jenis Belanja Barang Persediaan mengalami penurunan sebesar 20,27%.

Tabel 2.16 Perbandingan Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	50.528.789.080,00	47.595.659.383,00	6,16
Belanja Barang Non Operasional	30.646.829.129,00	24.581.948.803,00	24,67
Belanja Barang Persediaan	13.356.439.209,00	16.752.818.487,00	(20,27)
Belanja Jasa	139.791.057.727,00	72.650.593.449,00	92,42
Belanja Pemeliharaan	29.138.895.981,00	27.432.630.464,00	6,22
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	85.955.528.597,00	70.343.208.920,00	22,19
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	23.860.500,00	-
Jumlah Belanja Kotor	349.417.539.723,00	259.380.720.006,00	34,71
Pengembalian Belanja	(4.769.428.696,00)	(999.429.523,00)	
Jumlah Belanja	344.648.111.027,00	258.381.290.483,00	33,39

Realisasi Belanja Barang pada TA 2021 sebesar Rp344.648.111.027,00 berasal dari:

Tabel 2.17 Rincian Belanja Barang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	191.373.400.418,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	12.079.461.069,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	10.000.794.911,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	11.221.001.447,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	16.141.267.734,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	11.324.612.478,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	9.158.305.585,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	12.974.493.402,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	10.463.291.882,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4.766.732.189,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	10.118.347.855,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	9.319.954.363,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	11.339.190.457,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	4.936.812.033,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	6.104.829.266,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	13.325.615.938,00
	Jumlah	344.648.111.027,00

BKN mengalokasikan Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp13.602.192.000,00. Anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp10.780.489.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18 Rincian Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	958.555.000,00	727.245.569,00	75,87
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	593.440.000,00	593.143.075,00	99,95
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11.919.897.000,00	9.330.602.970,00	78,28
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	300.000,00	300.000,00	100,00
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	130.000.000,00	129.240.000,00	99,42
	Jumlah Belanja Kotor	13.602.192.000,00	10.780.531.614,00	79,26
	Pengembalian Belanja	-	(42.000,00)	
	Jumlah Belanja	13.602.192.000,00	10.780.489.614,00	79,26

Belanja Modal
Rp65.657.252.407,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp65.657.252.407,00 dan Rp38.698.295.359,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 69,66% yang disebabkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 142,61% walaupun terdapat penurunan yang cukup signifikan juga terhadap Belanja Modal Tanah sebesar 93,28%.

Tabel 2.19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	122.940.000	1.828.164.400	(93,28)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.251.960.118	21.949.892.689	142,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.077.736.180	9.527.389.770	(46,70)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	972.229.240	-	-
Belanja Modal Lainnya	6.243.065.101	5.392.848.500	15,77
Jumlah Belanja Kotor	65.667.930.639	38.698.295.359	69,69
Pengembalian	(10.678.232)	-	
Jumlah Belanja	65.657.252.407	38.698.295.359	69,66

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp65.657.252.407,00 berasal dari:

Tabel 2.20 Rincian Belanja Modal per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	46.528.058.503,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	685.244.296,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	378.171.635,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	503.255.308,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	1.972.699.510,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	1.758.051.683,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	478.799.651,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.128.750.120,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.242.051.945,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	368.315.500,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	3.369.793.719,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	1.756.360.174,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2.580.965.523,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	463.766.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	878.734.475,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.564.234.365,00
	Jumlah	65.657.252.407,00

BKN mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp208.196.000,00 dan telah terserap sebesar Rp202.851.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21 Rincian Belanja Modal dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	208.196.000	202.851.476	97,43
	Jumlah Belanja Kotor	208.196.000	202.851.476	97,43
	Pengembalian Belanja	-	-	
	Jumlah Belanja	208.196.000	202.851.476	97,43

Belanja Modal Tanah B.5.1 Belanja Modal Tanah

Rp122.940.000,-

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp122.940.000,00 dan Rp1.828.164.400,00. Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 93,28% disebabkan adanya penurunan signifikan terhadap realisasi Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah.

Tabel 2.22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	24.710.000	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	98.230.000	1.828.164.400	(94,63)
Jumlah Belanja Kotor	122.940.000	1.828.164.400	(93,28)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	122.940.000	1.828.164.400	(93,28)

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2021 terdiri atas Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah yang berasal dari Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah yang berasal dari Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh.

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp53.245.801.118,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53.245.801.118,00 dan Rp21.949.892.689,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 142,58% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2020. Hal ini disebabkan oleh sempat tertundanya pemenuhan kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin akibat dari adanya *refocussing*/realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 pada periode sebelumnya.

Tabel 2.23 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.912.909.467,00	18.746.145.284,00	176,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	202.851.476,00	3.137.039.305,00	(93,53)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.136.199.175,00	66.708.100,00	1.603,24
Jumlah Belanja Kotor	53.251.960.118,00	21.949.892.689,00	142,61
Pengembalian	(6.159.000,00)	-	
Jumlah Belanja	53.245.801.118,00	21.949.892.689,00	142,58

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 sebesar Rp53.245.801.118,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.912.909.467,00, berasal dari:

Tabel 2.24 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	39.629.667.750,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	503.166.096,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	376.995.635,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	503.255.308,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	1.673.268.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	804.987.925,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	267.993.851,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.128.750.120,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.108.861.140,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	192.230.500,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2.610.402.833,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	751.012.534,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	675.527.040,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	109.008.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	354.697.475,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.223.085.260,00
	Jumlah	51.912.909.467,00

Terdapat Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.159.000,00 yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta senilai Rp5.859.000,00 dan Kantor Regional IV BKN Makasar senilai Rp300.000,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp202.851.476,00, berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
3. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.136.199.175,00 berasal dari:

Tabel 2.25 Rincian Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	947.085.975,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	187.937.200,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.176.000,00
	Jumlah	1.136.199.175,00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp5.077.736.180,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.077.736.180,00 dan Rp9.527.389.770,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 mengalami penurunan 46,70% yang disebabkan adanya penurunan terhadap realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar 50,70% namun hanya disertai dengan kenaikan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 8%.

Tabel 2.26 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	699.790.900,00	647.958.745,00	8,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.377.945.280,00	8.879.431.025,00	(50,70)
Jumlah Belanja Kotor	5.077.736.180,00	9.527.389.770,00	(46,70)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	5.077.736.180,00	9.527.389.770,00	(46,70)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 sebesar Rp5.077.736.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp699.790.900,00 berasal dari:

Tabel 2.27 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional IV BKN Makasar	25.000.000,00
2	Kantor Regional XI BKN Manado	25.638.400,00
3	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	149.825.500,00
4	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	499.327.000,00
	Jumlah	699.790.900,00

2. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.377.945.280,00 berasal dari:

Tabel 2.28 Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	2.160.213.302,00
2	Kantor Regional IV BKN Makasar	199.731.510,00
3	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	953.063.758,00
4	Kantor Regional VI BKN Medan	210.805.800,00
5	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	130.440.805,00
6	Kantor Regional IX BKN Jayapura	176.085.000,00
7	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	256.528.000,00
8	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	291.077.105,00
	Jumlah	4.377.945.280,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp972.229.240,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp972.229.240,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2021 mengalami kenaikan dikarenakan adanya realisasi terhadap Belanja Modal Jaringan dan Belanja Penambahan Nilai Jaringan.

Tabel 2.29 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	802.655.000	-	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	169.574.240	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	972.229.240	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	972.229.240	-	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 sebesar Rp972.229.240,00 berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado.

Belanja Modal
Lainnya
Rp6.238.545.869,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.238.545.869,00 dan Rp5.392.848.500,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2021 kenaikan sebesar 15,68% dibandingkan dengan TA 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan signifikan terhadap Belanja Modal Lainnya yaitu sebesar 110,63%.

Tabel 2.30 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	4.393.999.601,00	2.086.161.500,00	110,63
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.849.065.500,00	3.306.687.000,00	(44,08)
Jumlah Belanja Kotor	6.243.065.101,00	5.392.848.500,00	15,77
Pengembalian Belanja Modal	(4.519.232,00)	-	
Jumlah Belanja	6.238.545.869,00	5.392.848.500,00	15,68

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 sebesar Rp6.238.545.869,00 terdiri atas:

1. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp4.393.999.601,00 yang berasal dari:

Tabel 2.31 Rincian Belanja Modal Lainnya per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	1.739.174.500,00
2	Kantor Regional IV BKN Makassar	75.000.000,00
3	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	2.750.000,00
4	Kantor Regional X BKN Denpasar	759.390.886,00
5	Kantor Regional XI BKN Manado	7.480.000,00
6	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	1.760.132.215,00
7	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	50.072.000,00
	Jumlah	4.393.999.601,00

Terdapat Pengembalian Belanja Modal Lainnya sebesar Rp4.519.232,00 yang berasal dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya sebesar Rp1.849.065.500,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.

B.6 Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2021 pada Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, BKN memiliki Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada **Prioritas Nasional VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKN dalam Program Prioritas Nasional VII adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN
2. Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN
3. Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
4. Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi
5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
6. Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
7. Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN

Pagu Anggaran untuk proyek prioritas nasional yang menjadi tugas BKN dalam Prioritas Nasional VII adalah Rp24.920.089.000,00 dengan Total Realisasi Anggaran sebesar Rp22.774.737.261,00. Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Proyek Prioritas Nasional BKN dalam Program PN VII adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Rincian Capaian Output Prioritas Nasional

(Dalam Rupiah)

No	Program Prioritas / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN							
	a. Standard Penyusunan Kebutuhan ASN Nasional berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (088.01.01.CO.4845.PBQ.001)	546.911.000,00	542.462.180,00	99	Rekomendasi	1	1	100,00
	b. Pembinaan dan Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Papua Barat (088.01.01.CO.4845.QDB.001)	1.449.526.000,00	1.437.535.381,00	99	Lembaga	30	42	140,00
	c. Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Instansi Pemerintah (088.01.01.CO.4845.QDB.002)	1.978.380.000,00	1.951.212.012,00	99	Lembaga	137	137	100,00
	d. Penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN Terintegrasi pada K/L/D (088.01.01.CO.4845.QDB.003)	3.359.841.000,00	3.232.569.274,00	96	Lembaga	204	411	201,47
2	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN							
	a. Layanan Data Kepegawaian ASN terintegrasi (088.01.01.CO.4847.QMA.001)	1.844.619.000,00	1.829.243.471,00	99	Layanan	1	1	100,00
	b. Sistem Informasi ASN (088.01.01.CO.4847.UAB.001)	5.217.323.000,00	5.010.803.136,00	96	Sistem Informasi	1	1	100,00
3	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN							
	a. Kebijakan Teknis Kepegawaian dan Pengendalian Integritas dan Moralitas ASN (088.01.01.CO.4848.PBQ.001)	793.360.000,00	733.590.939,00	92	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100,00
4	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi							
	a. Sistem Seleksi Berbasis CAT (088.01.01.CO.3655.UAB.001)	1.141.450.000,00	1.050.740.148,00	92	Sistem Informasi	1	1	100,00
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian							
	a. Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen ASN (088.01.01.CO.3664.UAC.001)	1.952.494.000,00	1.537.862.048,00	79	Orang	1500	1435	95,67
	b. Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Manajemen ASN khusus wilayah Papua dan Papua Barat (088.01.01.CO.3664.UAC.002)	897.500.000,00	683.047.708,00	76	Orang	250	187	74,80
6	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian							
	a. Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Berbasis Sistem Merit (088.01.01.CO.3644.QDB.001)	2.158.295.000,00	2.120.689.754,00	98	Lembaga	625	502	80,32
7	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN							
	a. Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (088.01.01.CO.3663.QAA.001)	3.580.390.000,00	2.645.321.210,00	74	Orang	2000	1725	86,25
Jumlah		24.920.089.000,00	22.775.077.261,00	91				

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp789.050.702,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BKN per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp789.050.702,00 dan Rp2.205.725,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Uang Tunai	190.341.903,00	2.205.725,00
Uang di Bank	598.708.799,00	-
Jumlah	789.050.702,00	2.205.725,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp789.050.702,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran TUP yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta yang merupakan sisa dari Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum disetorkan ke Kas Negara. Sisa TUP tersebut baru disetorkan pada 3 Januari 2022 dengan kode NTPN: B4CBC6U8EBGL80AR (Dokumen pendukung terlampir – pada Lampiran XIII).

Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 berasal dari Kantor Regional II BKN Surabaya yang merupakan sisa dari Uang Persediaan (GU Nihil) yang baru disetorkan pada 6 Januari 2021 dengan kode NTPN: E7A227QLTSP43P6I.

Bendahara Pengeluaran mengelola Kas di rekening bank. Rincian rekening bank yang dikelola oleh masing-masing satker di BKN disajikan pada Lampiran Utama A1.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNBPN. Bendahara Penerimaan BKN terdapat pada satker Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor Rekening 0340-01-002735-30-2 pada Bank Rakyat Indonesia dan satker Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN 1224-01-000123-30-4 pada Bank Rakyat Indonesia.

Mekanisme penerimaan PNBPN dilakukan dengan penyetoran langsung ke kas negara dan tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021.

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas dan setara kas lainnya, merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.071.600,00. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DES EMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	4.071.600,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	4.071.600,00

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 terdiri atas uang perjalanan dinas pegawai pada Kantor Regional II BKN sebesar Rp2.346.000,00 dan uang makan serta honor pegawai pada Kantor Regional IX BKN Jayapura sebesar Rp1.725.600,00, yang baru dibayarkan kepada PNS pada bulan Januari 2021. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan tempat penyimpanan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Berdasarkan Tempat Penyimpanan

(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Uang Tunai	-	1.725.600,00
Uang di Bank BRI 041-2010-00029-304	-	2.346.000,00
Jumlah	-	4.071.600,00

*Belanja Dibayar di
Muka Rp10.162.052,-*

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp10.162.052,00 dan Rp19.259.312,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Pembayaran Sewa Gedung Bangunan	-	6.500.000,00
Biaya Langganan Lisensi Video Convergence (Zoom)	10.162.052,00	12.759.312,00
Jumlah	10.162.052,00	19.259.312,00

Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka pada masing-masing satker disajikan pada Lampiran Utama A2.

Piutang Bukan Pajak
Rp0,-

C.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing - masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp56.119.280,00. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	56.119.280,00
Jumlah	-	56.119.280,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp56.119.280,00 merupakan piutang lainnya pada Kantor Pusat BKN yang terdiri dari piutang atas kekurangan pekerjaan yang telah lunas dibayar oleh pihak ketiga di Semester I Tahun 2021. (Dokumen pendukung terlampir – Lampiran XIII).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp0,-

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing - masing sebesar Rp0,00 dan (Rp3.816.428,00).

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00

C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang TP/TGR adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidakterttagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan
Rp10.159.232.764,-

C.9 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp10.159.232.764,00 dan Rp11.732.536.375,00.

Tabel 3.6 Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

Persediaan	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Barang Konsumsi	8.875.443.165	10.141.036.187
Bahan untuk Pemeliharaan	447.108.850	606.908.833
Suku cadang	8.099.700	10.534.227
Bahan Baku	30.592.643	53.156.848
Persediaan Lainnya	797.988.406	920.900.280
Jumlah	10.159.232.764	11.732.536.375

Adapun rincian persediaan per satker sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Persediaan Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN	3.325.475.584,00	4.725.580.949,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	682.648.972,00	572.166.192,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	362.436.823,00	488.232.397,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	288.871.673,00	203.440.612,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	175.229.908,00	164.460.075,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	557.273.490,00	705.129.595,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	165.906.058,00	190.834.653,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	410.898.146,00	728.938.330,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	602.376.214,00	600.598.573,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	560.003.060,00	313.644.670,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.021.458.562,00	964.763.624,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	443.197.893,00	605.394.284,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	978.078.633,00	724.001.861,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	272.695.600,00	300.986.100,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	70.685.679,00	135.407.440,00
16	Pusat Pengembangan ASN	241.996.469,00	308.957.020,00
	Jumlah	10.159.232.764,00	11.732.536.375,00

Terdapat persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp29.066.050,00 yang tidak disajikan dalam neraca. Persediaan dengan keadaan usang tersebut berasal dari:

Tabel 3.8 Rincian Persediaan Usang per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Kantor Regional III BKN Bandung	2.690.050,00	Obat-Obatan
2	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	26.376.000,00	Bahan Cetakan Lainnya
	Jumlah	29.066.050,00	

Tanah

Rp2.309.435.980.187,-

C.10 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BKN yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.309.435.980.187,00 dan Rp2.302.109.905.449,00.

Tabel 3.9 Mutasi Tanah Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.302.109.905.449,00
Mutasi tambah:	7.326.074.738,00
Pengembangan Nilai Aset	24.710.000,00
Pengembangan Melalui KDP	98.230.000,00
Hibah (Masuk)	7.203.134.738,00
Saldo per 31 Desember 2021	2.309.435.980.187,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.309.435.980.187,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Tanah sebesar Rp122.940.000,00, dan sudah sesuai dengan penambahan nilai aset tanah yang berasal dari Pengembangan Nilai Aset dan Pengembangan melalui KDP.

Adapun rincian mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah sebesar Rp7.326.074.738,00 atas transaksi Tanah berupa:

1. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp24.710.000,00 menggunakan akun 531114 berasal dari pekerjaan pengurukan dan pematangan tanah di Kantor Regional XIV BKN Manokwari.
2. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp98.230.000,00 berasal dari Kantor Regional XIII BKN Aceh yang merupakan pembayaran utang kepada pihak ketiga pada tahun 2020 dengan menggunakan akun 531115.
3. Hibah (Masuk) sebesar Rp7.203.134.738,00 berasal dari:

- a. Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp426.562.500,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Kabupaten Donggala Nomor: 011/0567/BPKAD dan Nomor: 22/HM.05.01/2021 Tanggal 28 Juni 2021;
- b. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp1.009.712.238,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 980/11/I/2021 dan Nomor: 32/HM.05.01/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp44.672.238,00 dan sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 3228/BAST/BPKD-7.2/2021 dan Nomor: 47/HM.05/01/2021 Tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp965.040.000,00;
- c. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp360.000.000,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor: BU.180/BPKAD/XI/2021 Tanggal 16 November 2021;
- d. Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp420.000.000,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Kota Ternate Nomor: 030/06/2021 dan Nomor: 2/K/KS/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021; dan
- e. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh sebesar Rp4.986.860.000,00 sesuai dengan BAST Hibah dengan Pemerintah Provinsi Banda Aceh Nomor: 032/BAST/PPTK.WIL III/TB/PERKIM/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021.

Adapun Rincian Tanah per satker adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Rincian Tanah Per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN	778.309.895.000,00	778.309.895.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	150.838.792.000,00	150.838.792.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	351.559.532.000,00	351.559.532.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	51.116.757.449,00	51.116.757.449,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	90.756.538.500,00	90.329.976.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	62.661.915.000,00	62.661.915.000,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	164.724.060.000,00	164.724.060.000,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	264.168.142.238,00	263.158.430.000,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	17.136.158.000,00	17.136.158.000,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	40.113.517.000,00	40.113.517.000,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	166.616.748.000,00	166.256.748.000,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	48.128.637.000,00	47.708.637.000,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	16.983.000.000,00	16.983.000.000,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	18.461.628.000,00	13.376.538.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	4.624.710.000,00	4.600.000.000,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	83.235.950.000,00	83.235.950.000,00
	Jumlah	2.309.435.980.187,00	2.302.109.905.449,00

Terdapat Tanah BKN yang dikuasai pihak lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Kantor Pusat BKN Jakarta. Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat seluas 4.060 m² senilai Rp77.478.342.000,00.
2. Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Tanah dihuni pensiunan pegawai di lokasi sebagai berikut:
 - a. Kampung Sapen GK.I/445 seluas 619 m² senilai Rp3.037.866.000,00.
 - b. Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1.869 m² senilai Rp7.906.640.000,00.

Selain itu, terdapat Tanah yang telah diterbitkan pelepasan hak atas tanahnya oleh Kementerian PUPR namun belum mengurangi luasan pada Sertifikat Tanah Kantor Regional II BKN Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan atas nama 7 orang, seluas 844,82 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor 7730047.
2. Surat Keputusan atas nama 6 orang, seluas 733,70 m² atas tanah sertifikat milik BKN Nomor B 2511581.

Peralatan dan Mesin
Rp607.409.829.240,-

C.11 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp607.409.829.240,00 dan Rp568.440.548.093,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 3.11 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	568.440.548.093,00
Mutasi tambah:	53.705.693.493,00
Pembelian	51.985.319.293,00
Pengembangan Nilai Aset	1.108.364.200,00
Transfer Masuk	24.800.000,00
Hibah (Masuk)	577.860.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	9.350.000,00
Mutasi kurang:	(14.736.412.346,00)
Penghapusan	(28.965.700,00)
Penghapusan Semu Karena Reklasifikasi Dari Intra Ke Ekstra/ Sebaliknya	(342.875,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(28.113.950,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.678.989.821,00)
Saldo per 31 Desember 2021	607.409.829.240,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(518.712.514.901,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	88.697.314.339,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.245.801.118,00, sedangkan Penambahan Peralatan dan Mesin dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp53.093.683.493,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp152.117.625,00, yang terdiri dari:

1. Saldo Perolehan KDP atas Belanja Modal 2021 yang belum dikapitalisasi ke Aset Definitif sebesar Rp42.434.975,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta;
2. Pencatatan Beban Aset Ekstrakomptabel berupa pembelian Peralatan dan Mesin di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp143.638.000,00 yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp103.712.400,00;
 - b. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp39.925.600,00;
3. Kesalahan pembebanan akun atas Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset sebesar (Rp33.955.350,00);

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.705.693.493,00 berupa:

1. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.985.319.293,00, menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin 532111 sebesar Rp51.748.512.467,00, menggunakan akun 532119 belanja modal peralatan dan mesin – penanganan pandemi *Covid-19* sebesar Rp202.851.476,00 dan menggunakan akun 523121 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp33.955.350,00.

Rincian atas pembelian peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.303.343.061,00
2	Alat Laboratorium	90.849.000,00
3	Komputer	37.327.280.976,00
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	100.090.035,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.115.149.441,00
6	Alat Besar	4.681.403.660,00
7	Alat Angkutan	65.824.488,00
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	222.519.632,00
9	Alat Keselamatan Kerja	78.859.000,00
	Jumlah	51.985.319.293,00

Pembelian Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.13 Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	39.716.606.826,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	497.307.096,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	376.995.635,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	523.825.308,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	1.672.968.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	818.373.275,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	267.993.851,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	1.128.750.120,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.108.861.140,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	192.230.500,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	2.570.477.233,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	748.612.534,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	675.527.040,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	109.008.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	354.697.475,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.223.085.260,00
	Jumlah	51.985.319.293,00

- Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.108.364.200,00, menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin 532111 sebesar Rp14.600.000,00 dan menggunakan akun 532121 belanja penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.093.764.200,00.

Rincian atas pengembangan nilai aset tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rincian Pengembangan Nilai Aset

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Bengkel dan Alat Ukur	197.637.000,00
2	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	101.750.000,00
3	Komputer	24.376.000,00
4	Alat Laboratorium	168.063.500,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	258.887.200,00
6	Alat Besar	357.650.500,00
	Jumlah	1.108.364.200,00

Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.15 Rincian Pengembangan Nilai Aset per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	916.851.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	187.937.200,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.176.000,00
4	Kantor Regional XI BKN Manado	2.400.000,00
	Jumlah	1.108.364.200,00

3. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.800.000,00 berupa Komputer yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ke Kantor Pusat BKN Jakarta.
4. Hibah (Masuk) Peralatan dan Mesin sebesar Rp577.860.000,00 berupa Hibah Alat Angkutan yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN Jakarta berupa Mobil Ambulance sebesar Rp223.500.000,00 dari PT Taspen (Persero) sesuai dengan Nomor Perjanjian Hibah JAN-286A/DIR/2021 & 12/HM.05.03/2021;
 - b. Kantor Regional XIV BKN Manokwari berupa Mobil Innova sebesar Rp354.360.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor BAP 014/179/roper/VI/2018.
5. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp9.350.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga yang berasal dari Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh.

Mutasi Kurang transaksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.736.412.346,00 berupa:

1. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.965.700,00, berupa:
 - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.650.000,00; dan
 - b. Komputer sebesar Rp27.315.700,00.

Penghapusan Peralatan dan Mesin berasal dari:

 - a. Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp11.402.600,00;
 - b. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp17.563.100,00.
2. Penghapusan Semu Karena Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya sebesar Rp342.875,00 berupa Komputer yang berasal dari Kantor Regional X BKN Denpasar.
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.113.950,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp7.888.750,00 yang berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga; dan
 - b. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp20.225.200,00 yang berupa Komputer.

4. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp14.678.989.821,00 berupa:

Tabel 3.16 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Besar	853.351.025,00
2	Komputer	4.164.914.098,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.284.277.053,00
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.566.500,00
5	Alat Pertanian	150.700.000,00
6	Alat Laboratorium	24.375.000,00
7	Peralatan Proses/Produksi	456.969.810,00
8	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.215.769.035,00
9	Alat Angkutan	3.509.067.300,00
	Jumlah	14.678.989.821,00

Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berasal dari:

Tabel 3.17 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan
Peralatan dan Mesin per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	3.500.918.471,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	684.667.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.506.327.057,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.426.811.076,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.414.077.192,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	107.917.039,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	228.418.000,00
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	820.342.345,00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	796.053.158,00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	58.865.383,00
11	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	163.881.500,00
12	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	557.236.990,00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.413.474.610,00
	Jumlah	14.678.989.821,00

Rincian Peralatan dan Mesin per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.18 Rincian Peralatan dan Mesin Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN	299.166.702.916,00	265.436.160.541,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	19.169.137.908,00	19.060.289.362,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	15.332.005.631,00	16.432.843.653,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	18.522.983.437,00	19.309.809.205,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	25.915.891.527,00	27.114.920.719,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	19.156.720.825,00	18.123.590.650,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	18.357.202.839,00	18.062.876.027,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	29.975.679.805,00	28.804.307.685,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	22.476.986.413,00	21.058.365.273,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	16.416.486.768,00	15.911.203.688,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	18.692.442.319,00	16.769.275.506,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	21.531.447.675,00	21.305.448.299,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	22.371.722.991,00	21.484.021.334,00
14	Kantor Regional XIII Banda Aceh	5.649.841.952,00	5.540.485.452,00
15	Kantor Regional XIV Manokwari	9.007.581.213,00	8.169.566.328,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	45.666.995.021,00	45.857.384.371,00
	Jumlah	607.409.829.240,00	568.440.548.093,00

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Gedung dan Bangunan
Rp841.376.833.975,-

C.12 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp841.376.833.975,00 dan Rp833.845.886.323,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	833.845.886.323,00
Mutasi tambah:	7.530.947.652,00
Pembelian	1.236.313.708,00
Pengembangan Nilai Aset	2.849.484.072,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	174.825.500,00
Pegembangan Melalui KDP	63.161.600,00
Hibah (Masuk)	1.366.909.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.840.253.772,00
Saldo per 31 Desember 2021	841.376.833.975,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(112.362.111.392,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	729.014.722.583,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.077.736.180,00, sedangkan Penambahan atas nilai aset Gedung dan Bangunan dari Pembelian, Pengembangan Nilai Aset, dan Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp4.260.623.280,00. Terdapat selisih sebesar Rp817.112.900,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.365.260.000,00;
2. Kesalahan pembebanan akun atas Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset sebesar (Rp548.147.100,00);

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pegurangan nilai aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.530.947.652,00 berupa:

1. Pembelian sebesar Rp1.236.313.708,00, menggunakan akun 533111 sebesar Rp524.965.400,00, menggunakan akun 533121 sebesar Rp513.059.308,00 dan menggunakan akun 523111 sebesar Rp198.289.000,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional XI BKN Manado berupa Bangunan Gedung sebesar Rp25.638.400,00;
 - b. Kantor Regional XIV BKN Manokwari berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp499.327.000,00;
 - c. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta berupa Bangunan Gedung sebesar Rp513.059.308,00;

- d. Kantor Regional III BKN Bandung berupa Bangunan Gedung sebesar Rp198.289.000,00.
2. Pengembangan Nilai Aset berupa Bangunan Gedung sebesar Rp2.849.484.072,00 dengan rincian menggunakan akun 533121 sebesar Rp2.499.625.972,00 dan menggunakan akun 523111 sebesar Rp349.858.100,00. Adapun rincian pengembangan nilai aset berupa Bangunan Gedung berasal dari:

Tabel 3.20 Rincian Pengembangan Nilai Aset per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	794.953.302,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	195.949.600,00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	199.731.510,00
4	Kantor Regional V BKN Jakarta	505.742.450,00
5	Kantor Regional VI BKN Medan	210.805.800,00
6	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	130.440.805,00
7	Kantor Regional IX BKN Jayapura	176.085.000,00
8	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	256.528.000,00
9	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	379.247.605,00
	Jumlah	2.849.484.072,00

3. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp174.825.500,00 menggunakan akun 533111 berupa Bangunan Gedung berasal dari:
- Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp25.000.000,00;
 - Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp149.825.500,00.
4. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp63.161.600,00 berupa Bangunan Gedung yang berasal dari Kantor Regional V BKN DKI Jakarta.
5. Hibah (Masuk) sebesar Rp1.366.909.000,00 berupa Bangunan Gedung berasal dari:
- Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp350.800.000,00;
 - Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp1.016.109.000,00.
6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.840.253.772,00 berupa Bangunan Gedung yang berasal dari:
- Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp1.169.527.428,00;
 - Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp670.726.344,00.

Rincian Gedung dan Bangunan per satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.21 Rincian Gedung dan Bangunan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN	354.282.193.042,00	353.487.239.740,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	39.134.021.945,00	39.134.021.945,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	26.120.484.737,00	26.120.484.737,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	33.647.388.600,00	33.253.150.000,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	44.127.903.827,00	42.382.844.889,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	30.297.655.559,00	29.215.692.201,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	35.737.604.025,00	35.526.798.225,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	43.836.093.725,00	43.836.093.725,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	22.470.681.905,00	22.340.241.100,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	21.366.666.549,00	21.190.581.549,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	30.567.530.257,00	30.567.530.257,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	27.017.634.241,00	25.305.160.497,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	26.798.147.431,00	26.648.321.931,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	5.911.933.004,00	5.655.405.004,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	499.327.000,00	-
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	99.561.568.128,00	99.182.320.523,00
	Jumlah	841.376.833.975,00	833.845.886.323,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Utama A3.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp23.958.841.060,-

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.958.841.060,00 dan Rp22.986.611.820,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	22.986.611.820,00
Mutasi tambah:	972.229.240,00
Pengembangan Nilai Aset	972.229.240,00
Saldo per 31 Desember 2021	23.958.841.060,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(17.172.759.840,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	6.786.081.220,00

Berdasarkan LRA, terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp972.229.240,00. Tidak terdapat selisih antara Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Transaksi Penambahan Nilai Aset atas Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Mutasi Tambah transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp972.229.240,00 berasal dari Kantor Regional XI BKN Manado berupa Pengembangan Nilai Aset atas Instalasi Jaringan yang menggunakan akun 534161 sebesar Rp169.574.240,00 dan menggunakan akun 534131 sebesar Rp802.655.000,00.

Adapun Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per satker adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN	56.071.000,00	56.071.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	925.565.400,00	925.565.400,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	20.000.000,00	20.000.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	290.456.867,00	290.456.867,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7.399.412.500,00	7.399.412.500,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	2.108.128.600,00	2.108.128.600,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	2.879.491.700,00	2.879.491.700,00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	2.942.634.000,00	2.942.634.000,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	2.062.182.000,00	2.062.182.000,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	1.866.512.423,00	894.283.183,00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	308.174.570,00	308.174.570,00
12	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	3.100.212.000,00	3.100.212.000,00
	Jumlah	23.958.841.060,00	22.986.611.820,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Utama A3.

Aset Tetap Lainnya
Rp19.534.460.093,-

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp19.534.460.093,00 dan Rp13.625.162.893,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	13.625.162.893,00
Mutasi tambah:	8.039.100.469,00
Pembelian	2.525.233.869,00
Pengembangan Nilai Aset	111.914.350,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5.401.952.250,00
Mutasi kurang:	(2.129.803.269,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(4.269.700,00)
Koreksi Pencatatan	(670.726.344,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(1.454.807.225,00)
Saldo per 31 Desember 2021	19.534.460.093,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1.848.182.709,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	17.686.277.384,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya adalah senilai Rp6.238.545.869,00, sedangkan Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Pembelian dan Pengembangan Nilai sebesar Rp2.637.148.219,00. Terdapat selisih sebesar Rp3.601.397.650,00, yang terdiri dari:

1. Pembelian Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.638.312.000,00; dan
2. Kesalahan pembebanan akun atas Belanja Pemeliharaan Lainnya yang menambah nilai aset sebesar (Rp36.914.350,00)

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.039.100.469,00 terdiri dari:

1. Pembelian Aset Tetap Lainnya menggunakan akun 536111 sebesar Rp2.525.233.869,00 berasal dari:
 - a. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp2.750.000,00 berupa Bahan Perpustakaan;
 - b. Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp7.480.000,00 berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp759.390.886,00 berupa Aset Tetap Renovasi;
 - d. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar Rp1.755.612.983,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
2. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp111.914.350,00 berupa Aset Tetap Renovasi berasal dari:
 - a. Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp36.914.350,00 menggunakan akun 523119;
 - b. Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp75.000.000,00 menggunakan akun 536111.
3. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp5.401.952.250,00 berasal dari Kantor Regional IV BKN Makasar berupa:

- a. Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp5.399.952.250,00;
- b. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.000.000,00.

Mutasi Kurang transaksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.129.803.269,00 berupa:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp4.269.700,00 berupa Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Kantor Regional IV BKN Makassar.
2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp670.726.344,00 yang seluruhnya merupakan Aset Tetap dalam Renovasi dari Kantor Regional XI BKN Manado.
3. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp1.454.807.225,00 berasal dari Kantor Regional IV BKN Makassar berupa Aset Tetap dalam Renovasi.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Rincian Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap Renovasi	17.738.647.198,00
2	Bahan Perpustakaan	1.669.732.895,00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	126.080.000,00
	Jumlah	19.534.460.093,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.26 Rincian Aset Tetap Lainnya Per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	443.431.863,00	443.431.863,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	376.956.817,00	376.956.817,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	56.392.000,00	56.392.000,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	451.498.900,00	414.584.550,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	7.123.574.475,00	3.105.699.150,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	745.273.190,00	745.273.190,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	173.193.222,00	173.193.222,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	838.912.644,00	838.912.644,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.930.288.381,00	1.927.538.381,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	9.999.550,00	9.999.550,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	1.205.126.203,00	445.735.317,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	439.422.695,00	1.102.669.039,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	2.940.763.800,00	1.185.150.817,00
14	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	2.006.204.992,00	2.006.204.992,00
15	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	793.421.361,00	793.421.361,00
	Jumlah	19.534.460.093,00	13.625.162.893,00

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya Per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Utama A3.

Konstruksi dalam
pengerjaan (KDP)
Rp1.470.688.262,-

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.470.688.262,00 dan Rp224.384.887,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai dan belum digunakan sampai dengan tanggal neraca. Mutasi transaksi terhadap KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	224.384.887,00
Mutasi tambah:	1.407.694.975,00
Perolehan/Penambahan KDP	42.434.975,00
Pengembangan KDP	1.365.260.000,00
Mutasi kurang:	(161.391.600,00)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(161.391.600,00)
Saldo per 31 Desember 2021	1.470.688.262,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.470.688.262,00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai KDP adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.407.694.975,00 berupa:

1. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp42.434.975,00 berupa Konstruksi dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin menggunakan akun 532121 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
2. Pengembangan KDP sebesar Rp1.365.260.000,00 berupa Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan menggunakan akun 533121 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.

Mutasi Kurang transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp161.391.600,00 berupa Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi yang berasal dari:

1. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta berupa Penyelesaian KDP Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Aula pada tahun 2020 sebesar Rp63.161.600,00.
2. Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh berupa Penyelesaian KDP Tanah atas pekerjaan Pengurukan Tanah pada tahun 2020 sebesar Rp98.230.000,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.470.688.262,00 terdapat pada Satker Kantor Pusat BKN Jakarta yang terdiri dari:

1. KDP Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.434.975,00 atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Reinstalasi Jaringan Listrik Utama Kantor pada Tahun 2021.
2. KDP Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.428.253.287,00 atas Pekerjaan Renovasi Gedung II Lantai 10 berupa:
 - a. Biaya Jasa Konsultan Perencana pada Tahun 2020 sebesar Rp62.993.287,00.
 - b. Pekerjaan Renovasi pada Tahun 2021 sebesar Rp1.285.147.000,00.
 - c. Biaya Jasa Konsultan Pengawas pada Tahun 2021 sebesar Rp80.113.000,00.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp650.095.568.842,-*

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp650.095.568.842,00 dan Rp595.293.645.979,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021. Rincian Akumulasi Penyusutan pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.28 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	607.409.829.240,00	518.712.514.901,00	88.697.314.339,00
2	Gedung dan Bangunan	841.376.833.975,00	112.362.111.392,00	729.014.722.583,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.958.841.060,00	17.172.759.840,00	6.786.081.220,00
4	Aset Tetap Lainnya	19.534.460.093,00	1.848.182.709,00	17.686.277.384,00
Jumlah		1.492.279.964.368,00	650.095.568.842,00	842.184.395.526,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Lampiran Utama A3.

*Aset Tak Berwujud
Rp142.393.801.295,-*

C.17 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp142.393.801.295,00 dan Rp150.148.317.195,00. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi ATB pada BKN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	150.148.317.195,00
Mutasi tambah:	117.820.291.048
Pembelian	1.789.246.500,00
Pengembangan Nilai Aset	1.849.065.500,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	114.040.524.048,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	141.455.000,00
Mutasi kurang:	(125.574.806.948,00)
Penghapusan	(555.170.750,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(95.743.829.434,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(29.275.806.764,00)
Saldo per 31 Desember 2021	142.393.801.295,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(137.067.785.127,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	5.326.016.168,00

Berdasarkan LRA, BKN merealisasikan Belanja Modal Lainnya adalah sebesar Rp6.238.545.869,00, sedangkan Penambahan ATB dari Pembelian dan Pengembangan Nilai Aset adalah sebesar Rp3.638.312.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp2.600.233.869,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.637.148.219,00;
2. Kesalahan pembebanan akun atas Belanja Pemeliharaan Lainnya yang menambah nilai aset sebesar (Rp36.914.350,00)

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai ATB adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi ATB sebesar Rp117.820.291.048,00 berupa:

1. Pembelian senilai Rp1.789.246.500,00 menggunakan akun 536111 berupa *Software* yang berasal dari:
 - a. Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp1.739.174.500,00;
 - b. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp50.072.000,00
2. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.849.065.500,00 menggunakan akun 536121 berupa *Software* yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
3. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp114.040.524.048,00 berupa *Software* yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
4. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp141.455.000,00 berupa *Software* yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.

Mutasi Kurang transaksi ATB sebesar Rp125.574.806.948,00 berupa:

1. Penghapusan *Software* sebesar Rp555.170.750,00 yang berasal dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
2. Transaksi Normalisasi BMN *Software* sebesar Rp95.743.829.434,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.
3. Penghentian aset dari penggunaan *Software* sebesar

Rp29.275.806.764,00 yang berasal dari:

Tabel 3.30 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Software per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	27.848.338.614,00
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	784.761.700,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	65.512.500,00
4	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	363.509.000,00
5	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	213.684.950,00
	Jumlah	29.275.806.764,00

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Hak Cipta	500.000,00	500.000,00
2	Software Komputer	142.158.642.445,00	149.913.158.345,00
3	Lisensi	39.658.850,00	39.658.850,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	195.000.000,00	195.000.000,00
	Jumlah Nilai Perolehan	142.393.801.295,00	150.148.317.195,00
	Amortisasi ATB	(137.067.785.127)	(142.686.489.940)
	Jumlah	5.326.016.168,00	7.461.827.255,00

Rincian Aset Tak Berwujud per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.32 Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	134.856.272.915,00	140.678.221.915,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	409.397.750,00	964.568.500,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	22.000.000,00	806.761.700,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	784.191.350,00	849.703.850,00
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	713.533.250,00	713.533.250,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	288.057.250,00	288.057.250,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	767.754.180,00	767.754.180,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	886.661.700,00	886.661.700,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	288.057.250,00	651.566.250,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	729.484.450,00	729.484.450,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	707.946.750,00	707.946.750,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	651.566.250,00	651.566.250,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	740.391.250,00	740.391.250,00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	548.486.950,00	712.099.900,00
	Jumlah	142.393.801.295,00	150.148.317.195,00

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021 disajikan pada Lampiran Utama A4.

Aset Lain-Lain
Rp56.958.695.636,-

C.18 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp56.958.695.636,00 dan Rp45.898.772.635,00. Aset Lain-lain berupa reklasifikasi atas Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan yang dibatasi penggunaannya. Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 3.33 Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	45.898.772.635,00
Mutasi tambah:	44.054.788.785
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	44.054.788.785,00
Mutasi kurang:	(32.994.865.784,00)
Penghapusan BMN yang dihentikan	(14.449.643.670,00)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan)	(18.403.767.114,00)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(141.455.000,00)
Saldo per 31 Desember 2021	56.958.695.636,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(56.064.048.043,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	894.647.593,00

Adapun rincian atas mutasi penambahan/pengurangan nilai Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah transaksi Aset Lain-Lain berupa Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp44.054.788.785,00 berupa:

Tabel 3.34 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan	3.509.067.300,00
2	Alat Besar	949.073.525,00
3	Alat Pertanian	150.700.000,00
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.566.500,00
5	Alat Laboratorium	24.375.000,00
6	Peralatan Proses/Produksi	456.969.810,00
7	Bahan Perpustakaan	269.700,00
8	Barang Bercorak Kesenian/Olahraga	4.000.000,00
9	Aset Tak Berwujud	29.275.806.764,00
10	Alat Kantor & Rumah Tangga	4.284.277.053,00
11	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.215.769.035,00
12	Komputer	4.164.914.098,00
	Jumlah	44.054.788.785,00

Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berasal dari:

Tabel 3.35 Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	31.349.257.085,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	684.667.000,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	2.291.088.757,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.588.046.076,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.418.346.892,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	107.917.039,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	228.418.000,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	363.509.000,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	820.342.345,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	796.053.158,00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	58.865.383,00
12	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	163.881.500,00
13	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	557.236.990,00
14	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.627.159.560,00
	Jumlah	44.054.788.785,00

Mutasi Kurang transaksi Aset Lain-Lain sebesar Rp32.994.865.784,00 yang terdiri dari:

1. Penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp14.449.643.670,00 berupa:

Tabel 3.36 Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat Angkutan	4.063.387.300,00
2	Peralatan Proses/Produksi	463.619.810,00
3	Alat Kantor & Rumah Tangga	3.109.100.786,00
4	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	892.824.105,00
5	Komputer	5.340.505.219,00
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.012.500,00
7	Aset Tak Berwujud	577.193.950,00
	Jumlah	14.449.643.670,00

Penghapusan BMN yang Dihentikan berasal dari:

Tabel 3.37 Rincian Penghapusan BMN yang Dihentikan per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	4.763.635.781,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	1.856.430.137,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	1.852.413.057,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	343.800.000,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	842.805.869,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	442.526.209,00
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	867.929.286,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.070.628.479,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	947.975.292,00
10	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	1.461.499.560,00
	Jumlah	14.449.643.670,00

2. Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp18.403.767.114,00 berupa:

Tabel 3.38 Rincian Transaksi Normalisasi BMN
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tak Berwujud	18.296.694.614,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.000.000,00
3	Alat Besar	95.722.500,00
4	Alat Kantor & Rumah Tangga	9.350.000,00
	Jumlah	18.403.767.114,00

Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang Dihentikan) berasal dari:

Tabel 3.39 Rincian Transaksi Normalisasi BMN per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	18.296.694.614,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	95.722.500,00
3	Kantor Regional IV BKN Makasar	2.000.000,00
4	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	9.350.000,00
	Jumlah	18.403.767.114,00

3. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp141.455.000,00 berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa Aset Tak Berwujud.

Rincian Aset Lain-lain Per Satker pada BKN sebagai berikut:

Tabel 3.40 Rincian Aset Lain-lain per Satker

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	46.815.559.664,00	38.668.087.974,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	-	1.171.763.137,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	956.469.391,00	517.793.691,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.612.431.267,00	120.107.691,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.416.346.892,00	343.800.000,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	842.805.869,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	192.232.000,00	526.841.170,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	708.986.500,00	1.348.497.786,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	707.119.479,00
10	Kantor Regional IX Jayapura	582.370.747,00	582.370.747,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	127.632.947,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	796.053.158,00	-
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	935.623.613,00	876.758.230,00
14	Kantor Regional XIII BKN Aceh	157.171.500,00	2.640.000,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	619.790.904,00	62.553.914,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	165.660.000,00	-
	Jumlah	56.958.695.636,00	45.898.772.635,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Utama A3 dan A4.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp193.131.833.170,-

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp193.131.833.170,00 dan Rp187.335.085.735,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	500.000,00	49.995,00	450.005,00
2	Software Komputer	142.158.642.445,00	137.030.059.224,00	5.128.583.221,00
3	Lisensi	39.658.850,00	37.675.908,00	1.982.942,00
4	Hasil Kajian/Penelitian	195.000.000,00	-	195.000.000,00
	Jumlah	142.393.801.295,00	137.067.785.127,00	5.326.016.168,00
B	Aset Lain-lain	56.958.695.636,00	56.064.048.043,00	894.647.593,00
	Jumlah	199.352.496.931,00	193.131.833.170,00	6.220.663.761,00

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya disajikan dalam Lampiran Utama A4.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1.502.059.270,-

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.502.059.270,00 dan Rp1.537.404.551,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sampai dengan 31 Desember 2021, BKN memiliki utang kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

Tabel 3.42 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	176.157.159,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.325.902.111,00
	Jumlah	1.502.059.270,00

Rincian utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp176.157.159,00 merupakan pembayaran atas kekurangan gaji, tunjangan, ataupun uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai. Adapun rincian per satker, yaitu:

Tabel 3.43 Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	50.816.039,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	5.407.650,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	5.333.272,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	1.556.049,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	10.795.940,00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	3.439.406,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	1.731.307,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	10.797.911,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	12.681.658,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	10.833.475,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	18.567.376,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	9.130.114,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	8.944.020,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	6.832.132,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	8.782.060,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	10.508.750,00
	Jumlah	176.157.159,00

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar merupakan pembayaran atas tagihan pemakaian listrik, telepon, air, pengiriman surat dinas/pos dan tagihan lainnya yang seharusnya masih menjadi beban tahun 2021 namun baru dibayarkan pada tahun 2022. Berikut rincian per satker:

Tabel 3.44 Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per Satker
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	617.083.721,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	54.824.720,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	60.679.921,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	39.268.831,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	30.609.959,00
6	Kantor Regional V DKI Jakarta	48.962.591,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	61.375.906,00
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	65.103.314,00
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	46.292.918,00
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	28.975.880,00
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	47.929.836,00
12	Kantor Regional XI BKN Manado	66.357.625,00
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	61.526.046,00
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	15.863.539,00
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	12.466.735,00
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	68.580.569,00
	Jumlah	1.325.902.111,00

Pendapatan Diterima di Muka Rp1.095.425.464,-

C.21 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.095.425.464,00 dan Rp533.658.360,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Pendapatan diterima dimuka pada BKN bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun anggaran. Berikut rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 per satker.

Tabel 3.45 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per Satker

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kantor Pusat BKN	1.063.342.776,00
2	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	16.877.000,00
3	Kantor Regional XI BKN Manado	12.715.000,00
4	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2.490.688,00
	Jumlah	1.095.425.464,00

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka disajikan dalam Lampiran Utama A5.

Uang Muka dari KPPN
Rp789.050.702,-

C.22 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp789.050.702,00 dan Rp2.205.725,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Tabel 3.46 Perbandingan Uang Muka dari KPPN

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	789.050.702,00	-
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	-	2.205.725,00
	Jumlah	789.050.702,00	2.205.725,00

Ekuitas
Rp3.166.883.637.818,-

C.23 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.166.883.637.818,00 dan Rp3.164.387.964.809,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp15.662.414.732,-

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNBPN pada BKN untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.662.414.732,00 dan Rp12.864.544.144,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Rincian PNBPN

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	494.949.391,00	508.583.107,00	-2,68
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugasnya	84.000.000,00	22.500.000,00	273,33
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	459.030.000,00	-	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.226.530.000,00	1.379.483.000,00	61,40
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	12.169.915.000,00	10.920.400.000,00	11,44
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	194.246.920,00	2.468.988,00	7.767,47
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	33.742.754,00	26.703.463,00	26,36
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	667,00	4.405.586,00	-99,98
TOTAL	15.662.414.732,00	12.864.544.144,00	21,75

Pendapatan Operasional pada BKN mengalami kenaikan sebesar 21,75% dari tahun anggaran sebelumnya disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan yaitu sebesar 61,40%. Kenaikan ini diakibatkan oleh terlaksananya kembali Program Pendidikan dan/atau Pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN yang sempat terhenti pelaksanaannya akibat adanya kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan LRA, BKN memperoleh PNBPN sebesar Rp18.440.310.807,00. Sedangkan Pendapatan LO sebesar Rp15.662.414.732,00, terdapat selisih antara Pendapatan LRA dan Pendapatan LO sebesar Rp2.777.896.075,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA yang dicatat sebagai Pendapatan Non Operasional pada Laporan Operasional sebesar Rp2.160.009.691,00.
2. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Piutang sebesar Rp56.119.280,00.
3. Penyesuaian Pendapatan LO atas transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp561.767.104,00.

Beban Pegawai
 Rp294.050.255.528,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp294.050.255.528,00 dan Rp298.270.216.854,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan aset.

Tabel 4.2 Perbandingan Rincian Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	120.349.337.631,00	125.231.201.564,00	(3,90)
Beban Tunjangan- Tunjangan	56.093.054.797,00	55.750.276.263,00	0,61
Beban Lembur	710.620.850,00	538.657.250,00	31,92
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	116.897.242.250,00	116.750.081.777,00	0,13
JUMLAH	294.050.255.528,00	298.270.216.854,00	(1,41)

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pegawai pada BKN adalah sebesar Rp294.015.021.961,00, sedangkan Beban Pegawai LO sebesar Rp294.050.255.528,00. Terdapat selisih antara Belanja Pegawai pada LRA dengan Beban Pegawai pada LO sebesar Rp35.233.567,00. Selisih tersebut merupakan selisih nilai dari penyesuaian akrual atas Beban Pegawai pada periode Desember 2021 yang masih harus dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp176.157.159,00 dan Beban Pegawai pada periode Desember 2020 yang telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp140.923.592,00.

Beban Persediaan
 Rp13.845.491.552,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.845.491.552,00 dan Rp12.752.768.231,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 4.3 Rincian Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	11.949.139.622,00	10.298.125.109,00	16,03
Beban Persediaan Bahan Baku	298.449.727,00	224.165.944,00	33,14
Beban Persediaan Lainnya	1.597.902.203,00	2.230.477.178,00	(28,36)
JUMLAH	13.845.491.552,00	12.752.768.231,00	8,57

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban yang tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran kas, seperti pemakaian persediaan akan sangat sulit untuk diidentifikasi. Hal ini dikarenakan persediaan yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dicatat menggunakan kode barang yang sama dengan BMN pada umumnya, berdasarkan ketentuan mengenai kodefikasi BMN.

Beban Barang dan Jasa
Rp216.712.960.720,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp216.712.960.720,00 dan Rp144.778.343.415,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 4.4 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	49.799.662.005,00	44.698.349.408,00	11,41
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	733.814.545,00	2.853.804.397,00	(74,29)
Beban Barang Non Operasional	30.643.055.379,00	23.713.174.975,00	29,22
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	864.186.328,00	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	14.368.688.006,00	14.979.589.740,00	(4,08)
Beban Jasa Konsultan	4.003.467.800,00	1.675.309.788,00	138,97
Beban Sewa	101.335.661.153,00	43.290.130.738,00	134,08
Beban Jasa Profesi	3.324.893.400,00	3.658.819.000,00	(9,13)
Beban Jasa Lain	3.029.519.462,00	3.464.123.272,00	(12,55)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9.330.560.970,00	5.514.311.819,00	69,21
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	143.638.000,00	66.543.950,00	115,85
JUMLAH	216.712.960.720,00	144.778.343.415,00	49,69

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

(Dalam Rupiah)

NO	BEBAN	JUMLAH
1	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	733.814.545,00
2	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9.330.560.970,00
	JUMLAH	10.064.375.515,00

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Barang dan Belanja Jasa pada BKN adalah sebesar Rp216.528.502.708,00, sedangkan nilai Beban Barang dan Beban Jasa pada LO sebesar Rp216.712.960.720,00. Terdapat selisih nilai antara Beban Barang Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Belanja Jasa pada LRA sebesar Rp184.458.012,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyesuaian atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp31.722.752,00.
2. Penyesuaian atas Belanja Barang Dibayar Dimuka (*prepaid*) sebesar Rp9.097.260,00.
3. Perolehan atas Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp143.638.000,00.

*Beban Pemeliharaan
Rp29.472.282.781,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.472.282.781,00 dan Rp29.009.747.490,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 4.6 Perbandingan Rincian Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.965.739.638,00	11.206.070.243,00	(11,07)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	300.000,00	159.636.310,00	(99,81)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.162.915.251,00	483.642.280,00	140,45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.655.993.368,00	14.120.001.631,00	10,88
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.001.795,00	49.155.754,00	(18,62)
Beban Pemeliharaan Irigasi	4.983.000,00	4.983.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	288.113.193,00	131.977.800,00	118,30
Beban Pemeliharaan Lainnya	869.488.421,00	578.183.523,00	50,38
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.473.673.290,00	2.258.877.093,00	(34,76)
Beban Persediaan Suku Cadang	11.074.825,00	17.219.856,00	(35,69)
JUMLAH	29.472.282.781,00	29.009.747.490,00	1,59

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 pada beban pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp300.000,00.

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Pemeliharaan pada BKN adalah sebesar Rp29.138.161.285,00, sedangkan Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp29.472.282.781,00. Terdapat selisih nilai antara Beban Pemeliharaan pada LO dengan Belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp334.121.496,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar Rp1.484.748.115,00.
2. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin serta Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya sebesar (Rp531.609.819,00).
3. Kesalahan Pembebanan MAK atas realisasi yang menambah nilai aset sebesar (Rp619.016.800,00).

Beban Perjalanan Dinas
Rp85.636.236.037,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp85.636.236.037,00 dan Rp69.392.561.983,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

Tabel 4.7 Rincian Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	73.124.048.725,00	55.734.773.460,00	31,20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.415.018.807,00	2.358.106.083,00	44,82
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.173.614.600,00	6.778.907.000,00	(23,68)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	129.240.000,00	1.622.332.613,00	(92,03)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.794.313.905,00	2.893.842.827,00	31,12
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	-	4.600.000,00	(100,00)
JUMLAH	85.636.236.037,00	69.392.561.983,00	23,41

Beban-beban khusus dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas. Adapun beban-beban khusus penanganan pandemi COVID-19 pada beban perjalanan dinas adalah beban perjalanan dinas – penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp129.240.000,00.

Berdasarkan LRA, realisasi Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar

Rp85.636.236.037,00. Sedangkan, Beban Perjalanan Dinas pada LO sebesar Rp85.636.236.037,00. Tidak terdapat selisih nilai antara Belanja Perjalanan Dinas pada LRA dan Beban Perjalanan Dinas pada LO.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp79.033.957.148,-.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp79.033.957.148,00 dan Rp86.129.054.609,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Beban Penyusutan		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.549.162.233,00	46.726.737.129,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.920.957.437,00	25.968.321.263,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	997.005.618,00	5.999.710.992,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	307.980.794,00	1.928.848.212,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	146.710.497,00	28.075.348,00
Jumlah Penyusutan	72.921.816.579,00	80.651.692.944,00
Beban Amortisasi		
Beban Amortisasi Software	5.702.272.567,00	5.247.046.787,00
Beban Amortisasi Hak Cipta	7.142,00	7.142,00
Beban Amortisasi Lisensi	3.965.885,00	21.325.685,00
Beban Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan	405.894.975,00	208.982.051,00
Jumlah Amortisasi	6.112.140.569,00	5.477.361.665,00
JUMLAH	79.033.957.148,00	86.129.054.609,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
(Rp3.816.428,-)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp3.816.428,00) dan (Rp1.867.467,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(3.816.428,00)	(1.867.467,00)	104,36
JUMLAH	(3.816.428,00)	(1.867.467,00)	104,36

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih bernilai negatif dikarenakan adanya penyesuaian nilai akrual terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Pembayaran Piutang Tahun Anggaran 2020 yang telah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan Non Operasional
Rp1.831.385.296,-

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.831.385.296,00 dan Rp1.266.462.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1.285.783.033,00	571.698.250,00	124,91
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.494.522.668,00	1.054.945.850,00	41,67
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	208.739.635,00	483.247.600,00	(56,80)
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	545.602.263,00	694.764.477,00	(21,47)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	665.487.023,00	1.814.631.448,00	(63,33)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	119.884.760,00	1.119.866.971,00	(89,29)
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	1.831.385.296,00	1.266.462.727,00	44,61

Surplus Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.831.385.296,00 berasal dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.494.522.668,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp533.887.309,00 yang berasal dari:
 - 1) Kantor Regional I BKN Yogyakarta sebesar Rp115.756.898,00.
 - 2) Kantor Regional IV BKN Makasar sebesar Rp135.000.089,00.
 - 3) Kantor Regional VI BKN Medan sebesar Rp7.474.000,00.

- 4) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp12.222.222,00.
 - 5) Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp263.434.100,00.
- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp960.635.359,00 yang berasal dari:
- 1) Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp701.029.000,00.
 - 2) Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp141.818.899,00.
 - 3) Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp4.100.000,00.
 - 4) Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp9.325.239,00.
 - 5) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp4.222.222,00.
 - 6) Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp100.139.999,00.
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp208.739.635,00 yang merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset yang berasal dari:
- a. Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp156.165.858,00.
 - b. Kantor Regional II BKN Surabaya sebesar Rp14.879.160,00.
 - c. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp7.604.912,00.
 - d. Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp1.482.562,00.
 - e. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebesar Rp2.502.150,00.
 - f. Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN sebesar Rp26.104.993,00.
3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp665.487.023,00 yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp78.855.034,00 yang berasal dari:

Tabel 4.11 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	4.001.249,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	777,00
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	10.719.882,00
4	Kantor Regional III BKN Bandung	2.388.123,00
5	Kantor Regional IV BKN Makasar	22.385.250,00
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	10.693.360,00
7	Kantor Regional VI BKN Medan	9.551.050,00
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	6.152.515,00
9	Kantor Regional X BKN Denpasar	3.107.450,00
10	Kantor Regional XI BKN Manado	7.079.000,00
11	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	585,00
12	Kantor Regional XIII BKN Aceh	195,00
13	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	2.775.598,00
	Jumlah	78.855.034,00

Berdasarkan LRA, realisasi atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp78.855.034,00, sehingga tidak terdapat selisih atas penerimaan tersebut.

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp492.340.578,00 yang berasal dari:

Tabel 4.12 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	342.746.391,00
2	Kantor Regional I Yogyakarta	4.230.000,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	5.911.195,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	350.100,00
5	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	39.960.000,00
6	Kantor Regional VI BKN Medan	1.950.000,00
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	1.489.400,00
8	Kantor Regional IX BKN Jayapura	43.555.500,00
9	Kantor Regional XI BKN Manado	15.543.352,00
10	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	10.516.210,00
11	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	26.088.430,00
	Jumlah	492.340.578,00

Berdasarkan LRA, realisasi atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp548.459.858,00. Terdapat selisih nilai sebesar Rp56.119.280,00 yang merupakan penyesuaian akrual atas pembayaran piutang pada Kantor Pusat BKN Jakarta.

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp77.633.121,00 yang berasal dari:

Tabel 4.13 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	16.600.000,00
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	7.888.750,00
3	Kantor Regional III BKN Bandung	25.000.000,00
4	Kantor Regional IV BKN Makasar	3.300.000,00
5	Kantor Regional IX BKN Jayapura	4.125.000,00
6	Kantor Regional XI BKN Manado	779.371,00
7	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	19.940.000,00
	Jumlah	77.633.121,00

Berdasarkan LRA, realisasi atas Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp77.633.121,00, sehingga tidak ada selisih atas Penerimaan tersebut.

- d. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp16.658.290,00 yang berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta. Berdasarkan LRA, realisasi atas Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS pada Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp16.658.290,00, sehingga tidak ada selisih atas pendapatan tersebut.
4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp119.884.760,00 merupakan Beban Persediaan Rusak/Usang. Adapun rincian atas Beban Persediaan Rusak/Usang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Kantor Regional II BKN Surabaya	94.982.510,00
2	Kantor Regional III BKN Bandung	2.690.050,00
3	Kantor Regional X BKN Denpasar	22.212.200,00
	Jumlah	119.884.760,00

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp3.164.387.964.809,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.164.387.964.809,00 dan Rp3.472.135.583.010,00.

Surplus (Defisit) LO

(Rp701.253.567.310,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp701.253.567.310,00) dan (Rp626.199.818.244,00). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,-

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,-

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,-

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

(Rp70.097.741,-)

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi yang merupakan bagian dari pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (391151) yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN. Koreksi atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp70.097.741,00) dan Rp0.

Tabel 5.1 Rincian Nilai Koreksi Aset Reklasifikasi

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Reklas Masuk	Reklas Keluar	
Kantor Regional III BKN Bandung	122.500,00	122.500,00	-
Persediaan Lainnya	122.500,00	122.500,00	-
Kantor Regional V BKN DKI	170.561.719,00	207.946.780,00	(37.385.061,00)
Gedung dan Bangunan	158.738.000,00	158.738.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.823.719,00	49.208.780,00	(37.385.061,00)
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	946.462.720,00	979.175.400,00	(32.712.680,00)
Gedung dan Bangunan	882.140.000,00	882.140.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.322.720,00	97.035.400,00	(32.712.680,00)
Jumlah	1.117.146.939,00	1.187.244.680,00	(70.097.741,00)

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.577.025.804,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan, jembatan dan bangunan air.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp8.791.359.734,-

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.791.359.734,00 dan (Rp277.332.936.789,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5.2 Rincian Nilai Koreksi Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Jenis Penyesuaian	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
A. Aset Tetap			
Tanah	537.653.768,00	537.653.768,00	-
Peralatan dan Mesin	222.227.900,00	241.334.725,00	(19.106.825,00)
Gedung dan Bangunan	2.077.286.512,00	237.032.740,00	1.840.253.772,00
Aset Tetap Lainnya	10.800.000,00	8.800.000,00	2.000.000,00
Aset Tetap Renovasi	12.769.391.584,00	9.494.972.903,00	3.274.418.681,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.352.817,00	326.514.321,00	(134.161.504,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	41.728.615,00	179.593.369,00	(137.864.754,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.962.978.280,00	-	3.962.978.280,00
B. Aset Lainnya			
Software	114.040.524.048,00	95.743.829.434,00	18.296.694.614,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	11.350.000,00	(11.350.000,00)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		18.296.694.614,00	(18.296.694.614,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	18.296.694.614,00	-	18.296.694.614,00
Akumulasi Amortisasi Software	95.702.056.934,00	114.040.524.048,00	(18.338.467.114,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	55.964.584,00	-	55.964.584,00
Jumlah	247.909.659.656,00	239.118.299.922,00	8.791.359.734,00

Koreksi Lain-lain
(Rp680.885.846,-)

E.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp680.885.846,00) dan (Rp176.144.808,00). Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain sebesar (Rp176.144.808,00) ini berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta berupa Koreksi pencatatan atas pengesahan hibah tahun anggaran yang lalu.

Transaksi Antar Entitas
(Rp695.708.864.172,-)

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp695.708.864.172,00 dan Rp581.384.255.836,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 5.3 Rincian Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
1. Ditagihkan ke Entitas Lain	704.320.385.395,00
2. Diterima dari Entitas Lain	(18.440.310.807,00)
3. Transfer Keluar	(3.268.831.980,00)
4. Transfer Masuk	3.268.831.980,00
5. Pengesahan Hibah Langsung	8.793.543.738,00
6. Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.035.245.846,00
Jumlah	695.708.864.172,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2021, Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp704.320.385.395,00.

2. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga berakhir 31 Desember 2021, Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp18.440.310.807,00).

3. Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.268.831.980,00) terdiri dari:

Tabel 5.4 Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Entitas Asal	Uraian	Nilai
Kantor Pusat BKN Jakarta	Barang Konsumsi	18.040.000,00
	Peralatan dan Mesin	3.650.296.980,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(399.505.000,00)
JUMLAH		3.268.831.980,00

Transfer keluar sebesar (Rp3.268.831.980,00) berasal dari Kantor Pusat BKN Jakarta.

4. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.268.831.980,00 terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Uraian	Nilai
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Peralatan dan Mesin	116.160.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.520.000,00)
Kantor Regional II BKN Surabaya	Peralatan dan Mesin	38.720.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.840.000,00)
	Barang Konsumsi	16.720.000,00
Kantor Regional III BKN Bandung	Peralatan dan Mesin	116.160.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14.520.000,00)
Kantor Regional IV BKN Makasar	Peralatan dan Mesin	542.080.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(67.760.000,00)
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	Peralatan dan Mesin	232.320.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(29.040.000,00)
Kantor Regional VI BKN Medan	Peralatan dan Mesin	134.250.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.145.000,00)
Kantor Regional VII BKN Palembang	Peralatan dan Mesin	271.040.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.880.000,00)
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Peralatan dan Mesin	309.760.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.720.000,00)
Kantor Regional IX BKN Jayapura	Peralatan dan Mesin	313.052.580,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(29.040.000,00)
Kantor Regional X BKN Denpasar	Peralatan dan Mesin	193.600.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(24.200.000,00)
Kantor Regional XI BKN Manado	Peralatan dan Mesin	271.040.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.880.000,00)
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	Peralatan dan Mesin	271.040.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.880.000,00)
Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	Peralatan dan Mesin	154.880.000,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19.360.000,00)
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	Peralatan dan Mesin	686.194.400,00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.720.000,00)
	Barang Konsumsi	1.320.000,00
JUMLAH		3.268.831.980,00

Transfer masuk sebesar Rp3.268.831.980,00 berasal dari:

Tabel 5.6 Rincian Transfer Masuk Per Satker

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Nilai (Rp)
Kantor Regional I BKN Yogyakarta	101.640.000,00
Kantor Regional II BKN Surabaya	50.600.000,00
Kantor Regional III BKN Bandung	101.640.000,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	474.320.000,00
Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	203.280.000,00
Kantor Regional VI BKN Medan	117.105.000,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	237.160.000,00
Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	271.040.000,00
Kantor Regional IX BKN Jayapura	284.012.580,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	169.400.000,00
Kantor Regional XI BKN Manado	237.160.000,00
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	237.160.000,00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	135.520.000,00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	648.794.400,00
JUMLAH	3.268.831.980,00

5. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.793.543.738,00 berasal dari:

Tabel 5.7 Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Nilai (Rp)
Kantor Pusat BKN Jakarta	223.500.000,00
Kantor Regional IV BKN Makassar	777.362.500,00
Kantor Regional VII BKN Palembang	1.009.712.238,00
Kantor Regional X BKN Denpasar	360.000.000,00
Kantor Regional XI BKN Manado	1.436.109.000,00
Kantor Regional XIII BKN Aceh	4.986.860.000,00
JUMLAH	8.793.543.738,00

6. Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.035.245.846,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.035.245.846,00 berasal dari:

Tabel 5.8 Rincian Pengesahan Hibah Langsung
Tahun Anggaran Yang Lalu Per 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

Entitas Tujuan	Nilai (Rp)
Kantor Pusat BKN Jakarta	680.885.846,00
Kantor Regional XIV BKN Manokwari	354.360.000,00
JUMLAH	1.035.245.846,00

Ekuitas Akhir

Rp3.166.883.637.818,-

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing – masing sebesar Rp3.166.883.637.818,00 dan Rp3.164.387.964.809,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Januari 2022, terdapat pembatalan atas hibah yang telah disahkan pada Kantor Regional VII BKN Palembang senilai Rp4.021.000.000,00 untuk hibah tanah atas UPT Jambi. Pengesahan atas hibah ini telah dilakukan melalui MPHL 00216/622372/2021 pada tanggal 31 Agustus 2021 sesuai dengan Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 294/NPHD/SETDA.PBMD-3.2/2021 tanggal 8 Februari 2021.

Pembatalan atas hibah ini terjadi dikarenakan pada saat Kantor Regional VII BKN Palembang ingin melakukan proses balik nama atas Sertifikat Tanah, diketahui bahwa ada ketidaksesuaian secara dokumentasi (Nota Perjanjian Hibah Daerah, Berita Acara Serah Terima Hibah dan Sertifikat Tanah) dengan tanah yang telah digunakan sebagai Kantor UPT Jambi, sehingga Pemerintah Provinsi Jambi ingin melakukan penggantian atas dokumentasi tersebut. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hibah BMD berupa Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 Januari 2022, maka sesuai dengan Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3227/NPHD/BPKPD-7.2/2021 tanggal 30 Desember 2021, diketahui bahwa nilai hibah tanah atas UPT Jambi yang diserahkan berubah dari nilai yang sebelumnya senilai Rp4.021.000.000,00 menjadi Rp965.040.000,00.

Secara pencatatan di Aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA dan KPPN, nilai hibah sebesar Rp4.021.000.000,00 telah dilakukan penghapusan dari pencatatan sesuai dengan Surat Permintaan Pembatalan Persetujuan MPHL-BJS Nomor: 036/B-KU.01.03/SD/KR.VII/2022 tanggal 19 Januari 2022. Sedangkan untuk penggantian nilai atas Hibah Tanah yang baru sebesar Rp965.040.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) Tanah dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3228/BAST/BPKPD-7.2/2021 tanggal 30 Desember 2021, telah dilakukan pengesahan hibah dengan Nomor Pengesahan: 1111516384.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Berdasarkan Surat Nomor S-4130/A/144/1992, tanggal 28 Oktober 1992, Kantor Regional III BKN Bandung telah mengajukan permohonan peminjaman tanah tersebut. Kementerian Keuangan telah menanggapi dengan Surat Nomor 432/I/1992 dan Surat Kepala PPDIA Bandung tanggal 22 September 1992 tentang Hak Guna Tanah, akan tetapi permohonan pinjam pakai tersebut belum terealisasi sampai sekarang.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di ibu kota seluruh Indonesia. Pembentukan Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) BKN ini dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian

khususnya layanan penyelenggara seleksi calon dan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta mempercepat perbaikan kualitas sistem seleksi dan SDM ASN, BKN mendorong terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang memfasilitasi pemanfaatan *Computer Assisted Test (CAT)* dan *Assesment* yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pemetaan kompetensi pegawai ASN di daerah-daerah yang tidak terdapat Kantor Regional BKN.

Adapun Rincian MOU Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2015-2019

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional
1	Mataram	900/3824.9/BPKAD/2015 06/K/KS/I/2016 21 Desember 2015	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar
2	Semarang	030/000639 04/A/KS/I/2016 12 Januari 2016	Jl Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta
3	Jambi	144/SPP.Gub/BPKAD/2016 08/K/KS/I/2016 18 Januari 2016	Lorong Riska Tani No. 90 Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361	Kantor Regional VII BKN Palembang
4	Kendari	3/Tahun2016 09/K/KS/I/Tahun 2016 29 Januari 2016	Tipulu, Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93122	Kantor Regional IV BKN Makassar
5	Serang	032/Penj 4-HUK/2016 22/A/KS/III/2016 03 Maret 2016	Jalan KH. Sokhari No. 40, Cipare Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten	Kantor Regional III BKN Bandung
6	Gorontalo	47/HKM-ORG/PK/III/2016 18/A/KS/III/2016 21 Maret 2016	Jl. H.D.I Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Gorontalo 96181	Kantor Regional XI BKN Manado
7	Padang	030/117/VI/2016/2016 24/A/KS/VI/2016 14 Juni 2016	Jl. Rimbo Kaluang No. 52, Rimbo Kaluang Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
8	Bengkulu	43/PPA/Roum/VII/2016 29 Juli 2016	Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 38119	Kantor Regional VII BKN Palembang
9	Ambon	077-85 Tahun 2017 23/A/KS/V/2017 19 Mei 2017	Jl. A.I.S Nasution No. 8, Karang Panjang, Kel. Amantelu Sirimau, Kota Ambon, Maluku	Kantor Regional IV BKN Makassar
10	Sorong	030/449/2017 01/SDJ/V/2017 23 Mei 2017	Jl. Pemda Kompleks Kantor Pemda Kelurahan Airmas Distrik Airmas Km. 24 Kabupaten Sorong	Kantor Regional XIV BKN Manokwari
11	Pontianak	11/PK/PA/2017 29/A/KS/VII/2017 20 Juli 2017	Jl. Veteran No. 29 Benua Melayu Darat, pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113	Kantor Regional V BKN Jakarta

No	UPT	No. MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional
12	Mamuju	008.005/754/SET 07/A/KS/VII/2017 09 Maret 2018	Jl. Martadinata Simboro Kec. Simboro Dan Kepulauan Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, 91512	Kantor Regional IV BKN Makassar
13	Palangkaraya	900/342/BPKAD/2018 01/SPJ/IV/2018 18 April 2018	Jl. W. Sudirohusodo No. 20 Langkai Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 74874	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
14	Lampung	032/304/VI.04/2018 16/A/KS/V/2018 23 Mei 2018	Jl. Nusa Indah 1 No 02A Sumur Batu Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung 35214	Kantor Regional V BKN Jakarta
15	Batam	01/BA.PP.ASET/BPKAD/VII/2018 23/A/KS/VII/2018 06 Juli 2018	Gedung Bersama Pemko Belian Batam Kota Batam Kepulauan Riau	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
16	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	Jl. Bantilan No. 20 Lere Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah 94111	Kantor Regional IV BKN Makassar
17	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	Jl. Jato no. 475 Kel. Jati Kec. Ternate Selatan	Kantor Regional XI BKN Manado
18	Balikpapan	032/103/BPKD 05/K/KS/II/2019 07 Februari 2019	Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 No. 3 Sepinggang Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
19	Pangkal Pinang	06/K/KS/II/2016 01/PP/BAKEUDA/II/2019 28 Februari 2019	Jl. Bukit Intan No. 223, Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung 33684	Kantor Regional VII BKN Palembang
20	Tarakan	032/ASET-VI/006/2019 15/K/KS/VI/2019 13 Juni 2019	Jl. Kalimantan No. 1 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Adapun Rincian MOU Perpanjangan Pinjam Pakai antara BKN dan Pemerintah Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Rincian MOU Pinjam Pakai Tahun 2020

No	UPT	Nomor MOU Tanggal	Alamat	Kantor Regional
1	Mataram	900/1702.b/BPKAD/2020 37.3/A/KS/XII/2020 02 Nopember 2020	Mataram Barat, Selarapang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125	Kantor Regional X BKN Denpasar
2	Kupang	BU.028/1635/BPKAD/XI/2020 37.1/A/KS/XI/2020 02 Nopember 2020	Jalan Frans Seda, Kelurahan Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Kantor Regional X BKN Denpasar
3	Semarang	030/0017332 10 Desember 2020	Jalan Soekarno Hatta KM. 29 Bergas, Kebonan Randugunting Bergas, Semarang, Jawa Tengah, 50552	Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian Negara memperoleh Hibah berupa Tanah dan Gedung Bangunan sebagai pengganti atas MOU Pinjam Pakai untuk UPT Donggala, UPT Ternate dan UPT Jambi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3 Rincian Penggantian MOU Pinjam Pakai dengan Hibah Tahun 2021

No	UPT	Nomor MOU Tanggal	Nomor Perjanjian Hibah Tanggal	Nomor MPHL Hibah Tanggal	Kantor Regional
1	Donggala	011/231/BPKAD/2018 42/A/KS/2018 17 Desember 2018	011/0567/BPKAD dan 22/HM.05.01/2021 28 Juni 2021	00396/BKN/HIBAH/8/2021 12 Agustus 2021	Kantor Regional IV BKN Makassar
2	Ternate	800/101/SETDA/2018 01/K/KS/2019 04 Januari 2019	030/06/2021 dan 2/K/KS/II/2021 20 Januari 2021	0069/HIBAH/KR.XI/IV/2021 6 April 2021	Kantor Regional XI BKN Manado
3	Jambi	144/SPP.Gub/BPKAD/2016 08/K/KS/II/2016 18 Januari 2016	295/BAST/SETDA.PBMD- 3.2/2021 dan 5/K/KS/II/2021 8 Februari 2021	00216/622372/2021 31 Agustus 2021	Kantor Regional VII BKN Palembang

Jakarta, 9 Mei 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Haria Wibisana

LAMPIRAN UTAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR REKENING BENDAHARA SATKER BKN
PER 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	SALDO 31 DESEMBER 2021	REKENING			
			NOMOR	NOMOR IZIN	NAMA	BANK & CABANG
REKENING PENGELUARAN						
1	Kantor Pusat BKN	-	652320172201000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 BKN KANTOR PUSAT JAKARTA	BRI KC JAKARTA OTISTA
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	598.708.799,00	8100120172411000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 030 KANREG I BKN YOGYA	MANDIRI KC YOGYAKARTA SUDIRMAN
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	-	652324504541000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 165 KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	BRI KC JEMURSARI SURABAYA
4	Kantor Regional III BKN Bandung	-	9890840172371000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 095 KANTOR REGIONAL III BKN	BNI KCP PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	-	9890845606351000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 136 KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR	BNI KC MATTOANGIN
6	Kantor Regional V BKN DKI Jakarta	-	9890846062541000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 088 KANREG V BKN JAKARTA	BNI KC JATINEGARA
7	Kantor Regional VI BKN Medan	-	8100126062611000	S-2355/WPB.12/KP.03/2020	BPG 004 KANREG VI BKN	MANDIRI KC MEDAN IMAM BONJOL
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	-	9890846223721000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 014 KANREG VII BKN PLG	BNI KC. PALEMBANG SUDIRMAN
9	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	-	9890846223861000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 045 BKN KANREG VIII BANJARMASIN	BNI KCP DEPARTEMEN KEUANGAN PECENONGAN
10	Kantor Regional IX BKN Jayapura	-	030701001118309	S-890/WPB.30/KP.063/2015	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
		-	652326223901000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 063 KANTOR REGIONAL IX BKN JAYAPURA	BRI KC JAYAPURA
11	Kantor Regional X BKN Denpasar	-	9890846678821000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 037 KANREG X BKN DENPASAR	BNI KC 1946
12	Kantor Regional XI BKN Manado	-	9890846678961000	S-2354/WPB.12/KP.03/2020	BPG 049 KANREG XI BKN MANADO	BNI KCP JATINEGARA BKN
13	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	-	652326679011000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 008 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU	BRI KC Jakarta Gatot Subroto
14	Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh	-	8100996677521000	S-3029/WPB.12/KP.03/2020	BPG 001 BKN KANTOR REGIONAL XIII BKN BA	BRI SYARIAH
15	Kantor Regional XIV BKN Manokwari	-	652326676521000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 065 KANREG XIV BKN MKW 667652	BRI KC Manokwari
16	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	654500205051000	S-2359/WPB.12/KP.03/2020	BPG 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KC Otista
REKENING PENERIMAAN						
17	Kantor Pusat BKN	-	034001002735302	S-6002/WPB.12/KP.03/2019	BPN 088 BKN 017220	BRI KC JAKARTA OTISTA
18	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000123304	S-389/WPB.13/KP.04/2018	BPN 023 PUSAT PENGEMBANGAN ASN	BRI KCP KPPN BOGOR
REKENING LAINNYA						
19	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	-	122401000127308	S-678/WPB.13/KP.04/2018	RPL 023 KS PUSBANG ASN UTK DIKLAT	BRI KCP KPPN BOGOR

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Informasi Belanja Dibayar Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(Dalam Rupiah)

No	Uraian		Jangka Waktu (TMT)		Nomor Perjanjian	Nilai Kontrak	Saldo Awal 2022
1	Kanreg II BKN Surabaya	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	22 Juni 2021 s/d 21 Juni 2022	INV 92896424	2.433.299	1.216.650
2	Kanreg III BKN Bandung	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	17 Mei 2021 s/d 16 Mei 2022	INV 86467958	2.625.073	1.093.780
		Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	18 Juli 2021 s/d 17 Juli 2022	INV 97798687	2.625.018	1.531.261
3	Kanreg IV BKN Makasar	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	10 Juni 2021 s/d 9 Juni 2022	INV 90805140	2.436.212	1.015.088
		Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	10 Juni 2021 s/d 9 Juni 2022	INV 90798480	2.436.212	1.015.088
4	Kanreg V BKN DKI Jakarta	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	27 Juli 2021 s/d 26 Juli 2022	INV 99252382	2.477.569	1.445.249
5	Kanreg VII BKN Palembang	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	21 Januari 2021 s/d 20 Januari 2022	INV 64380571	2.401.520	200.127
6	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	18 Januari 2021 s/d 17 Januari 2022	089/IPA/INV/II/2021	2.504.700	208.725
		Biaya langganan <i>Hosting</i>	1 bulan	28 Januari 2021 s/d 27 Januari 2022	INV 1100153	8.198.000	683.167
7	Kanreg XII BKN Pekanbaru	Biaya langganan lisensi <i>video conference</i>	12 bulan	23 Juli 2021 s/d 23 Juli 2022	KWI/SO01221071690517 3/PKM-PL-030/SPP	3.005.000	1.752.917
Jumlah						235.063.765	10.162.051

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO 31 DESEMBER 2021					NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			TOTAL	
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	63.203	607.409.829.240,00	487.381.520.102,00	45.128.663.033,00	-13.797.668.234,00	518.712.514.901,00	88.697.314.339,00
30103	ALAT BANTU	204	37.613.088.241,00	23.857.749.064,00	2.925.328.285,00	-794.706.298,00	25.988.371.051,00	11.624.717.190,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	204	35.123.014.888,00	26.975.158.620,00	2.567.608.309,00	-3.119.970.943,00	26.422.795.986,00	8.700.218.902,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	91	167.427.750,00	149.580.864,00	8.943.512,00	-2.979.000,00	155.545.376,00	11.882.374,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	19	5.213.787.470,00	4.600.387.150,00	278.445.131,00	0,00	4.878.832.281,00	334.955.189,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	37	112.881.500,00	95.538.760,00	9.806.870,00	0,00	105.345.630,00	7.535.870,00
30303	ALAT UKUR	8	104.894.050,00	10.750.370,00	10.038.180,00	0,00	20.788.550,00	84.105.500,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49.107.300,00	196.276.850,00	1.008.700,00	-150.700.000,00	46.585.550,00	2.521.750,00
30501	ALAT KANTOR	10.177	83.196.238.496,00	77.419.620.512,00	2.991.556.252,00	-1.601.925.527,00	78.809.251.237,00	4.386.987.259,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37.199	136.040.061.998,00	121.245.267.825,00	5.443.230.324,00	-2.663.045.557,00	124.025.452.592,00	12.014.609.406,00
30601	ALAT STUDIO	995	26.741.878.810,00	21.963.722.445,00	2.097.189.617,00	-1.094.294.536,00	22.966.617.526,00	3.775.261.284,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	674	5.145.734.979,00	4.730.491.385,00	199.870.144,00	-101.894.340,00	4.828.467.189,00	317.267.790,00
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1.440.181.793,00	684.593.370,00	144.026.390,00	0,00	828.619.760,00	611.562.033,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	345	941.152.347,00	605.746.663,00	91.791.037,00	-19.566.500,00	677.971.200,00	263.181.147,00
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	9	92.304.625,00	14.782.875,00	16.854.925,00	0,00	31.637.800,00	60.666.825,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	80	5.854.212.994,00	4.779.511.712,00	362.343.942,00	-24.375.000,00	5.117.480.654,00	736.732.340,00
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18.616.500,00	620.550,00	1.241.100,00	0,00	1.861.650,00	16.754.850,00
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87.670.000,00	1.763.930,00	7.562.499,00	0,00	9.326.429,00	78.343.571,00
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	7.523	92.239.594.291,00	73.549.880.439,00	8.089.726.697,00	-3.161.989.249,00	78.477.617.887,00	13.761.976.404,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	5.506	174.729.601.108,00	125.313.219.021,00	18.783.681.527,00	-633.812.087,00	143.463.088.461,00	31.266.512.647,00
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	ALAT PELINDUNG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	ALAT SAR	57	2.169.719.500,00	547.462.376,00	1.081.504.750,00	0,00	1.628.967.126,00	540.752.374,00
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	78.859.000,00	0,00	7.885.900,00	0,00	7.885.900,00	70.973.100,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54.978.600,00	448.401.610,00	6.466.075,00	-428.409.197,00	26.458.488,00	28.520.112,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140.065.000,00	136.235.711,00	2.552.867,00	0,00	138.788.578,00	1.276.422,00
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54.758.000,00	54.758.000,00	0,00	0,00	54.758.000,00	0,00
133111	Gedung dan Bangunan	474	841.376.833.975,00	86.233.191.460,00	25.920.957.437,00	207.962.495,00	112.362.111.392,00	729.014.722.583,00
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	158	730.689.049.745,00	75.894.381.064,00	22.627.628.538,00	-19.809.455,00	98.502.200.147,00	632.186.849.598,00
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	290	97.155.986.864,00	9.382.799.460,00	2.879.439.848,00	227.771.950,00	12.490.011.258,00	84.665.975.606,00
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45.569.000,00	3.004.548,00	1.001.516,00	0,00	4.006.064,00	41.562.936,00
40401	TUGU/TANDA BATAS	25	13.486.228.366,00	953.006.388,00	412.887.535,00	0,00	1.365.893.923,00	12.120.334.443,00
134111	Jalan dan Jembatan	61.982	16.124.321.000,00	13.720.743.348,00	796.290.595,00	0,00	14.517.033.943,00	1.607.287.057,00
50101	JALAN	61.972	16.122.161.000,00	13.720.549.504,00	796.235.211,00	0,00	14.516.784.715,00	1.605.376.285,00
50102	JEMBATAN	10	2.160.000,00	193.844,00	55.384,00	0,00	249.228,00	1.910.772,00
134112	Irigasi	27	2.764.941.783,00	456.651.725,00	104.137.050,00	0,00	560.788.775,00	2.204.153.008,00
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257.076.600,00	15.860.947,00	5.587.530,00	0,00	21.448.477,00	235.628.123,00
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	2	159.020.000,00	13.526.394,00	3.864.684,00	0,00	17.391.078,00	141.628.922,00
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16.428.500,00	4.928.550,00	1.642.850,00	0,00	6.571.400,00	9.857.100,00
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1.541.794.683,00	328.106.165,00	66.119.223,00	0,00	394.225.388,00	1.147.569.295,00
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440.714.000,00	53.664.366,00	15.332.676,00	0,00	68.997.042,00	371.716.958,00
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349.908.000,00	40.565.303,00	11.590.087,00	0,00	52.155.390,00	297.752.610,00
134113	Jaringan	32	5.069.578.277,00	1.998.359.149,00	96.577.973,00	0,00	2.094.937.122,00	2.974.641.155,00
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335.572.500,00	169.986.912,00	11.185.751,00	0,00	181.172.663,00	154.399.837,00
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1.585.471.240,00	135.441.850,00	27.973.072,00	0,00	163.414.922,00	1.422.056.318,00
50310	INSTALASI LAIN	7	951.173.820,00	951.173.820,00	0,00	0,00	951.173.820,00	0,00
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103.840.700,00	50.189.667,00	3.461.357,00	0,00	53.651.024,00	50.189.676,00
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2.028.728.367,00	655.199.226,00	50.718.211,00	0,00	705.917.437,00	1.322.810.930,00
50403	JARINGAN TELEPON	2	64.791.650,00	36.367.674,00	3.239.582,00	0,00	39.607.256,00	25.184.394,00
135111	Aset Tetap Renovasi	29	17.738.647.198,00	5.084.486.309,00	307.980.794,00	-3.574.084.394,00	1.818.382.709,00	15.920.264.489,00
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3.998.500,00	2.998.875,00	0,00	-2.998.875,00	0,00	3.998.500,00
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25	17.475.744.298,00	4.941.045.714,00	307.980.794,00	-3.520.315.799,00	1.728.710.709,00	15.747.033.589,00
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258.904.400,00	140.441.720,00	0,00	-50.769.720,00	89.672.000,00	169.232.400,00
135121	Aset Tetap Lainnya	25	46.080.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	16.280.000,00
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	46.080.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	29.800.000,00	16.280.000,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.426	9.608.045.572,00	8.626.098.730,00	32.412.033,00	716.682.040,00	9.375.192.803,00	232.852.769,00
30103	ALAT BANTU	8	853.351.025,00	0,00	9.690.789,00	794.706.298,00	804.397.087,00	48.953.938,00
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	414.560.000,00	961.200.000,00	0,00	-546.640.000,00	414.560.000,00	0,00
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0,00	7.680.000,00	0,00	-7.680.000,00	0,00	0,00
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30303	ALAT UKUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	150.700.000,00	0,00	0,00	150.700.000,00	150.700.000,00	0,00
30501	ALAT KANTOR	265	790.662.129,00	340.285.981,00	0,00	450.376.148,00	790.662.129,00	0,00
30502	ALAT RUMAH TANGGA	708	1.882.774.160,00	1.162.534.141,00	7.428.400,00	702.499.119,00	1.872.461.660,00	10.312.500,00
30601	ALAT STUDIO	32	982.222.597,00	715.850.847,00	1.428.310,00	264.065.131,00	981.344.288,00	878.309,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	34	532.383.680,00	475.810.500,00	799.560,00	53.962.340,00	530.572.400,00	1.811.280,00
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	18.604.000,00	2.050.000,00	16.554.000,00	0,00	18.604.000,00	0,00
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	28	460.560.894,00	436.185.894,00	0,00	24.375.000,00	460.560.894,00	0,00
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	KOMPUTER UNIT	223	2.389.414.678,00	2.731.746.373,00	6.859.250,00	-353.781.445,00	2.384.824.178,00	4.590.500,00
31002	PERALATAN KOMPUTER	109	938.580.409,00	1.764.384.960,00	0,00	-825.804.551,00	938.580.409,00	0,00
31503	ALAT SAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0,00					

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TABEL AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162121	Hak Cipta	1	500.000,00	42.853,00	7.142,00	0,00	49.995,00	450.005,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500.000,00	42.853,00	7.142,00	0,00	49.995,00	450.005,00
162151	Software	280	142.158.642.445,00	142.652.737.064,00	5.702.272.567,00	-11.324.950.407,00	137.030.059.224,00	5.128.583.221,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	280	142.158.642.445,00	142.652.737.064,00	5.702.272.567,00	-11.324.950.407,00	137.030.059.224,00	5.128.583.221,00
162161	Lisensi	1	39.658.850,00	33.710.023,00	3.965.885,00	0,00	37.675.908,00	1.982.942,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	39.658.850,00	33.710.023,00	3.965.885,00	0,00	37.675.908,00	1.982.942,00
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	49	47.160.180.364,00	36.022.497.065,00	405.894.975,00	10.260.463.200,00	46.688.855.240,00	471.325.124,00
80101	ASET TAK BERWUJUD	49	47.160.180.364,00	36.022.497.065,00	405.894.975,00	10.260.463.200,00	46.688.855.240,00	471.325.124,00
JUMLAH		331	189.358.981.659,00	178.708.987.005,00	6.112.140.569,00	-1.064.487.207,00	183.756.640.367,00	5.602.341.292,00

Badan Kepegawaian Negara Jakarta
Informasi Pendapatan Diterima Dimuka
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Bagian Anggaran : (088) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Eselon I / UAPPA-E1 : (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No	Uraian	Jangka Waktu (TMT)		Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Pendapatan Diterima Di Muka 2021	
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	PT. Infrasia Investama	60 bulan	01 Des 2018 s.d 30 Nov 2023	42.1/A/KS/XII/2018 002/INF/PKS-BKN/XII/2018	93.840.000	35.972.000
		PT. BRI (ATM)	36 bulan	15 Feb 2020 s.d 15 Feb 2023	26.1/A/KS/VI/2020 3318/KC-V/LOG/06/2020	78.634.000	29.452.520
		PT Telekomunikasi Selular	60 bulan	01 Des 2018 s.d 30 Nov 2023	11.1/A/V-5/IV/2019 PKS.0746/LG05/RC-03/V/2019	102.310.000	39.218.833
		PT. BRI (Kantor)	36 bulan	01 Agst 2021 s.d 31 Jul 2024	33/HM.05.03/2021 B5497/KC-V/LOG/07/2021	221.362.000	190.617.278
		PT. BNI	24 bulan	01 Jan 2020 s.d 31 Des 2021	JNG/PK/35/2019 36/A/KS/2019	385.716.000	-
		PT. Bank DKI	24 bulan	01 Okt 2020 s.d 30 Sep 2022	35.1/A/KS/X/2020	33.516.000	12.568.500
		PT Fidac Inovasi Teknologi	60 bulan	20 Mar 2019 s.d 19 Mar 2024	09/A/KS/III/2019 12/FIT/III/2019	54.460.000	24.155.645
		PT. BNI	24 bulan	01 Jan 2022 s.d 31 Des 2023	45/HM.05.03/2021 JNG/PKS/26/2021	403.451.000	403.451.000
		PT Fidac Inovasi Teknologi	36 bulan	1 Jan 2022 s.d 1 Jan 2025	44/HM.05.03/2021 2179/FIT/PKS/XII/2021	327.907.000	327.907.000
2	Kanreg I BKN Yogyakarta	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) SEDAR	60 bulan	09 Jan 2017 s.d 08 Jan 2022	151/SK-REG.I/2016	5.000.000	-
3	Kanreg V BKN DKI Jakarta	PT. BNI (ATM)	36 bulan	02 Jan 2020 s.d 01 Jan 2023	063/KR.V.25.1/II/2020 JNG/PKS/05/2020	50.631.000	16.877.000
4	Kanreg XI BKN Manado	PT. BNI (ATM)	36 bulan	01 Sept 2020 s.d 31 Agus 2023	MDO/01/019/PKS SEWA ATM/2020	22.887.000	12.715.000
5	Kanreg XII BKN Pekanbaru	PT. BRI (ATM)	36 bulan	01 Jan 2019 s.d 31 Des 2021	001/PS-ATM/KR.XII/5-2019	34.305.000	-
6	Pusat Pengembangan ASN	PT. BRI (ATM)	12 bulan	26 April 2021 s.d. 25 April 2022	002/PKS/PUSBANGPEGASN/IV/2021 B.320.KC-XIV/LYI/04/2021	7.852.000	2.490.688
Jumlah					1.821.871.000	1.095.425.464	

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	KET
1	Pemerintah Kota Ternate	Barang	DN	1.436.109.000,00	1.436.109.000,00	Tanah, Gedung dan Bangunan
2	PT Taspen (PERSERO)	Barang	DN	223.500.000,00	223.500.000,00	Mobil Ambulance
3	Pemerintah Kabupaten Donggala	Barang	DN	777.362.500,00	777.362.500,00	Tanah, Gedung dan Bangunan
4	Pemerintah Provinsi Banda Aceh	Barang	DN	4.986.890.000,00	4.986.860.000,00	Tanah
5	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Barang	DN	44.672.238,00	44.672.238,00	Tanah
6	Prospera	Jasa	LN	680.885.846,00	680.885.846,00	Kegiatan
7	Pemerintah Provinsi Jambi	Barang	DN	965.040.000,00	965.040.000,00	Tanah
8	Pemerintah Kabupaten Kupang	Barang	DN	360.000.000,00	360.000.000,00	Tanah
9	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Barang	DN	354.360.000,00	354.360.000,00	Mobil Operasional
Jumlah				9.828.819.584,00	9.828.789.584,00	

Jakarta, 9 Mei 2022

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Bima Hari Wibisana

LAMPIRAN PENDUKUNG

LAMPIRAN I

Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 27/04/22 2:57 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	15,015,133,000	18,440,310,807	3,425,177,807	123	11,388,920,000	14,667,031,603	3,278,111,603	129
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	15,015,133,000	18,440,310,807	3,425,177,807	123	11,388,920,000	14,667,031,603	3,278,111,603	129
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	318,364,495,000	294,015,021,961	(24,349,473,039)	92	363,258,569,000	298,246,157,774	(65,012,411,226)	82
	BELANJA BARANG	366,227,590,000	344,648,111,027	(21,579,478,973)	94	298,465,899,000	258,381,290,483	(40,084,608,517)	87
	BELANJA MODAL	67,822,966,000	65,657,252,407	(2,165,713,593)	97	39,834,495,000	38,698,295,359	(1,136,199,641)	97
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	752,415,051,000	704,320,385,395	(48,094,665,605)	94	701,558,963,000	595,325,743,616	(106,233,219,384)	85
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 27/04/22 2:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	151,486,636,000	135,622,058,000	120,289,366,630	26,000,895	120,263,365,735	88.69	15,358,692,265
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,611,000	2,802,000	1,820,626	18,139	1,802,487	64.98	999,513
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10,035,025,000	8,359,103,000	8,105,256,016	1,799,720	8,103,456,296	96.96	255,646,704
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,469,234,000	2,151,898,000	1,981,364,742	550,932	1,980,813,810	92.08	171,084,190
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,970,737,000	8,761,960,000	7,854,640,000	112,500,136	7,742,139,864	89.64	1,019,820,136
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	11,249,060,000	10,710,015,000	9,919,277,000	16,846,020	9,902,430,980	92.62	807,584,020
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	922,036,000	1,022,088,000	776,087,690	144,840	775,942,850	75.93	246,145,150
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,435,695,000	6,800,550,000	6,086,721,729	1,110,450	6,085,611,340	89.5	714,938,660
511129	Belanja Uang Makan PNS	22,186,176,000	20,834,990,000	19,144,804,620	40,481,798	19,104,322,831	91.89	1,730,667,169
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	572,798,000	571,298,000	568,075,000	550,000	567,525,000	99.44	3,773,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,598,973,000	2,454,758,000	1,931,490,000	51,742,332	1,879,747,668	78.68	575,010,332
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	215,928,981,000	197,291,520,000	176,658,904,123	251,745,262	176,407,158,861	89.54	20,884,361,139
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,112,734,000	909,901,000	711,747,000	1,126,150	710,620,850	78.22	199,280,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,112,734,000	909,901,000	711,747,000	1,126,150	710,620,850	78.22	199,280,150
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	128,500,001,000	120,163,074,000	117,114,633,720	217,391,470	116,897,242,250	97.46	3,265,831,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	128,500,001,000	120,163,074,000	117,114,633,720	217,391,470	116,897,242,250	97.46	3,265,831,750
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	345,541,716,000	318,364,495,000	294,485,284,843	470,262,882	294,015,021,961	92.5	24,349,473,039
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	48,415,617,000	44,235,691,000	43,893,699,811	3,325,000	43,890,374,811	99.23	345,316,189
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	779,090,000	606,368,000	591,500,645	0	591,500,645	97.55	14,867,355
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,319,562,000	1,225,037,000	1,140,585,752	0	1,140,585,752	93.11	84,451,248
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,698,960,000	3,575,996,000	3,489,738,000	6,880,700	3,482,857,300	97.59	93,138,700
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	803,142,000	729,496,000	686,019,303	24,000	685,995,303	94.04	43,500,697
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	55,000,000	958,555,000	727,245,569	0	727,245,569	75.87	231,309,431
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	55,071,371,000	51,331,143,000	50,528,789,080	10,229,700	50,518,559,380	98.44	812,583,620
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	15,195,548,000	20,539,221,000	17,098,792,129	700,000	17,098,092,129	83.25	3,441,128,871
521212	Belanja Barang Transito	12,000,000	0	0	0	0	0	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,654,440,000	14,015,830,000	11,921,055,000	3,073,750	11,917,981,250	85.05	2,097,848,750
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,393,532,000	1,700,079,000	1,626,982,000	0	1,626,982,000	95.7	73,097,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 27/04/22 2:58 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	90,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	23,345,520,000	36,255,130,000	30,646,829,129	3,773,750	30,643,055,379	84.53	5,612,074,621
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,794,205,000	13,093,349,000	12,713,159,134	11,228,212	12,701,930,922	97.1	391,418,078
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	63,504,000	62,930,000	50,137,000	0	50,137,000	79.67	12,793,000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	593,440,000	593,143,075	0	593,143,075	99.95	296,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	16,857,709,000	13,749,719,000	13,356,439,209	11,228,212	13,345,210,997	97.14	404,508,003
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	16,059,800,000	13,924,536,000	17,702,019,192	4,299,658,111	13,402,361,081	127.13	522,174,919
522112	Belanja Langganan Telepon	756,580,000	618,794,000	455,493,080	0	455,493,080	73.61	163,300,920
522113	Belanja Langganan Air	587,600,000	422,842,000	359,053,985	0	359,053,985	84.91	63,788,015
522131	Belanja Jasa Konsultan	3,115,586,000	4,109,450,000	4,048,995,300	45,527,500	4,003,467,800	98.53	105,982,200
522141	Belanja Sewa	9,045,572,000	106,330,529,000	101,466,961,171	5,423,000	101,461,538,171	95.43	4,868,990,829
522151	Belanja Jasa Profesi	7,630,600,000	4,209,645,000	3,375,208,400	50,315,000	3,324,893,400	80.18	884,751,600
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,204,026,000	3,196,115,000	3,052,723,629	23,204,167	3,029,519,462	95.51	166,595,538
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,603,023,000	11,919,897,000	9,330,602,970	42,000	9,330,560,970	78.28	2,589,336,030
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	44,002,787,000	144,731,808,000	139,791,057,727	4,424,169,778	135,366,887,949	96.59	9,364,920,051
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,779,952,000	10,852,824,000	10,513,886,738	0	10,513,886,738	96.88	338,937,262
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	227,351,000	282,887,000	265,609,030	0	265,609,030	93.89	17,277,970
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	0	300,000	300,000	0	300,000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	728,340,000	1,228,949,000	1,199,829,601	0	1,199,829,601	97.63	29,119,399
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,102,935,000	16,281,462,000	15,690,048,718	100,000	15,689,948,718	96.37	591,513,282
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	393,330,000	332,522,000	265,207,050	634,696	264,572,354	79.76	67,949,646
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61,000,000	56,574,000	40,001,795	0	40,001,795	70.71	16,572,205
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	5,000,000	4,985,000	4,983,000	0	4,983,000	99.96	2,000
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	110,000,000	289,400,000	288,113,193	0	288,113,193	99.56	1,286,807
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	30,000,000	1,429,000	1,428,435	0	1,428,435	99.96	565
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,064,800,000	943,200,000	869,488,421	0	869,488,421	92.18	73,711,579
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	29,502,708,000	30,274,532,000	29,138,895,981	734,696	29,138,161,285	96.25	1,136,370,715
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	43,062,418,000	76,078,250,000	73,400,833,085	276,784,360	73,124,048,725	96.48	2,954,201,275
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,383,676,000	4,255,738,000	3,457,390,807	42,372,000	3,415,018,807	81.24	840,719,193
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,721,843,000	5,270,520,000	5,173,614,600	0	5,173,614,600	98.16	96,905,400
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	130,000,000	129,240,000	0	129,240,000	99.42	760,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 27/04/22 2:58 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,140,775,000	4,150,750,000	3,794,450,105	136,200	3,794,313,905	91.42	356,436,095
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	54,308,712,000	89,885,258,000	85,955,528,597	319,292,560	85,636,236,037	95.63	4,249,021,963
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	223,088,807,000	366,227,590,000	349,417,539,723	4,769,428,696	344,648,111,027	95.41	21,579,478,973
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	25,000,000	33,710,000	24,710,000	0	24,710,000	73.3	9,000,000
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	98,230,000	98,230,000	0	98,230,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	25,000,000	131,940,000	122,940,000	0	122,940,000	93.18	9,000,000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,275,864,000	52,281,782,000	51,912,909,467	6,159,000	51,906,750,467	99.29	375,031,533
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	11,200,000	208,196,000	202,851,476	0	202,851,476	97.43	5,344,524
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5,538,617,000	1,157,042,000	1,136,199,175	0	1,136,199,175	98.2	20,842,825
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	47,825,681,000	53,647,020,000	53,251,960,118	6,159,000	53,245,801,118	99.26	401,218,882
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150,000,000	700,650,000	699,790,900	0	699,790,900	99.88	859,100
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8,662,220,000	6,097,795,000	4,377,945,280	0	4,377,945,280	71.8	1,719,849,720
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	8,812,220,000	6,798,445,000	5,077,736,180	0	5,077,736,180	74.69	1,720,708,820
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	1,000,000,000	803,000,000	802,655,000	0	802,655,000	99.96	345,000
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	171,000,000	169,574,240	0	169,574,240	99.17	1,425,760
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	1,000,000,000	974,000,000	972,229,240	0	972,229,240	99.82	1,770,760
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	3,622,699,000	4,422,495,000	4,393,999,601	4,519,232	4,389,480,369	99.36	33,014,631
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	3,679,145,000	1,849,066,000	1,849,065,500	0	1,849,065,500	100	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	7,301,844,000	6,271,561,000	6,243,065,101	4,519,232	6,238,545,869	99.55	33,015,131
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	64,964,745,000	67,822,966,000	65,667,930,639	10,678,232	65,657,252,407	96.82	2,165,713,593
	JUMLAH BELANJA	633,595,268,000	752,415,051,000	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	94.31	48,094,665,605

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 27/04/22 2:58 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
088010100K	kanreg V BKN							
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	15,669,852,000	21,717,500,000	20,193,476,145	93,474,693	20,100,001,452	92.55	1,617,498,548
	JUMLAH BELANJA kanreg V BKN	15,669,852,000	21,717,500,000	20,193,476,145	93,474,693	20,100,001,452	92.98	1,617,498,548
088010100KP	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA							
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	403,646,339,000	464,471,544,000	439,414,161,890	4,682,244,841	434,731,917,049	93.6	29,739,626,951
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	403,646,339,000	464,471,544,000	439,414,161,890	4,682,244,841	434,731,917,049	94.61	29,739,626,951
088010200K	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT							
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	18,760,023,000	23,754,261,000	22,119,993,033	8,406,572	22,111,586,461	93.08	1,642,674,539
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	18,760,023,000	23,754,261,000	22,119,993,033	8,406,572	22,111,586,461	93.12	1,642,674,539
088010400K	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA							
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	19,884,375,000	26,159,323,000	24,165,464,047	13,369,224	24,152,094,823	92.33	2,007,228,177
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	19,884,375,000	26,159,323,000	24,165,464,047	13,369,224	24,152,094,823	92.38	2,007,228,177
088010500K	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR							
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	17,425,740,000	21,521,843,000	20,587,029,135	15,875,431	20,571,153,704	95.58	950,689,296
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	17,425,740,000	21,521,843,000	20,587,029,135	15,875,431	20,571,153,704	95.66	950,689,296
088010600K	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN Banda Aceh	8,960,259,000	9,519,635,000	8,992,232,235	19,698,806	8,972,533,429	94.25	547,101,571
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	8,960,259,000	9,519,635,000	8,992,232,235	19,698,806	8,972,533,429	94.46	547,101,571
088010700K	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA							
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	12,218,328,000	16,171,429,000	16,079,474,767	8,959,067	16,070,515,700	99.38	100,913,300
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	12,218,328,000	16,171,429,000	16,079,474,767	8,959,067	16,070,515,700	99.43	100,913,300
088010900K	BA(088) ES1(01) RIAU							
667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	15,646,875,000	21,156,904,000	19,764,503,312	9,393,991	19,755,109,321	93.37	1,401,794,679
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) RIAU	15,646,875,000	21,156,904,000	19,764,503,312	9,393,991	19,755,109,321	93.42	1,401,794,679
088011100K	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
622372	KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	15,287,423,000	22,426,896,000	20,174,561,185	105,092,204	20,069,468,981	89.49	2,357,427,019
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	15,287,423,000	22,426,896,000	20,174,561,185	105,092,204	20,069,468,981	89.96	2,357,427,019
088011500K	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
622386	KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	15,636,613,000	19,196,324,000	18,661,724,227	60,634,252	18,601,089,975	96.9	595,234,025
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	15,636,613,000	19,196,324,000	18,661,724,227	60,634,252	18,601,089,975	97.22	595,234,025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 27/04/22 2:58 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
088011700K 667896	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	13,442,055,000	16,272,738,000	15,702,809,232	21,095,556	15,681,713,676	96.37	591,024,324
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	13,442,055,000	16,272,738,000	15,702,809,232	21,095,556	15,681,713,676	96.5	591,024,324
088011900K 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	20,601,652,000	29,143,077,000	26,754,476,755	19,762,006	26,734,714,749	91.74	2,408,362,251
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	20,601,652,000	29,143,077,000	26,754,476,755	19,762,006	26,734,714,749	91.8	2,408,362,251
088012200K 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	15,420,530,000	20,249,533,000	19,041,297,173	82,165,828	18,959,131,345	93.63	1,290,401,655
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) BALI	15,420,530,000	20,249,533,000	19,041,297,173	82,165,828	18,959,131,345	94.03	1,290,401,655
088012500K 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	9,516,814,000	10,396,977,000	9,491,883,172	56,193,434	9,435,689,738	90.75	961,287,262
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA	9,516,814,000	10,396,977,000	9,491,883,172	56,193,434	9,435,689,738	91.29	961,287,262
088013300K 667652	BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI	9,454,228,000	10,685,186,000	10,630,880,903	2	10,630,880,901	99.49	54,305,099
	JUMLAH BELANJA BA(088) ES1(01) PAPUA BARAT	9,454,228,000	10,685,186,000	10,630,880,903	2	10,630,880,901	99.49	54,305,099
null 020505	Kode UAPPAW Tidak Ada PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	22,024,162,000	19,571,881,000	17,796,787,994	54,003,903	17,742,784,091	90.65	1,829,096,909
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	22,024,162,000	19,571,881,000	17,796,787,994	54,003,903	17,742,784,091	90.93	1,829,096,909
	JUMLAH BELANJA 01	633,595,268,000	752,415,051,000	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	94.31	48094665605
	JUMLAH BELANJA	633,595,268,000	752,415,051,000	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	94.31	48,094,665,605

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 27/04/22 2:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							
51	BELANJA PEGAWAI	345,541,716,000	318,364,495,000	294,485,284,843	470,262,882	294,015,021,961	92.35	24,349,473,039
52	BELANJA BARANG	223,088,807,000	366,227,590,000	349,417,539,723	4,769,428,696	344,648,111,027	94.11	21,579,478,973
53	BELANJA MODAL	64,964,745,000	67,822,966,000	65,667,930,639	10,678,232	65,657,252,407	96.81	2,165,713,593
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	633,595,268,000	752,415,051,000	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	94.31	48,094,665,605
	JUMLAH BELANJA	633,595,268,000	752,415,051,000	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	94.31	48,094,665,605

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 27/04/22 2:59 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian	3,150,000,000	2,485,094,000	2,444,165,051	1,350,000	2,442,815,051	98.3	42,278,949
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi	2,555,000,000	168,369,776,000	155,818,597,516	247,476,223	155,571,121,293	1286.84	12,798,654,707
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	5,100,000,000	5,955,013,000	4,713,205,831	0	4,713,205,831	79.15	1,241,807,169
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	8,070,719,000	5,207,073,000	4,390,901,059	49,933,750	4,340,967,309	83.37	866,105,691
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN	15,649,389,000	11,746,429,000	11,531,206,855	48,197,103	11,483,009,752	97.76	263,419,248
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN	9,994,513,000	6,437,979,000	6,247,409,302	5,804,410	6,241,604,892	1448.04	196,374,108
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN	16,338,412,000	12,778,066,000	12,295,494,978	7,884,700	12,287,610,278	1435.12	490,455,722
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN	11,754,674,000	7,511,882,000	7,232,048,313	15,189,800	7,216,858,513	1402.51	295,023,487
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	72,612,707,000	220,491,312,000	204,673,028,905	375,835,986	204,297,192,919	92.826	16,194,119,081
WA	Program Dukungan Manajemen							
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1,289,178,000	1,151,128,000	1,129,515,121	0	1,129,515,121	98.12	21,612,879
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,178,737,000	723,951,000	723,892,076	0	723,892,076	99.99	58,924
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	1,000,000,000	793,082,000	786,368,661	426,000	785,942,661	99.1	7,139,339
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi	36,000,000,000	36,000,000,000	35,674,592,242	38,527,500	35,636,064,742	98.99	363,935,258
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN	900,000,000	765,000,000	743,715,219	0	743,715,219	97.22	21,284,781
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM	8,771,661,000	6,745,656,000	6,374,062,094	24,564,111	6,349,497,983	1285.44	396,158,017
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	502,325,640,000	473,759,976,000	448,513,433,444	4,811,016,213	443,702,417,231	1544.81	30,057,558,769
4844	Legislasi dan Litigasi	879,700,000	661,106,000	646,626,325	0	646,626,325	97.81	14,479,675

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 27/04/22 2:59 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	552,344,916,000	520,599,899,000	494,592,205,182	4,874,533,824	489,717,671,358	95.004	30,882,227,642
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	624,957,623,000	741,091,211,000	699,265,234,087	5,250,369,810	694,014,864,277	94.356	47,076,346,723
04	PNBP							
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	3,162,645,000	6,448,730,000	6,182,837,615	0	6,182,837,615	95.88	265,892,385
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	2,000,000,000	1,598,415,000	1,324,481,518	0	1,324,481,518	82.86	273,933,482
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian	741,860,000	1,738,388,000	1,292,534,245	0	1,292,534,245	74.35	445,853,755
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CO	5,904,505,000	9,785,533,000	8,799,853,378	0	8,799,853,378	89.927	985,679,622
WA	Program Dukungan Manajemen							
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,733,140,000	1,538,307,000	1,505,667,740	0	1,505,667,740	196.29	32,639,260
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,733,140,000	1,538,307,000	1,505,667,740	0	1,505,667,740	97.878	32,639,260
	JUMLAH BELANJA PNBP	8,637,645,000	11,323,840,000	10,305,521,118	0	10,305,521,118	91.007	1,018,318,882
	JUMLAH	633,595,268,000	752,415,051,000	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	94.31	48,094,665,605

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 27/04/22 3:00 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	55,000,000	958,555,000	727,245,569	0	727,245,569	75.87	231,309,431
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	55,000,000	958,555,000	727,245,569	0	727,245,569	75.87	231,309,431
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	90,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	90,000,000	0	0	0	0		0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	593,440,000	593,143,075	0	593,143,075	99.95	296,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	593,440,000	593,143,075	0	593,143,075	99.95	296,925
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,603,023,000	11,919,897,000	9,330,602,970	42,000	9,330,560,970	78.28	2,589,336,030
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,603,023,000	11,919,897,000	9,330,602,970	42,000	9,330,560,970	78.28	2,589,336,030
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	300,000	300,000	0	300,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	130,000,000	129,240,000	0	129,240,000	99.42	760,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	130,000,000	129,240,000	0	129,240,000	99.42	760,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,748,023,000	13,602,192,000	10,780,531,614	42,000	10,780,489,614	79.26	2,821,702,386
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	11,200,000	208,196,000	202,851,476	0	202,851,476	97.43	5,344,524
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	11,200,000	208,196,000	202,851,476	0	202,851,476	97.43	5,344,524
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	11,200,000	208,196,000	202,851,476	0	202,851,476	97.43	5,344,524
	JUMLAH BELANJA	2,759,223,000	13,810,388,000	10,983,383,090	42,000	10,983,341,090	79.53	2,827,046,910

LAMPIRAN II

Neraca

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:01 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	789,050,702	2,205,725	786,844,977	35,672.85
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	4,071,600	(4,071,600)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	10,162,052	19,259,312	(9,097,260)	(47.24)
Piutang Bukan Pajak	0	56,119,280	(56,119,280)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(3,816,428)	3,816,428	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	52,302,852	(52,302,852)	(100.00)
Persediaan	10,159,232,764	11,732,536,375	(1,573,303,611)	(13.41)
JUMLAH ASET LANCAR	10,958,445,518	11,810,375,864	(851,930,346)	(7.21)
ASET TETAP				
Tanah	2,309,435,980,187	2,302,109,905,449	7,326,074,738	0.32
Peralatan dan Mesin	607,409,829,240	568,440,548,093	38,969,281,147	6.86
Gedung dan Bangunan	841,376,833,975	833,845,886,323	7,530,947,652	0.90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,958,841,060	22,986,611,820	972,229,240	4.23
Aset Tetap Lainnya	19,534,460,093	13,625,162,893	5,909,297,200	43.37
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,470,688,262	224,384,887	1,246,303,375	555.43
AKUMULASI PENYUSUTAN	(650,095,568,842)	(595,293,645,979)	(54,801,922,863)	9.21
JUMLAH ASET TETAP	3,153,091,063,975	3,145,938,853,486	7,152,210,489	0.23
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	142,393,801,295	150,148,317,195	(7,754,515,900)	(5.16)
Aset Lain-lain	56,958,695,636	45,898,772,635	11,059,923,001	24.10
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(193,131,833,170)	(187,335,085,735)	(5,796,747,435)	3.09
JUMLAH ASET LAINNYA	6,220,663,761	8,712,004,095	(2,491,340,334)	(28.60)
JUMLAH ASET	3,170,270,173,254	3,166,461,233,445	3,808,939,809	0.12
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,502,059,270	1,537,404,551	(35,345,281)	(2.30)
Pendapatan Diterima Dimuka	1,095,425,464	533,658,360	561,767,104	105.27
Uang Muka dari KPPN	789,050,702	2,205,725	786,844,977	35,672.85
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,386,535,436	2,073,268,636	1,313,266,800	63.34
JUMLAH KEWAJIBAN	3,386,535,436	2,073,268,636	1,313,266,800	63.34
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,166,883,637,818	3,164,387,964,809	2,495,673,009	0.08
JUMLAH EKUITAS	3,166,883,637,818	3,164,387,964,809	2,495,673,009	0.08
JUMLAH EKUITAS	3,166,883,637,818	3,164,387,964,809	2,495,673,009	0.08
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,170,270,173,254	3,166,461,233,445	3,808,939,809	0.12

LAMPIRAN III

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 27/04/22 3:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,662,414,732	12,864,544,144	2,797,870,588	21.749
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	15,662,414,732	12,864,544,144	2,797,870,588	21.749
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	15,662,414,732	12,864,544,144	2,797,870,588	21.749
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	294,050,255,528	298,270,216,854	(4,219,961,326)	(1.415)
Beban Persediaan	13,845,491,552	12,752,768,231	1,092,723,321	8.569
Beban Barang dan Jasa	216,712,960,720	144,778,343,415	71,934,617,305	49.686
Beban Pemeliharaan	29,472,282,781	29,009,747,490	462,535,291	1.594
Beban Perjalanan Dinas	85,636,236,037	69,392,561,983	16,243,674,054	23.408
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 27/04/22 3:01 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	79,033,957,148	86,129,054,609	(7,095,097,461)	(8.238)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(3,816,428)	(1,867,467)	(1,948,961)	104.364
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	718,747,367,338	640,330,825,115	78,416,542,223	12.246
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(703,084,952,606)	(627,466,280,971)	(75,618,671,635)	12.051
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,285,783,033	571,698,250	714,084,783	124.906
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,494,522,668	1,054,945,850	439,576,818	41.668
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	208,739,635	483,247,600	(274,507,965)	(56.805)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	545,602,263	694,764,477	(149,162,214)	(21.469)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	665,487,023	1,814,631,448	(1,149,144,425)	(63.327)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	119,884,760	1,119,866,971	(999,982,211)	(89.295)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,831,385,296	1,266,462,727	564,922,569	44.606
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(701,253,567,310)	(626,199,818,244)	(75,053,749,066)	11.986
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(701,253,567,310)	(626,199,818,244)	(75,053,749,066)	11.986

LAMPIRAN IV

Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 27/04/22 3:01 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,164,387,964,809	3,472,135,583,010	(307,747,618,201)	(8.863)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(701,253,567,310)	(626,199,818,244)	(75,053,749,066)	11.986
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	8,040,376,147	(262,932,055,793)	270,972,431,940	(103.05 8)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(70,097,741)	0	(70,097,741)	()
SELISIH REVALUASI ASET	0	14,577,025,804	(14,577,025,804)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	8,791,359,734	(277,332,936,789)	286,124,296,523	(103.17)
LAIN-LAIN	(680,885,846)	(176,144,808)	(504,741,038)	286.549
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	695,708,864,172	581,384,255,836	114,324,608,336	19.664
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,495,673,009	(307,747,618,201)	310,243,291,210	(100.81 1)
EKUITAS AKHIR	3,166,883,637,818	3,164,387,964,809	2,495,673,009	0.079

LAMPIRAN V

Neraca Percobaan

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,205,725	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,071,600	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	19,259,312	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	56,119,280	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	3,816,428
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,141,036,187	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	606,908,833	0
0.0	117114	Suku Cadang	10,534,227	0
0.0	117131	Bahan Baku	53,156,848	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	920,900,280	0
0.0	131111	Tanah	2,302,109,905,449	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	568,440,548,093	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	833,845,886,323	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,124,321,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,764,941,783	0
0.0	134113	Jaringan	4,097,349,037	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	11,837,310,298	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,787,852,595	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	224,384,887	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	487,381,520,102
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	86,233,191,460
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	13,720,743,348
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	456,651,725
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,998,359,149
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	5,503,180,195
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	149,913,158,345	0
0.0	162161	Lisensi	39,658,850	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,808,855,471	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	37,089,917,164	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,626,098,730
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	42,853
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	142,652,737,064
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	33,710,023
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	36,022,497,065
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	140,923,592
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,294,179,359
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	98,230,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,071,600
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	533,658,360
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	2,205,725
0.0	391111	Ekuitas	0	3,164,387,964,809
JUMLAH			3,949,093,781,587	3,949,093,781,587

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	789,050,702	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	10,162,052	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,875,443,165	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	447,108,850	0
0.0	117114	Suku Cadang	8,099,700	0
0.0	117131	Bahan Baku	30,592,643	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	797,988,406	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	2,309,435,980,187	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	607,409,829,240	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	841,376,833,975	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	16,124,321,000	0
0.0	134112	Irigasi	2,764,941,783	0
0.0	134113	Jaringan	5,069,578,277	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	17,738,647,198	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,795,812,895	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,470,688,262	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	518,712,514,901
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	112,362,111,392
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	14,517,033,943
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	560,788,775
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,094,937,122
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,848,182,709
0.0	162121	Hak Cipta	500,000	0
0.0	162151	Software	142,158,642,445	0
0.0	162161	Lisensi	39,658,850	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	9,608,315,272	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	47,350,380,364	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	9,375,192,803
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	49,995
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	137,030,059,224
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	37,675,908

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	46,688,855,240
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	176,157,159
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,325,902,111
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,095,425,464
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	789,050,702
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	704,320,385,395
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,440,310,807	0
0.0	313211	Transfer Keluar	3,268,831,980	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,268,831,980
0.0	391111	Ekuitas	0	3,164,387,964,809
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	8,884,240,150
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	92,880,416	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	680,885,846	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	8,793,543,738
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	1,035,245,846
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	70,097,741	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	533,887,309
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	960,635,359
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	494,949,391
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	84,000,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	459,030,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	2,226,530,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	12,169,915,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	194,246,920
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	78,855,034
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	492,340,578
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	77,633,121
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	16,658,290
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	33,742,754
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	667
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	120,375,338,526	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	26,000,895
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,837,704	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	18,139
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	8,108,718,320	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,799,720
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,982,016,021	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	550,932
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,836,140,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	112,500,136
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,912,889,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	16,846,020
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	772,367,500	0
3.1	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	144,840
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	6,087,445,990	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	1,110,450
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	19,112,174,629	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	40,481,798
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	572,275,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	550,000
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,932,935,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	51,742,332
3.0	512211	Beban Uang Lembur	711,747,000	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	1,126,150
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	117,114,633,720	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	217,391,470
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	43,894,356,884	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	3,325,000
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	591,500,645	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,148,276,873	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3,489,738,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	6,880,700
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	686,019,303	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	24,000
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	733,814,545	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,098,792,129	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	700,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	11,921,055,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	3,073,750
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,626,982,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	17,830,430,281	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	4,299,658,111
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	457,113,749	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	380,802,087	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	4,048,995,300	0
3.1	522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	0	45,527,500
3.0	522141	Beban Sewa	101,341,084,153	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	5,423,000
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,375,208,400	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	50,315,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,052,723,629	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	23,204,167
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,330,602,970	0
3.1	522192	Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	42,000
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,965,739,638	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	300,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,162,915,251	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,656,093,368	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	100,000
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,001,795	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	288,113,193	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	869,488,421	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	73,400,833,085	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	276,784,360
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,457,390,807	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	42,372,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,173,614,600	0
3.0	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	129,240,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,794,450,105	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	136,200
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45,549,162,233	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25,920,957,437	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	796,290,595	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	104,137,050	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	96,577,973	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	307,980,794	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	7,142	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	5,702,272,567	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	3,965,885	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	405,894,975	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	146,710,497	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	11,949,139,622	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,473,673,290	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	11,074,825	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	298,449,727	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	1,597,902,203	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	3,816,428
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	143,638,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	208,739,635	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	119,884,760	0
JUMLAH			4,760,358,218,887	4,760,358,218,887

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	48,094,665,605	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	3,425,177,807	0
2.0	425289	Estimasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	1,561,644,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	1,561,644,000	0
2.0	425429	Estimasi Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,891,845,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	135,622,058,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,802,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	8,359,103,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	2,151,898,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8,761,960,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,710,015,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,022,088,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	6,800,550,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	20,834,990,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	571,298,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,454,758,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	909,901,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	120,163,074,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	44,235,691,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	606,368,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,225,037,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	3,575,996,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	729,496,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan	0	958,555,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	20,539,221,000
2.0	521212	Allotment Belanja Barang Transito	0	0
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	14,015,830,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,700,079,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	0	0
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	13,093,349,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai	0	62,930,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan	0	593,440,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	13,924,536,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	618,794,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	422,842,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	4,109,450,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	106,330,529,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	4,209,645,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	3,196,115,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	11,919,897,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	10,852,824,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	282,887,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	300,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,228,949,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	16,281,462,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	332,522,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	56,574,000
2.0	523132	Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	4,985,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	289,400,000
2.0	523191	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	1,429,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	943,200,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	76,078,250,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,255,738,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	5,270,520,000
2.0	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	130,000,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	4,150,750,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0
2.0	531114	Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	33,710,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan	0	98,230,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	52,281,782,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	208,196,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,157,042,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	700,650,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	6,097,795,000
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	803,000,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	171,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	4,422,495,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	1,849,066,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	533,887,309
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	960,635,359
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,056,716,495
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	0	84,000,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	0	459,030,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	2,226,530,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	12,169,915,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	194,246,920
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	78,855,034
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	548,459,858
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	77,633,121
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	16,658,290
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	33,742,754
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	667
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	120,289,366,630	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	26,000,895

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,820,626	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	18,139
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	8,105,256,016	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,799,720
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,981,364,742	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	550,932
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,854,640,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	112,500,136
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,919,277,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	16,846,020
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	776,087,690	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	144,840
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	6,086,721,790	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,110,450
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	19,144,804,629	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	40,481,798
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	568,075,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	550,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,931,490,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	51,742,332
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	711,747,000	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	1,126,150
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	117,114,633,720	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	217,391,470
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	43,893,699,811	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,325,000
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	591,500,645	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,140,585,752	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,489,738,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	6,880,700
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	686,019,303	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	24,000
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	727,245,569	0
3.0	521211	Belanja Bahan	17,098,792,129	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	700,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,921,055,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	3,073,750
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,626,982,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,713,159,134	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	11,228,212
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	50,137,000	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	593,143,075	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	17,702,019,192	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	4,299,658,111
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	455,493,080	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	359,053,985	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	4,048,995,300	0
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	45,527,500
3.0	522141	Belanja Sewa	101,466,961,171	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	5,423,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,375,208,400	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	50,315,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,052,723,629	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	23,204,167
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,330,602,970	0
3.1	522192	Pengembalian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-	0	42,000
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,513,886,738	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	265,609,030	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan	300,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,199,829,601	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,690,048,718	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	100,000
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	265,207,050	0
3.1	523123	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	634,696
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,001,795	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	288,113,193	0
3.0	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	1,428,435	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	869,488,421	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	73,400,833,085	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	276,784,360
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,457,390,807	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	42,372,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,173,614,600	0
3.0	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	129,240,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,794,450,105	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	136,200
3.0	531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	24,710,000	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	98,230,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,912,909,467	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	6,159,000
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	202,851,476	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,136,199,175	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	699,790,900	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tgl. Cetak 27/04/2022 3:02 AM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,377,945,280	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	802,655,000	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	169,574,240	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	4,393,999,601	0
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	4,519,232
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	1,849,065,500	0
JUMLAH			776,105,731,617	776,105,731,617

LAMPIRAN VI

Laporan Realisasi Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 27/04/22 3:03 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	533,887,309	0	533,887,309	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	960,635,359	0	960,635,359	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,056,716,495	0	1,056,716,495	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	0	84,000,000	0	84,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	2,635,239,163	0	2,635,239,163	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	1,561,644,000	459,030,000	0	459,030,000	29.39
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,561,644,000	459,030,000	0	459,030,000	29.39
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,561,644,000	2,226,530,000	0	2,226,530,000	142.58
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11,891,845,000	12,169,915,000	0	12,169,915,000	102.34
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	13,453,489,000	14,396,445,000	0	14,396,445,000	107.01
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	194,246,920	0	194,246,920	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	194,246,920	0	194,246,920	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78,855,034	0	78,855,034	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	548,459,858	0	548,459,858	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	77,633,121	0	77,633,121	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	16,658,290	0	16,658,290	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	33,742,754	0	33,742,754	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	667	0	667	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 27/04/22 3:03 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	755,349,724	0	755,349,724	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	15,015,133,000	18,440,310,807	0	18,440,310,807	122.81
	JUMLAH PENDAPATAN	15,015,133,000	18,440,310,807	0	18,440,310,807	122.81

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 27/04/22 3:04 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	533,887,309	0	533,887,309	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	960,635,359	0	960,635,359	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,056,716,495	0	1,056,716,495	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	0	84,000,000	0	84,000,000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	1,561,644,000	459,030,000	0	459,030,000	29.39
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1,561,644,000	2,226,530,000	0	2,226,530,000	142.58
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	11,891,845,000	12,169,915,000	0	12,169,915,000	102.34
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	194,246,920	0	194,246,920	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78,855,034	0	78,855,034	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	548,459,858	0	548,459,858	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	77,633,121	0	77,633,121	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	16,658,290	0	16,658,290	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	33,742,754	0	33,742,754	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	667	0	667	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	15,015,133,000	18,440,310,807	0	18,440,310,807	122.81
	JUMLAH PENDAPATAN	15,015,133,000	18,440,310,807	0	18,440,310,807	122.81

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 27/04/22 3:04 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					
088010100K	kanreg V BKN					
606254	KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA	0	56,212,400	0	56,212,400	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KD kanreg V BKN	0	56,212,400	0	56,212,400	
088010100K	BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA					
017220	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA	11,891,845,000	14,494,996,801	0	14,494,996,801	121.89
	JUMLAH PENDAPATAN 088010100KP BA(088) ES1(01) DKI JAKARTA	11,891,845,000	14,494,996,801	0	14,494,996,801	121.89
088010200K	BA(088) ES1(01) JAWA BARAT					
017237	KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG	0	39,098,822	0	39,098,822	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010200KD BA(088) ES1(01) JAWA BARAT	0	39,098,822	0	39,098,822	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
020505	PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	3,123,288,000	3,089,650,133	0	3,089,650,133	98.92
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	3,123,288,000	3,089,650,133	0	3,089,650,133	98.92
088010400K	BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA					
017241	KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA	0	128,728,165	0	128,728,165	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010400KD BA(088) ES1(01) DI YOGYAKARTA	0	128,728,165	0	128,728,165	
088010500K	BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR					
450454	KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA	0	155,291,081	0	155,291,081	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010500KD BA(088) ES1(01) JAWA TIMUR	0	155,291,081	0	155,291,081	
088010600K	BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
667752	KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH	0	195	0	195	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010600KD BA(088) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	195	0	195	
088010700K	BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 27/04/22 3:04 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
606261	KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN	0	25,907,004	0	25,907,004	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010700KD BA(088) ES1(01) SUMATERA UTARA	0	25,907,004	0	25,907,004	
088010900K 667901	BA(088) ES1(01) RIAU KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	0	14,249,295	0	14,249,295	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088010900KD BA(088) ES1(01) RIAU	0	14,249,295	0	14,249,295	
088011100K 622372	BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG	0	23,132,239	0	23,132,239	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011100KD BA(088) ES1(01) SUMATERA SELATAN	0	23,132,239	0	23,132,239	
088011500K 622386	BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN KANTOR REGIONAL VIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANJARMASIN	0	25,710,351	0	25,710,351	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011500KD BA(088) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	0	25,710,351	0	25,710,351	
088011700K 667896	BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA KANTOR REGIONAL XI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO	0	26,392,673	0	26,392,673	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011700KD BA(088) ES1(01) SULAWESI UTARA	0	26,392,673	0	26,392,673	
088011900K 560635	BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR	0	168,599,756	0	168,599,756	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088011900KD BA(088) ES1(01) SULAWESI SELATAN	0	168,599,756	0	168,599,756	
088012200K 667882	BA(088) ES1(01) BALI KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR	0	140,931,392	0	140,931,392	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088012200KD BA(088) ES1(01) BALI	0	140,931,392	0	140,931,392	
088012500K 622390	BA(088) ES1(01) PAPUA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA	0	51,410,500	0	51,410,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN 088012500KD BA(088) ES1(01) PAPUA	0	51,410,500	0	51,410,500	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 088

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 27/04/22 3:04 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	15,015,133,000	18,440,310,807	0	18,440,310,807	122.81
	JUMLAH PENDAPATAN	15,015,133,000	18,440,310,807	0	18,440,310,807	122.81

LAMPIRAN VII

Laporan Posisi BMN di Neraca

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 27/04/22 3:04 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_k3_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	8,874,470,402
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	448,080,590
117114	Suku Cadang	8,065,902
117131	Bahan Baku	30,592,643
117199	Persediaan Lainnya	798,023,227
131111	Tanah	2,309,435,980,187
132111	Peralatan dan Mesin	607,409,829,240
133111	Gedung dan Bangunan	841,376,833,975
134111	Jalan dan Jembatan	16,124,321,000
134112	Irigasi	2,764,941,783
134113	Jaringan	5,069,578,277
135111	Aset Tetap Renovasi	17,738,647,198
135121	Aset Tetap Lainnya	1,795,812,895
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	1,470,688,262
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(518,712,514,901)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(112,362,111,392)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(14,517,033,943)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(560,788,775)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,094,937,122)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,848,182,709)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	142,158,642,445
162161	Lisensi	39,658,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	9,608,315,272
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	47,350,380,364
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(9,375,192,803)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(49,995)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(137,030,059,224)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(37,675,908)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(46,688,855,240)
J U M L A H		3,169,470,960,500

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2021

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 27/04/22 3:05 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_k

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	10,141,036,187
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	606,908,833
117114	Suku Cadang	10,534,227
117131	Bahan Baku	53,156,848
117199	Persediaan Lainnya	920,900,280
131111	Tanah	2,302,109,905,449
132111	Peralatan dan Mesin	568,440,548,093
133111	Gedung dan Bangunan	833,845,886,323
134111	Jalan dan Jembatan	16,124,321,000
134112	Irigasi	2,764,941,783
134113	Jaringan	4,097,349,037
135111	Aset Tetap Renovasi	11,837,310,298
135121	Aset Tetap Lainnya	1,787,852,595
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	224,384,887
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(487,381,520,102)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(86,233,191,460)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(13,720,743,348)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(456,651,725)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,998,359,149)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5,114,286,309)
162121	Hak Cipta	500,000
162151	Software	149,913,158,345
162161	Lisensi	39,658,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	195,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,808,855,471
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	37,089,917,164
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(8,626,098,730)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(42,853)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(142,652,737,064)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(33,710,023)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(36,022,497,065)
J U M L A H		3,166,772,287,842

LAMPIRAN VIII

Laporan Barang Kuasa Pengguna

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:05 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	499,843	2,302,109,905,449	72,862	7,863,728,506	4,237	537,653,768	568,468	2,309,435,980,187
20101	TANAH PERSIL	499,843	2,302,109,905,449	72,862	7,863,728,506	4,237	537,653,768	568,468	2,309,435,980,187
20102	TANAH NON PERSIL	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	62,888	568,440,548,093	2,427	57,689,390,873	2,112	18,720,109,726	63,203	607,409,829,240
30103	ALAT BANTU	166	33,427,385,106	47	5,134,776,660	9	949,073,525	204	37,613,088,241
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	220	38,002,375,200	4	626,727,988	20	3,506,088,300	204	35,123,014,888
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	84	153,450,250	9	16,956,500	2	2,979,000	91	167,427,750
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	18	5,012,660,335	1	201,127,135	0	0	19	5,213,787,470
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	35	109,626,600	2	3,254,900	0	0	37	112,881,500
30303	ALAT UKUR	6	11,549,050	2	93,345,000	0	0	8	104,894,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	7	199,807,300	0	0	1	150,700,000	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	10,341	83,445,297,073	198	1,372,587,950	362	1,621,646,527	10,177	83,196,238,496
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,326	132,701,432,583	894	6,076,813,691	1,021	2,738,184,276	37,199	136,040,061,998
30601	ALAT STUDIO	948	25,535,450,220	93	2,329,339,745	46	1,122,911,155	995	26,741,878,810
30602	ALAT KOMUNIKASI	709	5,162,839,543	21	92,853,316	56	109,957,880	674	5,145,734,979
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	341	809,596,090	11	151,122,757	7	19,566,500	345	941,152,347
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	8	20,907,750	1	71,396,875	0	0	9	92,304,625
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	97	5,689,140,494	8	189,447,500	25	24,375,000	80	5,854,212,994
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5	18,205,000	12	69,465,000	0	0	17	87,670,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	7,159	86,487,723,689	710	9,508,537,281	346	3,756,666,679	7,523	92,239,594,291
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,309	147,317,812,607	413	31,672,779,575	216	4,260,991,074	5,506	174,729,601,108
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	0	0	0	0	57	2,169,719,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	1	78,859,000	0	0	1	78,859,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	511,948,410	0	0	1	456,969,810	8	54,978,600
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140,065,000	0	0	0	0	24	140,065,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54,758,000	0	0	0	0	6	54,758,000
133111	Gedung dan Bangunan	460	833,845,886,323	20	8,938,018,392	6	1,407,070,740	474	841,376,833,975

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:05 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	150	724,064,184,493	8	6,754,025,252	0	129,160,000	158	730,689,049,745
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	286	97,155,986,864	10	1,277,910,740	6	1,277,910,740	290	97,155,986,864
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	0	0	0	0	1	45,569,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	23	12,580,145,966	2	906,082,400	0	0	25	13,486,228,366
134111	Jalan dan Jembatan	53,426	16,124,321,000	8,556	0	0	0	61,982	16,124,321,000
50101	JALAN	53,416	16,122,161,000	8,556	0	0	0	61,972	16,122,161,000
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	27	2,764,941,783	0	0	0	0	27	2,764,941,783
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	11	1,541,794,683	0	0	0	0	11	1,541,794,683
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	0	0	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	31	4,097,349,037	1	972,229,240	0	0	32	5,069,578,277
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	613,242,000	1	972,229,240	0	0	4	1,585,471,240
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	28	11,837,310,298	25	15,828,414,120	24	9,927,077,220	29	17,738,647,198
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	1	3,998,500	1	3,998,500	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	11,574,407,398	22	15,655,183,220	21	9,753,846,320	25	17,475,744,298
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	2	169,232,400	2	169,232,400	3	258,904,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11,963	1,787,852,595	27	21,030,000	31	13,069,700	11,959	1,795,812,895
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,725	971,547,595	0	0	5	269,700	11,720	971,277,895
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	210	674,205,000	1	2,750,000	0	0	211	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	40,600,000	26	18,280,000	26	12,800,000	25	46,080,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,037	8,808,855,471	1,951	14,778,982,021	1,557	13,979,522,220	1,431	9,608,315,272
30103	ALAT BANTU	0	0	9	949,073,525	1	95,722,500	8	853,351,025
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	961,200,000	20	3,506,088,300	21	4,052,728,300	7	414,560,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:05 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6	7,680,000	2	2,979,000	8	10,659,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	150,700,000	0	0	1	150,700,000
30501	ALAT KANTOR	90	340,285,981	359	1,601,667,777	184	1,151,291,629	265	790,662,129
30502	ALAT RUMAH TANGGA	501	1,167,324,041	1,006	2,682,609,276	799	1,967,159,157	708	1,882,774,160
30601	ALAT STUDIO	15	715,850,847	44	1,105,811,155	27	839,439,405	32	982,222,597
30602	ALAT KOMUNIKASI	9	475,810,500	56	109,957,880	31	53,384,700	34	532,383,680
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	2,050,000	7	19,566,500	4	3,012,500	5	18,604,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	25	24,375,000	0	0	28	460,560,894
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	216	2,739,201,248	286	3,150,947,099	279	3,500,733,669	223	2,389,414,678
31002	PERALATAN KOMPUTER	176	1,764,384,960	126	1,013,966,999	193	1,839,771,550	109	938,580,409
31503	ALAT SAR	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	6,650,000	1	456,969,810	8	463,619,810	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	192,232,000	0	0	0	0	4	192,232,000
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	5	269,700	0	0	5	269,700
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	4	4,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000
TOTAL			3,749,816,970,049		106,091,793,152		44,584,503,374		3,811,324,259,827

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:06 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	63,203	607,409,829,240	487,381,520,102	45,128,663,033	(13,797,668,234)	518,712,514,901	88,697,314,339
30103	ALAT BANTU	204	37,613,088,241	23,857,749,064	2,925,328,285	(794,706,298)	25,988,371,051	11,624,717,190
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	204	35,123,014,888	26,975,158,620	2,567,608,309	(3,119,970,943)	26,422,795,986	8,700,218,902
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	91	167,427,750	149,580,864	8,943,512	(2,979,000)	155,545,376	11,882,374
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	19	5,213,787,470	4,600,387,150	278,445,131	0	4,878,832,281	334,955,189
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	37	112,881,500	95,538,760	9,806,870	0	105,345,630	7,535,870
30303	ALAT UKUR	8	104,894,050	10,750,370	10,038,180	0	20,788,550	84,105,500
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	49,107,300	196,276,850	1,008,700	(150,700,000)	46,585,550	2,521,750
30501	ALAT KANTOR	10,177	83,196,238,496	77,419,620,512	2,991,556,252	(1,601,925,527)	78,809,251,237	4,386,987,259
30502	ALAT RUMAH TANGGA	37,199	136,040,061,998	121,245,267,825	5,443,230,324	(2,663,045,557)	124,025,452,592	12,014,609,406
30601	ALAT STUDIO	995	26,741,878,810	21,963,722,445	2,097,189,617	(1,094,294,536)	22,966,617,526	3,775,261,284
30602	ALAT KOMUNIKASI	674	5,145,734,979	4,730,491,385	199,870,144	(101,894,340)	4,828,467,189	317,267,790
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	684,593,370	144,026,390	0	828,619,760	611,562,033
30701	ALAT KEDOKTERAN	345	941,152,347	605,746,663	91,791,037	(19,566,500)	677,971,200	263,181,147
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	9	92,304,625	14,782,875	16,854,925	0	31,637,800	60,666,825
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	80	5,854,212,994	4,779,511,712	362,343,942	(24,375,000)	5,117,480,654	736,732,340
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	620,550	1,241,100	0	1,861,650	16,754,850
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	17	87,670,000	1,763,930	7,562,499	0	9,326,429	78,343,571
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	7,523	92,239,594,291	73,549,880,439	8,089,726,697	(3,161,989,249)	78,477,617,887	13,761,976,404
31002	PERALATAN KOMPUTER	5,506	174,729,601,108	125,313,219,021	18,783,681,527	(633,812,087)	143,463,088,461	31,266,512,647
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	547,462,376	1,081,504,750	0	1,628,967,126	540,752,374
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	78,859,000	0	7,885,900	0	7,885,900	70,973,100
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8	54,978,600	448,401,610	6,466,075	(428,409,197)	26,458,488	28,520,112
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	24	140,065,000	136,235,711	2,552,867	0	138,788,578	1,276,422
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54,758,000	54,758,000	0	0	54,758,000	0
133111	Gedung dan Bangunan	474	841,376,833,975	86,233,191,460	25,920,957,437	207,962,495	112,362,111,392	729,014,722,583
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	158	730,689,049,745	75,894,381,064	22,627,628,538	(19,809,455)	98,502,200,147	632,186,849,598
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	290	97,155,986,864	9,382,799,460	2,879,439,848	227,771,950	12,490,011,258	84,665,975,606
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	45,569,000	3,004,548	1,001,516	0	4,006,064	41,562,936
40401	TUGU/TANDA BATAS	25	13,486,228,366	953,006,388	412,887,535	0	1,365,893,923	12,120,334,443

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:06 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
134111	Jalan dan Jembatan	61,982	16,124,321,000	13,720,743,348	796,290,595	0	14,517,033,943	1,607,287,057
50101	JALAN	61,972	16,122,161,000	13,720,549,504	796,235,211	0	14,516,784,715	1,605,376,285
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	193,844	55,384	0	249,228	1,910,772
134112	Irigasi	27	2,764,941,783	456,651,725	104,137,050	0	560,788,775	2,204,153,008
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	15,860,947	5,587,530	0	21,448,477	235,628,123
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	13,526,394	3,864,684	0	17,391,078	141,628,922
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1	16,428,500	4,928,550	1,642,850	0	6,571,400	9,857,100
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,541,794,683	328,106,165	66,119,223	0	394,225,388	1,147,569,295
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	53,664,366	15,332,676	0	68,997,042	371,716,958
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	40,565,303	11,590,087	0	52,155,390	297,752,610
134113	Jaringan	32	5,069,578,277	1,998,359,149	96,577,973	0	2,094,937,122	2,974,641,155
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	169,986,912	11,185,751	0	181,172,663	154,399,837
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	1,585,471,240	135,441,850	27,973,072	0	163,414,922	1,422,056,318
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	951,173,820	0	0	951,173,820	0
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	50,189,667	3,461,357	0	53,651,024	50,189,676
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	655,199,226	50,718,211	0	705,917,437	1,322,810,930
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	36,367,674	3,239,582	0	39,607,256	25,184,394
135111	Aset Tetap Renovasi	29	17,738,647,198	5,084,486,309	307,980,794	(3,574,084,394)	1,818,382,709	15,920,264,489
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	2,998,875	0	(2,998,875)	0	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	25	17,475,744,298	4,941,045,714	307,980,794	(3,520,315,799)	1,728,710,709	15,747,033,589
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	140,441,720	0	(50,769,720)	89,672,000	169,232,400
135121	Aset Tetap Lainnya	25	46,080,000	29,800,000	0	0	29,800,000	16,280,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	46,080,000	29,800,000	0	0	29,800,000	16,280,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,426	9,608,045,572	8,626,098,730	32,412,033	716,682,040	9,375,192,803	232,852,769
30103	ALAT BANTU	8	853,351,025	0	9,690,789	794,706,298	804,397,087	48,953,938
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	414,560,000	961,200,000	0	(546,640,000)	414,560,000	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	7,680,000	0	(7,680,000)	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	150,700,000	0	0	150,700,000	150,700,000	0
30501	ALAT KANTOR	265	790,662,129	340,285,981	0	450,376,148	790,662,129	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	708	1,882,774,160	1,162,534,141	7,428,400	702,499,119	1,872,461,660	10,312,500
30601	ALAT STUDIO	32	982,222,597	715,850,847	1,428,310	264,065,131	981,344,288	878,309
30602	ALAT KOMUNIKASI	34	532,383,680	475,810,500	799,560	53,962,340	530,572,400	1,811,280
30701	ALAT KEDOKTERAN	5	18,604,000	2,050,000	0	16,554,000	18,604,000	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	28	460,560,894	436,185,894	0	24,375,000	460,560,894	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:06 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_k3_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	223	2,389,414,678	2,731,746,373	6,859,250	(353,781,445)	2,384,824,178	4,590,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	109	938,580,409	1,764,384,960	0	(825,804,551)	938,580,409	0
31503	ALAT SAR	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	6,650,000	0	(6,650,000)	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	192,232,000	21,720,034	6,205,724	0	27,925,758	164,306,242
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	2	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
JUMLAH		127,198	1,500,138,277,0	603,530,850,823	72,387,018,915	(16,447,108,093)	659,470,761,645	840,667,515,400

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:06 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	5,419	1,732,156,189	692	367,746,394	57	8,740,010	6,054	2,091,162,573
30103	ALAT BANTU	5	4,032,000	0	0	0	0	5	4,032,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	3,024,920	0	0	0	0	4	3,024,920
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	3,173,800	1	446,000	0	0	6	3,619,800
30303	ALAT UKUR	5	1,540,000	0	0	0	0	5	1,540,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	136	35,604,600	8	4,944,000	0	0	144	40,548,600
30502	ALAT RUMAH TANGGA	3,762	1,421,501,269	586	315,414,960	37	7,521,360	4,311	1,729,394,869
30601	ALAT STUDIO	36	29,393,500	12	10,085,300	1	700,000	47	38,778,800
30602	ALAT KOMUNIKASI	303	76,921,320	6	1,811,159	0	0	309	78,732,479
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	202	16,028,080	2	1,038,400	19	518,650	185	16,547,830
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	0	0	0	0	5	1,973,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	5,194,000	0	0	0	0	8	5,194,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	0	0	0	0	30	825,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	916	120,044,300	77	34,006,575	0	0	993	154,050,875
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	12,900,000	0	0	0	0	2	12,900,000
133111	Gedung dan Bangunan	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	0	0	0	0	4	5,850,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	75	19,574,775	20	1,218,650	94	20,093,425	1	700,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	75	19,574,775	0	0	75	19,574,775	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	1	700,000	0	0	1	700,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	19	518,650	19	518,650	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,757,580,964		368,965,044		28,833,435		2,097,712,573

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPOTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 27/04/22 4:00 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_k3_kl

UAKPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	6,054	2,091,162,573	1,091,212,848	277,917,641	15,550,710	1,384,681,199	706,481,374
30103	ALAT BANTU	5	4,032,000	1,389,500	576,000	0	1,965,500	2,066,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	3,024,920	2,536,950	487,970	0	3,024,920	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6	3,619,800	2,039,580	634,260	0	2,673,840	945,960
30303	ALAT UKUR	5	1,540,000	154,000	308,000	0	462,000	1,078,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	144	40,548,600	31,108,250	2,791,100	0	33,899,350	6,649,250
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,311	1,729,394,869	875,442,188	234,457,698	16,489,360	1,126,389,246	603,005,623
30601	ALAT STUDIO	47	38,778,800	5,226,300	7,124,230	(420,000)	11,930,530	26,848,270
30602	ALAT KOMUNIKASI	309	78,732,479	64,853,388	3,826,706	0	68,680,094	10,052,385
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	185	16,547,830	11,296,302	1,792,378	(518,650)	12,570,030	3,977,800
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	5	1,973,400	1,049,400	369,600	0	1,419,000	554,400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	5,194,000	939,126	618,000	0	1,557,126	3,636,874
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	825,000	0	0	825,000	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	993	154,050,875	81,452,864	24,931,699	0	106,384,563	47,666,312
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	12,900,000	12,900,000	0	0	12,900,000	0
133111	Gedung dan Bangunan	4	5,850,000	796,500	117,000	0	913,500	4,936,500
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	4	5,850,000	796,500	117,000	0	913,500	4,936,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1	700,000	19,574,775	70,000	(19,154,775)	490,000	210,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	19,574,775	0	(19,574,775)	0	0
30601	ALAT STUDIO	1	700,000	0	70,000	420,000	490,000	210,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	6,059	2,097,712,573	1,111,584,123	278,104,641	(3,604,065)	1,386,084,699	711,627,874

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:07 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	499,843	2,302,109,905,449	72,862	7,863,728,506	4,237	537,653,768	568,468	2,309,435,980,187
20101	TANAH PERSIL	499,843	2,302,109,905,449	72,862	7,863,728,506	4,237	537,653,768	568,468	2,309,435,980,187
20102	TANAH NON PERSIL	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	LAPANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	68,307	570,172,704,282	3,119	58,057,137,267	2,169	18,728,849,736	69,257	609,500,991,813
30103	ALAT BANTU	171	33,431,417,106	47	5,134,776,660	9	949,073,525	209	37,617,120,241
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	220	38,002,375,200	4	626,727,988	20	3,506,088,300	204	35,123,014,888
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	88	156,475,170	9	16,956,500	2	2,979,000	95	170,452,670
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	18	5,012,660,335	1	201,127,135	0	0	19	5,213,787,470
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	40	112,800,400	3	3,700,900	0	0	43	116,501,300
30303	ALAT UKUR	11	13,089,050	2	93,345,000	0	0	13	106,434,050
30401	ALAT PENGOLAHAN	7	199,807,300	0	0	1	150,700,000	6	49,107,300
30501	ALAT KANTOR	10,477	83,480,901,673	206	1,377,531,950	362	1,621,646,527	10,321	83,236,787,096
30502	ALAT RUMAH TANGGA	41,088	134,122,933,852	1,480	6,392,228,651	1,058	2,745,705,636	41,510	137,769,456,867
30601	ALAT STUDIO	984	25,564,843,720	105	2,339,425,045	47	1,123,611,155	1,042	26,780,657,610
30602	ALAT KOMUNIKASI	1,012	5,239,760,863	27	94,664,475	56	109,957,880	983	5,224,467,458
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	1,440,181,793	0	0	0	0	12	1,440,181,793
30701	ALAT KEDOKTERAN	543	825,624,170	13	152,161,157	26	20,085,150	530	957,700,177
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	13	22,881,150	1	71,396,875	0	0	14	94,278,025
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	105	5,694,334,494	8	189,447,500	25	24,375,000	88	5,859,406,994
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	18,616,500	0	0	0	0	1	18,616,500
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	5	18,205,000	12	69,465,000	0	0	17	87,670,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	30	825,000	0	0	0	0	30	825,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	7,159	86,487,723,689	710	9,508,537,281	346	3,756,666,679	7,523	92,239,594,291
31002	PERALATAN KOMPUTER	6,225	147,437,856,907	490	31,706,786,150	216	4,260,991,074	6,499	174,883,651,983
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	57	2,169,719,500	0	0	0	0	57	2,169,719,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	1	78,859,000	0	0	1	78,859,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	9	511,948,410	0	0	1	456,969,810	8	54,978,600
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	26	152,965,000	0	0	0	0	26	152,965,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	6	54,758,000	0	0	0	0	6	54,758,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:07 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133111	Gedung dan Bangunan	464	833,851,736,323	20	8,938,018,392	6	1,407,070,740	478	841,382,683,975
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	150	724,064,184,493	8	6,754,025,252	0	129,160,000	158	730,689,049,745
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	286	97,155,986,864	10	1,277,910,740	6	1,277,910,740	290	97,155,986,864
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	51,419,000	0	0	0	0	5	51,419,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	23	12,580,145,966	2	906,082,400	0	0	25	13,486,228,366
134111	Jalan dan Jembatan	53,426	16,124,321,000	8,556	0	0	0	61,982	16,124,321,000
50101	JALAN	53,416	16,122,161,000	8,556	0	0	0	61,972	16,122,161,000
50102	JEMBATAN	10	2,160,000	0	0	0	0	10	2,160,000
134112	Irigasi	27	2,764,941,783	0	0	0	0	27	2,764,941,783
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	2	257,076,600	0	0	0	0	2	257,076,600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	2	159,020,000	0	0	0	0	2	159,020,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	1	16,428,500	0	0	0	0	1	16,428,500
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	11	1,541,794,683	0	0	0	0	11	1,541,794,683
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	440,714,000	0	0	0	0	4	440,714,000
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	7	349,908,000	0	0	0	0	7	349,908,000
134113	Jaringan	31	4,097,349,037	1	972,229,240	0	0	32	5,069,578,277
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	335,572,500	0	0	0	0	2	335,572,500
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	613,242,000	1	972,229,240	0	0	4	1,585,471,240
50310	INSTALASI LAIN	7	951,173,820	0	0	0	0	7	951,173,820
50401	JARINGAN AIR MINUM	1	103,840,700	0	0	0	0	1	103,840,700
50402	JARINGAN LISTRIK	16	2,028,728,367	0	0	0	0	16	2,028,728,367
50403	JARINGAN TELEPON	2	64,791,650	0	0	0	0	2	64,791,650
135111	Aset Tetap Renovasi	28	11,837,310,298	25	15,828,414,120	24	9,927,077,220	29	17,738,647,198
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	1	3,998,500	1	3,998,500	1	3,998,500	1	3,998,500
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	24	11,574,407,398	22	15,655,183,220	21	9,753,846,320	25	17,475,744,298
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	3	258,904,400	2	169,232,400	2	169,232,400	3	258,904,400
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	11,963	1,787,852,595	27	21,030,000	31	13,069,700	11,959	1,795,812,895
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	11,725	971,547,595	0	0	5	269,700	11,720	971,277,895
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	210	674,205,000	1	2,750,000	0	0	211	676,955,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	25	40,600,000	26	18,280,000	26	12,800,000	25	46,080,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	80,000,000	0	0	0	0	2	80,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,112	8,828,430,246	1,971	14,780,200,671	1,651	13,999,615,645	1,432	9,609,015,272
30103	ALAT BANTU	0	0	9	949,073,525	1	95,722,500	8	853,351,025

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:07 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	961,200,000	20	3,506,088,300	21	4,052,728,300	7	414,560,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	6	7,680,000	2	2,979,000	8	10,659,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	1	150,700,000	0	0	1	150,700,000
30501	ALAT KANTOR	90	340,285,981	359	1,601,667,777	184	1,151,291,629	265	790,662,129
30502	ALAT RUMAH TANGGA	576	1,186,898,816	1,006	2,682,609,276	874	1,986,733,932	708	1,882,774,160
30601	ALAT STUDIO	15	715,850,847	45	1,106,511,155	27	839,439,405	33	982,922,597
30602	ALAT KOMUNIKASI	9	475,810,500	56	109,957,880	31	53,384,700	34	532,383,680
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	2,050,000	26	20,085,150	23	3,531,150	5	18,604,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	436,185,894	25	24,375,000	0	0	28	460,560,894
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	216	2,739,201,248	286	3,150,947,099	279	3,500,733,669	223	2,389,414,678
31002	PERALATAN KOMPUTER	176	1,764,384,960	126	1,013,966,999	193	1,839,771,550	109	938,580,409
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	ALAT SAR	0	0	0	0	0	0	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	6,650,000	1	456,969,810	8	463,619,810	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	0	0	0	0	0	0	0	0
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4	192,232,000	0	0	0	0	4	192,232,000
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	5	269,700	0	0	5	269,700
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	4	4,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000
TOTAL			3,751,574,551,013		106,460,758,196		44,613,336,809		3,813,421,972,400

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:07 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_kdp_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S/D 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2021	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	224,384,887	18,729,624,757	17,483,321,382	1,470,688,262	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	98,230,000	4,986,860,000	5,085,090,000	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	8,044,903,675	8,002,468,700	42,434,975	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	126,154,887	2,380,202,213	1,078,103,813	1,428,253,287	
7010101004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	0	2,515,003,869	2,515,003,869	0	
7010101007	Jaringan Dalam Pengerjaan	0	802,655,000	802,655,000	0	
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	767,000,000	767,000,000	0	
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	0	767,000,000	767,000,000	0	
TOTAL		224,384,887	19,496,624,757	18,250,321,382	1,470,688,262	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:07 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2021	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162121	Hak Cipta	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
162151	Software	305	149,913,158,345	16	117,820,291,048	41	125,574,806,948	280	142,158,642,445
80101	ASET TAK BERWUJUD	305	149,913,158,345	16	117,820,291,048	41	125,574,806,948	280	142,158,642,445
162161	Lisensi	1	39,658,850	0	0	0	0	1	39,658,850
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	39,658,850	0	0	0	0	1	39,658,850
162171	Hasil Kajian/Penelitian	1	195,000,000	0	0	0	0	1	195,000,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	195,000,000	0	0	0	0	1	195,000,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	34	37,089,917,164	25	29,275,806,764	9	19,015,343,564	50	47,350,380,364
80101	ASET TAK BERWUJUD	34	37,089,917,164	25	29,275,806,764	9	19,015,343,564	50	47,350,380,364
TOTAL				187,238,234,359		144,590,150,512		147,096,097,812	189,744,181,659

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:08 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2021						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162121	Hak Cipta	1	500,000	42,853	7,142	0	49,995	450,005
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	500,000	42,853	7,142	0	49,995	450,005
162151	Software	280	142,158,642,445	142,652,737,064	5,702,272,567	(11,324,950,407)	137,030,059,224	5,128,583,221
80101	ASET TAK BERWUJUD	280	142,158,642,445	142,652,737,064	5,702,272,567	(11,324,950,407)	137,030,059,224	5,128,583,221
162161	Lisensi	1	39,658,850	33,710,023	3,965,885	0	37,675,908	1,982,942
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	39,658,850	33,710,023	3,965,885	0	37,675,908	1,982,942
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	49	47,160,180,364	36,022,497,065	405,894,975	10,260,463,200	46,688,855,240	471,325,124
80101	ASET TAK BERWUJUD	49	47,160,180,364	36,022,497,065	405,894,975	10,260,463,200	46,688,855,240	471,325,124
JUMLAH		331	189,358,981,659	178,708,987,005	6,112,140,569	(1,064,487,207)	183,756,640,367	5,602,341,292

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
 BARANG BERSEJARAH
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:09 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2021	SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2021
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
(BPYBDS)
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:09 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_bpybds_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	3					4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAPORAN BARANG HILANG
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Tanggal : 27/04/22 3:11 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbh_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132111	Peralatan dan Mesin		3	40,500,000	1	13,500,000	0	0	0	0	1	13,500,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		3	40,500,000	1	13,500,000	0	0	0	0	1	13,500,000
31001	KOMPUTER UNIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				40,500,000		13,500,000		0		0		13,500,000

**LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:11 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbrb_k3_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2021		SALDO PER 1 JANUARI 2021 (KOREKSI)		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2021	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132111	Peralatan dan Mesin		(55)	4,199,021,038	6	232,975,000	0	0	0	0	6	232,975,000
30103	ALAT BANTU		0	4,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		1	872,450,000	1	228,000,000	0	0	0	0	1	228,000,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN		0	8,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR		(13)	400,615,100	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA		(7)	526,136,800	5	4,975,000	0	0	0	0	5	4,975,000
30601	ALAT STUDIO		(7)	374,071,200	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI		0	39,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN		0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM		(1)	95,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT		(18)	1,298,951,760	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER		(10)	575,933,178	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				4,199,021,038		232,975,000		0		0		232,975,000

LAMPIRAN IX

Laporan Persediaan

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 27/04/22 3:12 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_persediaan_kl_kel

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	8,875,443,165
Jumlah Barang Konsumsi		8,875,443,165
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	447,108,850
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		447,108,850
117114	Suku Cadang	
10102	SUKU CADANG	8,099,700
Jumlah Suku Cadang		8,099,700
117131	Bahan Baku	
10101	BAHAN	30,592,643
Jumlah Bahan Baku		30,592,643
117199	Persediaan Lainnya	
10104	OBAT-OBATAN	796,250,806
10201	KOMPONEN	1,737,600
Jumlah Persediaan Lainnya		797,988,406
Jumlah		10,159,232,764

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:11 AM

Halaman : 1

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	275,968,786
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	15,227,329
1010301003	Penjepit Kertas	207,645,738
1010301004	Penghapus/Korektor	24,994,413
1010301005	Buku Tulis	61,344,950
1010301006	Ordner Dan Map	344,668,708
1010301007	Penggaris	10,799,019
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	19,440,007
1010301009	Pita Mesin Ketik	24,879,180
1010301010	Alat Perekat	82,558,070
1010301011	Stadler HD	1,005,140
1010301012	Staples	152,285
1010301013	Isi Staples	882,910
1010301014	Barang Cetak	211,805,974
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,339,415,650
1010302001	Kertas HVS	573,466,243
1010302002	Berbagai Kertas	150,101,063
1010302003	Kertas Cover	22,122,730
1010302004	Amplop	476,787,494
1010302005	Kop Surat	5,726,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	337,736,740
1010303001	Transparant Sheet	535,000
1010303002	Tinta Cetak	15,782,000
1010303003	Plat Cetak	125,000
1010303004	Stensil Sheet	2,888,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	1,052,532,830
1010304001	Continuous Form	6,114,800
1010304002	Computer File/Tempat Disket	77,000
1010304003	Pita Printer	12,519,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,954,687,508
1010304005	Disket	1,569,700
1010304006	USB/Flash Disk	71,319,365
1010304010	Mouse	96,000
1010304011	CD/DVD	21,666,700
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	52,877,988
1010306001	Kabel Listrik	23,876,344
1010306002	Lampu Listrik	74,248,400
1010306003	Stop Kontak	9,152,100
1010306004	Saklar	8,321,180
1010306005	Stacker	1,635,400
1010306006	Balast	4,455,000
1010306007	Starter	2,886,900
1010306008	Vitting	1,115,000
1010306010	Batu Baterai	48,770,729
1010306999	Alat Listrik Lainnya	29,797,555

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Tanggal : 27/04/22 3:11 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_persediaan_kl

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kode	Uraian	Jumlah
1010307007	Perlengkapan Lapangan	181,500
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	798,600
1010309001	Meterai	1,850,000
1010309003	Stempel	14,740
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	117,220,880
1010310001	Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran	1,232,030
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	200,000
1010312999	Alat/Bahan Penunjang Kegiatan Keamanan Lainnya	495,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	1,433,700
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	75,894,396
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	54,500
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	41,428,450
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50,861,441
Jumlah Barang Konsumsi		8,875,443,165
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	18,296,700
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	33,938,890
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	8,188,830
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	16,328,810
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	33,485,200
1010305006	Alat Pengikat	14,179,700
1010305007	Peralatan Ledeng	6,506,500
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	120,994,149
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	481,000
1010305012	Pengharum Ruangan	21,961,165
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	172,747,906
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		447,108,850
117114	Suku Cadang	
1010201001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor	2,316,000
1010203001	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum	2,574,000
1010204058	Suku Cadang Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	1,238,000
1010206001	Suku Cadang Alat Studio	1,749,000
1010206002	Suku Cadang Alat Komunikasi	182,700
1010299999	Suku Cadang Lainnya	40,000
Jumlah Suku Cadang		8,099,700
117131	Bahan Baku	
1010101003	Kaca	55,500
1010102001	Bahan Kimia Padat	1,277,500
1010102002	Bahan Kimia Cair	3,667,113
1010102999	Bahan Kimia Lainnya	3,234,880
1010104001	Bahan Bakar Minyak (Bahan Baku)	19,674,900
1010105001	Kawat	2,592,000
1010199999	Bahan Lainnya	90,750
Jumlah Bahan Baku		30,592,643
117199	Persediaan Lainnya	

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

UAPB : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Tanggal : 27/04/22 3:11 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	153,884,259
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	458,769,468
1010401003	Obat Gas(Persediaan Lainnya)	6,555,300
1010401004	Obat Serbuk/Tepung(Persediaan Lainnya)	698,732
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	17,480,111
1010401006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	503,100
1010401999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	158,359,836
1020103999	Komponen Peralatan Lainnya	1,737,600
	Jumlah Persediaan Lainnya	797,988,406
	TOTAL	10,159,232,764

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 119,884,760 dalam kondisi usang.

LAMPIRAN X

**Monitoring Tindak Lanjut Terhadap
Temuan Pemeriksaan BPK**

**Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Atas Temuan Pemeriksaan Di Badan Kepegawaian Negara**

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanjnt	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
1	2015	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014	Aset Tetap Tanah atas Bangunan Rumah Negara Golongan III Tidak Tercatat dalam Neraca BKN Tahun 2014	BPK merekomendasikan Kepala BKN agar Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Aset Tetap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Negara Golongan III dengan bukti sertifikat atas nama BKN dan belum terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum dan melakukan koreksi pencatatan berdasarkan hasil IP oleh DJKN. (Biro Umum)	2/1/2016 12:00:00 AM - Surat Kementerian Keuangan No.S-2708/AG/2015 tanggal 17 November 2015 [2016-0106 17:16:42] Semester I 2021: 1. Sertipikat Rumah an. EN. 2. Sertipikat Rumah an. S 3. Sertipikat Yulianus Tandi	Belum Sesuai	BKN belum melampirkan dokumen koordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Aset Tetap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Negara Golongan III dengan bukti sertifikat atas nama BKN dan belum terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum. PTL Sem II Tahun 2020 : Terdapat satu dari 11 bukti pelunasan dan sertifikat telah atas nama pihak penyewa-beli atas rumah dinas yaitu atas nama Yulianu Tandi dengan nomor rumah negara 04-39B. Tetap Tanah yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Negara Golongan III dengan bukti sertifikat atas nama BKN dan belum terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum.	1. Meminta sisa dokumen bukti sertifikat hak milik atas nama pembeli sebanyak 8 dokumen. 2. Melakukan penilaian kembali.
2	2015	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2014	Pengelolaan Rumah Negara pada Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru Belum Sesuai Ketentuan Pengelolaan Rumah Negara pada Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru Belum Sesuai Ketentuan.	b. Menginstruksikan Kepala Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg XII BKN Pekanbaru untuk mendaftarkan Rumah Negara dan mess sebagai objek PBB ke Dinas Pendapatan Provinsi dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan perhitungan PNPB atas pemanfaatan Rumah Negara setelah diterbitkan SPPT PBB. (Kanreg V Jakarta, Kanreg XII Pekanbaru)	2/1/2016 12:00:00 AM - 1) Surat Perintah Kepala BKN Kepada Kepala Kanreg V BKN Jakarta, dan Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru Nomor K 26-30/V 67-1/99 Tanggal 29 Juni 2015 untuk mendaftarkan Rumah Negara dan mess sebagai objek PBB ke Dinas Pendapatan Provinsi dan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan perhitungan PNPB atas pemanfaatan Rumah Negara setelah diterbitkan SPPT PBB. 2) Bukti pendaftaran Rumah Negara di Kanreg XII Pekanbaru Semester I Tahun 2021: Kanreg V DKI menyampaikan Surat Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan Ketetapan PBB atas Rumah Negara dengan NOP 31.72.011.002.002.0 seluas 90m. - Terlampir Keputusan Kepala Kanreg V tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara. Semester II 2021 Pada Folder "Lampiran Pendukung", Kanreg XII Pekanbaru melampirkan: 1. SPPT PBB; 2. SK Tarif Sewa; 3. Surat Ijin Penghunian. Semester I 2022 Terlampir: 1. Surat Ket. Bappeda bahwa Objek Pajak (mess) tidak dikenakan PBB. 2. Surat Keterangan Direktur BMN Kemenkeu tentang kriteria Mess/ Asrama yang tidak termasuk Rumah Negara.	Belum Sesuai	Belum dilindaklanjuti karena belum diterbitkan SPPT PBB. [Semester I 2021] Kanreg V DKI menyampaikan SPPT PBB Rumah Dinas seluas 90m ² . Dan Keputusan Kakanreg V tentang penunjukan penghunian Rumah Negara. [Semester II 2021] Masih perlu dilakukan pemantauan tindak lanjut karena belum ada keketetapan tarif PNPB pada mess kanreg XII BKN Pekanbaru	Meminta Ke Kanreg Pekanbaru: - Surat Keterangan Kakanreg Pekanbaru bahwa kondisi pemanfaatan mess/ asrama di kanreg jika mengacu ke surat Direktur BMN tidak termasuk RN dan kondisi tidak dihuni PNS beserta keluarganya sehingga tidak dikenakan PNPB.

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanjnt	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
3	2016	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015	Kelebihan Pembayaran 11 Paket Pekerjaan pada Kantor Pusat BKN dan Kanreg IX BKN Jayapura Sebesar Rp422,56 Juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp151.987.219,47 dari pihak penyedia untuk disetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor kepada BPK. (Biro Umum, Pusbang). Sisa Rp50.535.639 11.413.160 R.Humas 5.740.685 Partisi Lt.10 3.465.435 R.Kerja Katasi 29.916.359,47 Rmh Jabatan & Guest House Pusbang	6/24/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 27/II/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Kepala Biro Umum untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 151.987.219,47 [2016-06-24 12:29:03] Per Semester I 2019 : Telah di setor Rp89.335.080 NTPN 65A6C11L4GP15R08 tanggal 28 Januari 2019 terkait kurang volume pekerjaan sarana dan prasarana gedung pusbang ASN tahun 2015 12/31/2019 12:00:00 AM - Telah disetor RP.9.250.000 NTPN E8B015TC0JURQ652 tgl 22 Januari 2019 CV. Samudra Jaya Semester I 2020 Surat Peringatan dari PPK Biro Umum BKN untuk menyertorkan ke kas negara kepada penyedia, dengan rincian: 1. Surat Peringatan Nomor 226/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk CV. Dwi Cemerlang (UP Bapak Anto) sebesar 11.413.160 2. Surat Peringatan Nomor 229/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk CV. Dwi Cemerlang (UP Bapak Anto) sebesar 3.465.435 3. Surat Peringatan Nomor 227/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk PT Gumba Sondang Primatama (UP Bapak Suyoto) sebesar 29.916.359,47 4. Surat Peringatan Nomor 228/ROUM/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 untuk CV GM (UP Bapak Anto) sebesar 5.740.685 12/9/2016 12:00:00 AM - Telah di setor Rp. 2.866.500, NTPN 75E875DHL1R6H41P tanggal 11 Okt 2016 Semester I 2021 Telah disetor Total Rp25.454.492 ke Kas Negara dgn rinci sbb : 1. NTPN B390E6U8E2A0MIAR Rp11.413.160 CV Dwi Cemerlang tgl 18-02-2021 10:20:27; 2. NTPN 241D21JNF2RM8JNV Rp5.740.685 CV Galvin Mitra Tama tgl 18-02-2021 10:20:45; 3. NTPN 4EDBE2G4UTE2LIQK Rp3.465.435 CV Dwi Cemerlang tgl 18-02-2021 10:20:12; 4. NTPN F7FF71JNF2V1CHHH Rp4.835.212 PT. Gumbang Sondang Primatama tgl 30-03-2021 09:36:13. Semester I 2022 Terlampir: - NTPN 209B28N3DOCQLBGJ Rp10.000.000 Tgl 28-12-2021 An. PT. GSP - NTPN 202D92G4V6KPD7AE Rp15.081.150 Tgl 06-01-2022 an PT GSP	Pengajuan Sesuai	[Semester I 2021] Telah disetor Total Rp25.454.492 Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, masih kurang setor Rp25.081.147,47 (Pusbang). [Semester I 2022] - Tambahan Setor Rp10.000.000,- - Tambahan Setor Rp15.081.150,- Pengajuan Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.	Pengajuan telah sesuai ke BPK Semester I 2022

No	Tahun LHPS	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindakanjnt	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
4	2016	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) dan Tenaga Keamanan (Satpam) pada Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg XI BKN Manado, Kantor Pusat BKN, dan Pusbang ASN BKN Sebesar Rp246,44 Juta	BPK merekomendasikan Kepala BKN untuk menarik kelebihan pembayaran untuk disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK atas Kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,00 dari PT TU. (Kanreg IX Jayapura)	6/23/2016 12:00:00 AM - Surat perintah Kepala BKN No 39/I/Ka/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 dari Kepala BKN ke Kakanreg IX BKN Jayapura untuk menarik kelebihan pembayaran RP 49.548.000,00 1/28/2019 12:00:00 AM - Per Semester I 2018: Surat Kepala Kantor Regional IX Jayapura kepada Direktur Tosari dengan surat No. 196/KR.IX/IX/2017 tanggal 1 September 2017 perihal Surat Tagihan Pembayaran atas kelebihan pembayaran pengadaan Satpam. Semester I 2020: 1. Surat Inspektur 47.A/S/INSP/VI/2020 tanggal 18 Mei 2020 untuk menindaklanjuti pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,- dari PT TU." 2. Surat Dari Kakanreg Jayapura Kepada PT Tosari Nomor 111/KR.IX/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk menindaklanjuti segera kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,- Semester 1 Tahun 2021 Surat Kepala No. 6229/S-AI.08/SD/K/2021 tanggal 21 Juli 2021 agar menindaklanjuti segera dan menarik kelebihan pembayaran pengadaan satpam Kanreg XI BKN Jayapura sebesar Rp49.548.000,- dari PT TU..	Belum Sesuai	Belum terdapat penyeteroran	Sedang konfirmasi Rencana Aksi dari Kanreg Jayapura
5	2021	Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020	Anggaran Belanja Barang Sebesar Rp234.277.012 Direalisasikan untuk Pengeluaran yang Menghasilkan aset Tetap.	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Pusat BKN dan Kanreg III BKN Bandung untuk memerintahkan PPK pada masing-masing satuan kerja agar lebih cermat dalam merealisasikan Belanja Barang sesuai dengan klasifikasi anggaran.	Semester II 2021: - Telah disetor Rp15juta dengan NTPN D440D0N9V8R64711 tgl 16-08-2021 SEMESTER I 2022 - Telah disetor Rp45juta dengan NTPN DB1090N9VHFUCDGE tgl 03-01-2022 - Telah disetor Rp50juta dengan NTPN 1D8C061QUGUD3MN4 Tgl 07-01-2022	Belum Sesuai	Sisa semester I 2021 Rp.135.970.369,- Semester II 2022 Rp.135.970.369 - Rp.45.000.000 - Rp.50.000.000 = Sisa Kurang Setor Rp.40.970.369,-	PPK Kanreg III BKN Bandung akan menarik kelebihan pembayaran dari penyedia untuk disetorkan ke Kas Negara.
6	2022	PDTT Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2021	Penganggaran dan Pembayaran Honorarium PPNPN Kanreg IV BKN Makassar Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kantor Regional IV BKN Makassar agar memerintahkan PPK lebih cermat menyusun rencana kerja dan anggaran terkait pembayaran honor PPNPN dan melakukan kajian ulang terhadap kebutuhan PPNPN dengan posisi sekretaris sesuai dengan ketentuan.	Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 4/KU.02.02/2022	Pengajuan Sesuai	Semester I 2022 Rp.60.730.000-Rp.3.502.500-Rp.3.502.500-Rp.3.502.500-Rp.3.502.500-Rp.3.502.500-Rp.3.502.500-Rp.3.502.500-Rp.1.700.000-Rp.17.000.000-Rp.3.502.500 = Rp. 0,-	Pengajuan telah sesuai ke BPK Semester I 2022
7			Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Kanreg IV BKN Makassar Tidak Tertib	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan KPA Kantor Regional IV BKN Makassar agar memerintahkan Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran lebih cermat melaksanakan aturan perpajakan dalam realisasi belanja.	Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 4/KU.02.02/2022			
8			Kelebihan Pembayaran pada Empat Satuan Kerja Sebesar Rp145.534.192	BPK merekomendasikan Kepala BKN menginstruksikan: a. KPA Kanreg IV BKN Makassar memerintahkan PPK lebih cermat dalam memverifikasi dokumen pengajuan pembayaran jasa konsultansi.	Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 4/KU.02.02/2022			
9				b. KPA Kanreg XII Pekanbaru memerintahkan PPK lebih cermat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.	Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 5/KU.02.02/2022			
10				c. KPA Kanreg I BKN Yogyakarta memerintahkan PPK lebih cermat menetapkan HPS dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.	Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 2/KU.02.02/2022			

No	Tahun LHPs	Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi / Unit Kerja Dituju	Tindaklanjut	Status	Kesimpulan BPK	Rencana Aksi
11				d. KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi lebih cermat menyusun HPS, negosiasi honor tenaga ahli, verifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan menyetorkan kelebihan pembayaran biaya non personel ke Kas Negara sebesar Rp60.730.000 (Rp18.700.000 + Rp42.030.000).	<p>SEMESTER I 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN C6B6B1JNF3PMB2RH tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN CF2856U8E380P2UR tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN BD74D3CIEOUF52VB tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN 4538755DEE37V2VN tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN 0BC8B2G4UUC2O308 tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN 19F3B3CIEOUF5325 tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN AB8B12G4UUC2O32E tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN E70A96U8E380P32T tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN 39A656U8E380P337 tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN B42DF48VUJGR134M tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN DC6923CIEOUF534V tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.1.700.000 dengan NTPN 445121JNF3PMB37N tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.17.000.000 dengan NTPN 7811861QU8LKC3B0 tgl 24/12/2021, - Telah disetor Rp.3.502.500 dengan NTPN 60BBA55DEE3F9OBN tgl 04/01/2022, <p>Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 3/KU.02.02/2022</p>			
12				e. KPA Kantor Pusat BKN memerintahkan PPK Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban dan menyetorkan kelebihan pembayaran kegiatan Rakomas Kepegawaian BKN tahun 2021 ke Kas Negara sebesar Rp39.095.833 (Rp47.350.000 - Rp4.700.000 - Rp3.554.167).	<p>SEMESTER I 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah disetor Rp.3.554.167,- NTPN 051FE61QUGU9VPJK tgl 06 Januari 2022 <p>Semester 1 2022: 1. Surat Kepala BKN No. 3/KU.02.02/2022</p>	Belum Sesuai	Semester I 2022 Rp.39.095.833 - Rp.3.554.167 = Sisa Kurang Setor Rp.35.541.666,-	

Jakarta, 23 Februari 2022

Mengetahui,

Inspektur



Andi Anto, S.Sos, MH, M.AP
NIP. 19730910 199403 1 001

LAMPIRAN XI

Telaah Laporan Keuangan

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2021 (Audited)**

Kode BA dan Nama BA : (088) Badan Kepegawaian Negara

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	√		Ada
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	√		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		√	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√	Tidak

2	Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan)	N/A		Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-1815/PB/2019 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	N/A		Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ada/Tidak
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	√		Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	√		Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	√		Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	-		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	-		

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali BA.015.04</i> ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksanaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)	N/A		Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	N/A		Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A		Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			-
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			-
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	N/A		Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			

5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
---	---	--	---	-------

Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan Januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07

6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3.	Adakah beban bunga		√	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		√	Tidak
5.	Adakah beban hibah		√	Tidak
6.	Adakah beban transfer		√	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		√	Tidak

Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
----	--	---	--	------

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya

Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?	√		Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Dari kolom perbandingan antara 30 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	√		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak

- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	√		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?	√		Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK?	√		Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	√		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	√		
MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)			N/A
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)			N/A
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	√	
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Buku Minus? (diisi jumlah NUP)			-
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Buku Minus? (diisi nilai rupiahnya)			-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		

2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	√		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2019</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun Belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8.			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	N/A		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	√		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	√		Ya
<i>Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.</i>			
5. Apakah terdapat			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

- 1 Terdapat saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116) sebesar Rp8.884.240.150,00 yang berasal dari transaksi:
 - a. Saldo awal sebesar Rp126.576.800,00;
 - b. Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp13.619.171.829,00;
 - c. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp1.706.950.227,00;
 - d. Koreksi pencatatan sebesar (Rp469.508.441,00);
 - e. Hibah (Masuk) sebesar (Rp151.868.571,00);
 - f. Transaksi normalisasi BMN sebesar (Rp5.946.738.819,00); dan
 - g. Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/sebaliknya sebesar (Rp342.875,00).

Terdapat saldo Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi (391118) sebesar (Rp92.880.416,00) yang berasal dari transaksi:

- a. Transaksi normalisasi BMN (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp51.107.916,00); dan
- b. Transaksi normalisasi BMN sebesar (Rp41.772.500,00)

Adapun rincian transaksi koreksi nilai aset non revaluasi terdiri dari:

- a. Koreksi aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.884.240.150,00;
- b. Koreksi aset lainnya berupa *Software* dan Aset Lain-lain sebesar (Rp92.880.416,00).

- 2 Terdapat penjurnalan akun "Aset Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban yang terdiri dari:
 - a. Pencatatan Beban aset ekstrakomptabel sebesar Rp39.925.000,00 pada Kantor Regional X BKN Denpasar;
 - b. Pencatatan Beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp431.152.950,00; Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp20.570.000,00 pada Kantor Regional III BKN Bandung;
 - c. Pencatatan Beban aset ekstrakomptabel sebesar Rp103.712.400,00 pada Kantor Pusat BKN Jakarta;
 - d. Pencatatan Beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp13.385.350,00; Beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp65.738.000,00 pada Kantor Regional V BKN DKI Jakarta;
 - e. Pencatatan Beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp88.170.500,00 pada Pusbang Kepegawaian ASN.
- 3 Terdapat ketidaksesuaian dengan L-BMN berupa selisih nilai antara aplikasi e-rekon dan aplikasi SIMAK berupa:
 - a. Saldo awal (1 Januari 2021) atas akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp388.893.886,00 pada Kantor Regional X BKN Denpasar;
 - b. Saldo akhir (31 Desember 2021) atas suku cadang sebesar Rp33.798,00 dan persediaan lainnya sebesar (Rp33.798,00) pada Kantor Regional VI BKN Medan;
 - c. Saldo akhir (31 Desember 2021) atas barang konsumis sebesar Rp972.763,00, bahan untuk pemeliharaan sebesar (Rp971.740,00), dan persediaan lainnya sebesar Rp(1.023,00) pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
- 4 Terdapat jurnal tidak lazim yang terdiri dari:
 - a. Jurnal beban ekstrakomptabel peralatan dan mesin pada Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp103.712.400,00;
 - b. Jurnal pengesahan hibah langsung pada Kantor Pusat BKN Jakarta sebesar Rp223.500.000,00;
 - c. Jurnal kesalahan pembebanan akun pemeliharaan pada Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp195.949.600,00;
 - d. Jurnal kesalahan pembebanan akun pemeliharaan pada Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp198.289.000,00;
 - e. Jurnal kesalahan pembebanan akun pemeliharaan pada Kantor Regional III BKN Bandung sebesar Rp20.570.000,00;
 - f. Jurnal pengesahan hibah langsung pada Kantor Regional IV BKN Makassar sebesar Rp777.362.500,00;
 - g. Jurnal kesalahan pembebanan akun pemeliharaan pada Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp13.385.350,00;
 - h. Jurnal kesalahan pembebanan akun pemeliharaan pada Kantor Regional V BKN DKI Jakarta sebesar Rp65.738.000,00;
 - i. Jurnal pengesahan hibah langsung pada Kantor Regional VII BKN Palembang sebesar Rp1.009.712.238,00;
 - j. Jurnal beban ekstrakomptabel peralatan dan mesin pada Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp39.925.600,00;
 - k. Jurnal pencatatan atas hibah langsung pada Kantor Regional X BKN Denpasar sebesar Rp360.000.000,00;
 - l. Jurnal pengesahan hibah langsung pada Kantor Regional XI BKN Manado sebesar Rp1.436.109.000,00;
 - m. Jurnal pelunasan utang kepada pihak ketiga pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh sebesar Rp98.230.000,00;
 - n. Jurnal pengesahan hibah langsung pada Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh sebesar Rp4.986.860.000,00;
 - o. Jurnal pencatatan atas hibah langsung pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari sebesar Rp354.360.000,00;
 - p. Jurnal kesalahan pembebanan akun pemeliharaan pada Pusbang Kepegawaian ASN sebesar Rp88.170.500,00;

5 Atas analisis Laporan Keuangan Lainnya, berupa Realisasi Belanja Belanja 53 sebesar Rp65.657.252.407,00 pada LRA tidak sama dengan penjumlahan transaksi:

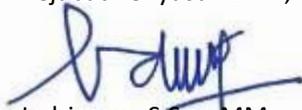
- a. Pembelian Aset Tetap sebesar Rp45.540.292.493,00;
 - b. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp599.167.375,00;
 - c. Pengembangan KDP sebesar Rp19.497.570.287,00;
 - d. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp5.984.343.957,00;
 - e. Penyelesaian Pembangunan KDP sebesar Rp12.663.348.477,00;
- Dengan total Transaksi Penambahan Aset sebesar Rp84.284.722.589,00.

Atas selisih tersebut sebesar Rp18.627.470.182,00 dijelaskan dengan transaksi sebagai berikut:

- a. Transaksi Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi sebesar Rp18.250.321.382,00;
- b. Kesalahan pembebanan akun belanja barang yang menambah nilai aset sebesar Rp619.016.800,00
- c. Pencatatan beban aset ekstrakomptabel peralatan mesin sebesar (Rp143.638.000,00);
- d. Pencatatan pembayaran utang kepada pihak ketiga atas utang tahun 2020 sebesar (Rp98.230.000,00);

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

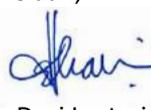


Indriasary, S.Sos, MM

NIP 19660917 199503 2 001

Jakarta, 27 April 2022

Penelaah,



Eka Desi Lestari

NIP 19881202 201012 2 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 1 JANUARI 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 27-04-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKG

NAMA UAKPB : 088.01.22.667882.000 KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	885,784,015
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	57,196,700
117114	Suku Cadang	0
117199	Persediaan Lainnya	21,782,909
131111	Tanah	166,256,748,000
132111	Peralatan dan Mesin	16,769,275,506
133111	Gedung dan Bangunan	30,567,530,257
134111	Jalan dan Jembatan	1,715,391,000
134112	Irigasi	346,791,000
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	432,104,317
135121	Aset Tetap Lainnya	13,631,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,018,349,200)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,258,576,909)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,519,346,314)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(33,927,278)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(388,893,886)
162151	Software	707,946,750
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	127,632,947
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(127,632,947)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(707,946,750)
J U M L A H		197,847,141,117

DENPASAR, 25 April 2022

Penanggung Jawab UAKPB

KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR


Drs. PAULUS DWI LAKSONO H., M.A.P
NIP. 196711101993031001

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
SALDO AWAL TAHUN 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan:
Tanggal : 09-05-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 088 **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
ESELON I : 01 **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
WILAYAH/PROPINSI : 2200 **BALI**
SATUAN KERJA : 667882 **KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117111	Barang Konsumsi	885,784,015	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	57,196,700	
0	117199	Persediaan Lainnya	21,782,909	
0	131111	Tanah	166,256,748,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	16,769,275,506	
0	133111	Gedung dan Bangunan	30,567,530,257	
0	134111	Jalan dan Jembatan	1,715,391,000	
0	134112	Irigasi	346,791,000	
0	135111	Aset Tetap Renovasi	432,104,317	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	13,631,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		15,018,349,200
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		2,258,576,909
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		1,519,346,314
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		33,927,278
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		388,893,886
0	162151	Software	707,946,750	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	127,632,947	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		127,632,947
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		707,946,750
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		1,085,973
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		34,458,328
0	391111	Ekuitas		197,811,596,816
		J U M L A H	217,901,814,401	217,901,814,401

UAPB : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UAPPB-KI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UAPPB-W : Kantor Regional VI BKN Medan

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN
KODE UAKPB : 088010700606261000KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	120,194,668
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,401,000
117114	Suku Cadang	2,574,000
117131	Bahan Baku	5,325,300
117199	Persediaan Lainnya	30,411,090
	Jumlah	165,906,058

Disetujui tanggal : 26 April 2022

Kuasa Pengguna Barang,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



WAN SETYO PRIHATIN
197708311997031001

MEDAN, 21 April 2022
Petugas Pengelola Persediaan,
OPERATOR PERSEDIAAN

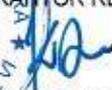
EDY TUA HAMONANGAN
197710062006041001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 28-04-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 088.01.07.606261.000 KANTOR REGIONAL VI BKN

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	120,194,668
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,401,000
117114	Suku Cadang	2,574,000
117131	Bahan Baku	5,325,300
117199	Persediaan Lainnya	30,411,090
131111	Tanah	164,724,060,000
132111	Peralatan dan Mesin	18,357,202,839
133111	Gedung dan Bangunan	35,737,604,025
134111	Jalan dan Jembatan	837,023,000
134112	Irigasi	963,111,600
134113	Jaringan	307,994,000
135121	Aset Tetap Lainnya	173,193,222
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17,308,538,637)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,259,847,785)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(683,415,815)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(156,930,454)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(104,090,131)
162151	Software	767,754,180
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	192,232,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(27,925,758)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(767,754,180)
J U M L A H		198,917,578,164

MEDAN, 26 April 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Kantor Regional VI BKN

Iwan Setyo Prihatin, S.H., M.A.P.
NIP.197708311997031001

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 27-04-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 068 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ESELON I : 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 606261 KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	117111	Barang Konsumsi	120,194,668	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,401,000	
0	117114	Suku Cadang	2,574,000	
0	117131	Bahan Baku	5,325,300	
0	117199	Persediaan Lainnya	30,411,090	
0	131111	Tanah	164,724,060,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	18,357,202,839	
0	133111	Gedung dan Bangunan	35,737,604,025	
0	134111	Jalan dan Jembatan	837,023,000	
0	134112	Irigasi	963,111,600	
0	134113	Jaringan	307,994,000	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	173,193,222	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		17,308,538,637
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		4,259,847,785
0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		683,415,815
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		156,930,454
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		104,090,131
0	162151	Software	767,754,180	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	192,232,000	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		27,925,758
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		767,754,180
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		1,731,307
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		61,375,906
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		16,070,515,700
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	25,907,004	
0	313221	Transfer Masuk		117,105,000
0	391111	Ekuitas		200,007,922,391
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		7,474,000
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		6,931,954
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		9,551,050
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		1,950,000
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,305,546,980	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		66,447
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	67,708	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 27-04-22
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ESELON I : 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 606261 KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		1,202
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	321,021,930	
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		266,070
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	110,520,812	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	256,810,000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	378,807,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	17,055,620	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	264,188,160	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	669,538,629	
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS		667,248
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	63,705,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		7,015,600
3	512211	Beban Uang Lembur	48,089,000	
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,698,011,384	
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran		5,000
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,545,100	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136,492,000	
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja		547,200
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	10,713,500	
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	600,000	
3	521211	Beban Bahan	865,215,918	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	600,380,000	
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan		390,000
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	45,175,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	571,404,680	
3	522112	Beban Langganan Telepon	3,106,402	
3	522113	Beban Langganan Air	125,279,968	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	49,830,000	
3	522141	Beban Sewa	766,583,340	
3	522191	Beban Jasa Lainnya	24,800,000	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	611,293,515	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300,474,395	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406,226,330	
3	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	4,983,000	
3	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	9,994,000	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan : NPSAIKT
Tanggal : 27-04-22
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ESELON I : 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 606261 KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,337,541,396	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		300
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,950,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	532,911,930	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	954,541,827	
3	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	163,033,800	
3	591312	Beban Penyusutan Irigasi	35,694,636	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,799,103	
3	592115	Beban Amortisasi Software	8,937,500	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	6,205,724	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	488,045,445	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	40,681,600	
3	593114	Beban Persediaan suku cadang	4,618,500	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	12,794,700	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	58,815,675	
		J U M L A H	239,602,019,135	239,602,019,135

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 27-04-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 088.01.09.667901.000 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	935,159,558
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	17,895,335
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	25,023,740
131111	Tanah	16,983,000,000
132111	Peralatan dan Mesin	22,371,722,991
133111	Gedung dan Bangunan	26,798,147,431
134113	Jaringan	308,174,570
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	2,931,220,200
135121	Aset Tetap Lainnya	9,543,600
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20,556,791,879)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,741,593,723)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(282,990,176)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(58,520,433)
162151	Software	740,391,250
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	935,623,613
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(933,378,738)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(740,391,250)
J U M L A H		46,742,236,089

Pekanbaru, 25 April 2022

Penanggung Jawab UAKPB

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU


ANNA HASNAH HASARUDDIN, S.E., M.M.
NIP. 19710522 199503 2 001

UAPB : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UAPPB-EI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UAPPB-W : KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN :2021

UAKPB : KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU
KODE UAKPB : 088010900667901000KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	935,159,558
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	17,895,335
117199	Persediaan Lainnya	25,023,740
	Jumlah	978,078,633

Disetujui tanggal : 25 April 2022

Kuasa Pengguna Barang,

KEPALA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU


ANNA HASNAH HASARUDDIN, S.E., M.M.
NIP. 19710522 199503 2 001

Pekanbaru, 25 April 2022

Petugas Pengelola Persediaan,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM


PUNGKAS MUJI WIDODO, S.Kom, M.Si
NIP. 19840926 200801 1 002

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKB
Tanggal : 25-04-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 088 **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
ESELON I : 01 **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
WILAYAH/PROPINSI : 0900 **RIAU**
SATUAN KERJA : 667901 **KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU**

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1,752,917	
0	117111	Barang Konsumsi	935,159,558	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	17,895,335	
0	117199	Persediaan Lainnya	25,023,740	
0	131111	Tanah	16,983,000,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	22,371,722,991	
0	133111	Gedung dan Bangunan	26,798,147,431	
0	134113	Jaringan	308,174,570	
0	135111	Aset Tetap Renovasi	2,931,220,200	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,543,600	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		20,556,791,879
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		2,741,593,723
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		282,990,176
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		58,520,433
0	162151	Software	740,391,250	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	935,623,613	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		933,378,738
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		740,391,250
0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		8,944,020
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		61,526,046
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		19,755,109,321
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,249,295	
0	313221	Transfer Masuk		237,160,000
0	391111	Ekuitas		44,786,052,927
0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		469,306,731
0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	32,712,680	
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		15,167,500
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		585
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		10,516,210
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,871,487,580	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		928,200
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	68,574	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		2,739
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	280,757,218	
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		92,820
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	77,861,152	
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	264,740,000	
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	337,182,000	
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,515,496	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	242,969,100	
3	511129	Beban Uang Makan PNS	600,377,000	
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	45,815,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		365,000
3	512211	Beban Uang Lembur	112,513,000	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKB
Tanggal : 25-04-22
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ESELON I : 01 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0900 RIAU
SATUAN KERJA : 667901 KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,005,089,652	
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran		3,000,000
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	53,994,600	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,052,000	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	165,578,000	
3	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja		486,000
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,504,250	
3	521211	Beban Bahan	569,932,600	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	514,390,000	
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	73,810,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	654,802,534	
3	522112	Beban Langganan Telepon	8,396,138	
3	522113	Beban Langganan Air	1,278,900	
3	522141	Beban Sewa	1,247,519,679	
3	522151	Beban Jasa Profesi	6,800,000	
3	522191	Beban Jasa Lainnya	81,700,000	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	332,943,310	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	614,583,990	
3	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58,915,000	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	346,884,952	
3	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	11,997,040	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	3,906,665,385	
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	81,600,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	988,649,394	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	571,880,256	
3	591313	Beban Penyusutan Jaringan	3,239,582	
3	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58,520,433	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,244,875	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	254,058,044	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	52,451,280	
3	593149	Beban Persediaan Lainnya	33,939,104	
		J U M L A H	90,662,324,298	90,662,324,298

LAMPIRAN XII

Nota Kesepakatan Final

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BA 088) TAHUN 2021
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2021 (*AUDITED*)**

Nomor : NKF-088/039/PB.6/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 25 April 2022, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi Tiga Pihak secara Online untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun 2021, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BA 088) Tahun 2021 dan untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2021 (*Audited*).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi dari K/L dan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang telah disetujui dan disepakati bersama.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Badan Kepegawaian Negara (BA 088) menyetujui akan memproses angka asersi final untuk selanjutnya menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) paling lambat tanggal 28 April 2022.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Badan Kepegawaian Negara
Selaku Tim Penyusun LKKL



Wahyu

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK



Akhmad Syukri

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

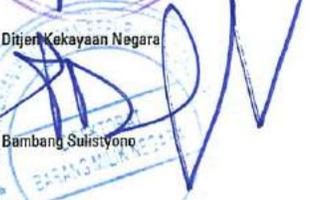
K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BA : 088

	UNAUDITED	KOREKSI UPDATE APLIKASI		KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-					-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-					-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-					-
Pendapatan Cukai	-					-
Pendapatan Pajak Lainnya	-					-
Pendapatan Bea Masuk	-					-
Pendapatan Bea Keluar	-					-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-					-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Penerimaan Sumber Daya Alam	-					-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / KND	-					-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,394,351,641			732,063,554	126,645	15,662,414,732
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,394,351,641	-	-	732,063,554	126,645	15,662,414,732
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-					-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	16,394,351,641	-	-	732,063,554	126,645	15,662,414,732
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	294,041,316,076			9,939,545	93	294,050,255,528
Beban Persediaan	13,847,111,583	490,005	2,110,036			13,845,491,552
Beban Barang dan Jasa	216,699,292,505			13,668,215		216,712,960,720
Beban Pemeliharaan	29,859,128,985	165,426	858,780		386,152,850	29,472,282,781
Beban Perjalanan Dinas	85,636,236,037					85,636,236,037
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-					-
Beban Bunga	-					-
Beban Subsidi	-					-
Beban Hibah	-					-
Beban Bantuan Sosial	-					-
Beban Transfer	-					-
Beban Lain-lain	-					-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	78,950,682,285	103,720,111	6,837,321	43,725,997	57,333,924	79,033,957,148
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3,816,428					3,816,428
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	719,029,951,043	104,375,542	9,806,137	66,333,757	443,486,867	718,747,367,338
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	- 702,635,599,402	- 104,375,542	- 9,806,137	665,729,797	- 443,360,222	- 703,084,952,606
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,494,522,668					1,494,522,668
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	208,739,635					208,739,635
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1,285,783,033	-	-	-	-	1,285,783,033

	UNAUDITED	KOREKSI UPDATE APLIKASI		KOREKSI BPK DAN MANDIRI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-					-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	665,487,023					665,487,023
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	119,884,760					119,884,760
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	545,602,263	-	-	-	-	545,602,263
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,831,385,296	-	-	-	-	1,831,385,296
POS LUAR BIASA						
Pendapatan Luar Biasa	-					-
Beban Luar Biasa	-					-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	700,804,214,106	104,375,542	9,806,137	665,729,797	443,360,222	701,253,567,310

Jakarta, 25 April 2022
 Badan Kepegawaian Negara

 Wahyu

Ditjen Kekayaan Negara

 Bambang Sulistyono

Badan Pemeriksa Keuangan


 Akhmad Syukri

Ditjen Pembendaharaan

 Denny Febriano Singawiria



K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BA : 088

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED UPDATE APLIKASI		KOREKSI AUDITED HASIL TRIPARTIT		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	789,050,702					789,050,702
Kas di Bendahara Penerimaan	-					-
Kas Lainnya dan Setara kas	-					-
Kas pada BLU	-					-
Investasi Jangka Pendek BLU	-					-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	10,162,052					10,162,052
Uang Muka Belanja (prepayment)	-					-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-					-
Piutang Perpajakan	-					-
Penyisihan PTH-Piutang Perpajakan	-					-
Piutang Perpajakan (Netto)	-	0	0	0	0	-
Piutang Bukan Pajak	-					-
Penyisihan PTH - Piutang Bukan Pajak	-					-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	0	0	0	0	-
Bagian Lancar TPA	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TPA	-					-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	0	0	0	0	-
Bagian Lancar TP/TGR	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar TP/TGR	-					-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	0	0	0	0	-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	-					-
Penyisihan PTH-Bagian Lancar PJPL	-					-
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	0	0	0	0	-
Piutang dari Kegiatan BLU	-					-
Penyisihan PTH - Piutang dari Kegiatan BLU	-					-
Piutang dari Kegiatan BLU (Netto)	-	0	0	0	0	-
Persediaan	10,156,919,379	3,975,377	1,661,992			10,159,232,764
Jumlah Aset Lancar	10,956,132,133	3,975,377	1,661,992	-	-	10,958,445,518
ASET TETAP						
Tanah	2,309,435,980,187					2,309,435,980,187
Peralatan dan Mesin	607,862,875,081			33,955,350	487,001,191	607,409,829,240
Gedung dan Bangunan	841,024,636,475			352,197,500		841,376,833,975
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23,958,841,060					23,958,841,060
Aset Tetap Lainnya	19,534,460,093					19,534,460,093
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,470,688,262					1,470,688,262
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(519,202,443,627)	6,837,321		487,001,191	3,909,786	(518,712,514,901)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(112,418,774,520)			57,333,924	670,796	(112,362,111,392)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(17,074,737,497)		98,022,343			(17,172,759,840)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,848,182,709)					(1,848,182,709)
Jumlah Aset Tetap	3,152,743,342,805	6,837,321	98,022,343	930,487,965	491,581,773	3,153,091,063,975

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED UPDATE APLIKASI		KOREKSI AUDITED HASIL TRIPARTIT		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Tagihan Penjualan Angsuran	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-					-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	0	0	0	0	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-					-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	0	0	0	0	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (PJPL)	-					-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - PJPL	-					-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	0	0	0	0	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-					-
Aset Tak Berwujud	142,393,801,295					142,393,801,295
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	-					-
Dana Penjaminan	-					-
Dana Kelolaan BLU	-					-
Aset Lain-lain	56,471,694,445			487,001,191		56,958,695,636
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ke3	-					-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(8,882,493,844)		5,697,768		487,001,191	(9,375,192,803)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(137,067,785,127)					(137,067,785,127)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(46,688,855,240)					(46,688,855,240)
Jumlah Aset Lainnya	6,226,361,529	-	5,697,768	487,001,191	487,001,191	6,220,663,761
JUMLAH ASET	3,169,925,836,467	10,812,898	105,382,103	1,417,489,156	978,582,964	3,170,270,173,254
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang kepada Pihak Ketiga	1,479,451,803				22,607,667	1,502,059,270
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-					-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-					-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-					-
Hibah Yang Belum Disahkan	1,679,400,000			1,679,400,000		-
Uang Muka dari KPPN	789,050,702	0	0	0	0	789,050,702
Pendapatan Diterima Dimuka	363,488,555			126,645	732,063,554	1,095,425,464
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4,311,390,860	-	-	1,679,526,645	754,671,221	3,366,535,436
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-					-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-					-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	4,311,390,860	-	-	1,679,526,645	754,671,221	3,366,535,436
EKUITAS	3,165,614,445,607	40,214,769	134,784,174	66,207,112	2,007,122,102	3,166,883,637,818
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,169,925,836,467	40,214,769	134,784,174	1,613,319,533	2,761,793,323	3,170,270,173,254

Jakarta, 25 April 2022
Badan Kepegawaian Negara

Wahya

Direktor Kepegawaian Negara

Bambang Sulistyono

Badan Pemeriksa Keuangan

Akhmad Syukri

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawirja



K/L : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 BA : 088

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI AUDITED UPDATE APLIKASI		KOREKSI AUDITED NON APLIKASI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	3,164,387,964,809					3,164,387,964,809
SURPLUS/DEFISIT LO	(700,804,214,106)	104,375,542	9,806,137	66,207,112	288,576,687	(701,253,567,310)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS						
Penyesuaian Nilai Aset	-					-
Koreksi Nilai Persediaan	-	1,006,561	1,006,561			-
Selisih Revaluasi Aset	-					-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	8,752,214,319	143,583,750	143,583,750		39,145,415	8,791,359,734
Koreksi Atas Reklasifikasi	(70,097,741)					(70,097,741)
Koreksi Lain-lain	(680,885,846)					(680,885,846)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	8,001,230,732	144,590,311	144,590,311	-	39,145,415	8,040,376,147
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	694,029,464,172	-	-	-	1,679,400,000	695,708,864,172
Ditagikan ke Entitas Lain	704,320,385,395					704,320,385,395
Diterima dari Entitas Lain	(18,440,310,807)					(18,440,310,807)
Transfer Keluar	(3,268,831,980)					(3,268,831,980)
Transfer Masuk	3,268,831,980					3,268,831,980
Pengesahan Hibah Langsung	7,468,503,738				1,325,040,000	8,793,543,738
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	680,885,846				354,360,000	1,035,245,846
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-					-
Setoran Surplus BLU	-					-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	1,226,480,798	40,214,769	134,784,174	-	66,207,112	2,495,673,009
EKUITAS AKHIR	3,165,614,445,607	40,214,769	134,784,174	-	66,207,112	3,168,883,637,818

Jakarta, 25 April 2022
 Badan Kepegawaian Negara
 Wahyu
 Dirjen Kepegawaian Negara
 Bambang Sulistyono
 Jeliših Ekuitas Neraca VS LPE
 (ETERANGAN)

Badan Pemeriksa Keuangan
 Akhmad Syukri
 Dirjen Perbendaharaan
 Denny Fabriano Singawiria

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 088
Uraian Bagian Anggaran : Badan Kepegawaian Negara

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-5+6	10 = 3-7+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,440,310,807	-	18,440,310,807	-	-	-	-	18,440,310,807	-	18,440,310,807
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PNBP Lainnya	18,440,310,807	-	18,440,310,807	-	-	-	-	18,440,310,807	-	18,440,310,807
424. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	18,440,310,807	-	18,440,310,807	-	-	-	-	18,440,310,807	-	18,440,310,807

B. BELANJA

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+5-7	10 = 4+8-9	11 = 10-9
51. Belanja Pegawai	294,485,284,843	470,262,882	294,015,021,961	-	-	-	-	294,485,284,843	470,262,882	294,015,021,961
52. Belanja Barang	349,417,539,723	4,769,428,696	344,648,111,027	-	-	-	-	349,417,539,723	4,769,428,696	344,648,111,027
53. Belanja Modal	65,667,930,639	10,678,232	65,657,252,407	-	-	-	-	65,667,930,639	10,678,232	65,657,252,407
54. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BELANJA	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395	-	-	-	-	709,570,755,205	5,250,369,810	704,320,385,395



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Akhdad Syukri

DAFTAR USULAN JURNAL KOREKSI
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
TAHUN 2021

NO. JURNAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT
I. KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Validasi K3</i>			
1) 592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.697.768	
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		5.697.768
2) 137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.837.321	
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		6.837.321
3) 391116	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	47.861.250	
391118	Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi		47.861.250
4) 391118	Koreksi nilai aset lainnya non revaluasi	95.722.500	
391116	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi		95.722.500
II. KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117111	Barang Konsumsi	46.000	
593111	Beban Persediaan konsumsi		46.000
2) 593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	121.726	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		121.726
III. KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Validasi K3</i>			
1) 591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	98.022.343	
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		98.022.343
IV. KANTOR PUSAT BKN JAKARTA			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117111	Barang Konsumsi	204.496	
593111	Beban Persediaan konsumsi		204.496
2) 117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3.100	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		3.100
3) 593149	Beban Persediaan Lainnya	3.610	
117199	Persediaan Lainnya		3.610
V. KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117113	Bahan untuk Pemeliharaan	56.000	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		56.000

NO. JURNAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT
VI. KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 593111	Beban Persediaan konsumsi	7.000	
117111	Barang Konsumsi		7.000
2) 593149	Beban Persediaan Lainnya	55.000	
117199	Persediaan Lainnya		55.000
VII. KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117114	Suku Cadang	33.798	
391113	Koreksi Nilai Persediaan		33.798
2) 391113	Koreksi Nilai Persediaan	33.798	
117199	Persediaan Lainnya		33.798
3) 117199	Persediaan Lainnya	51.200	
593149	Beban Persediaan Lainnya		51.200
VIII. KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117111	Barang Konsumsi	167.300	
593111	Beban Persediaan konsumsi		167.300
2) 593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	43.700	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		43.700
IX. KANTOR REGIONAL XI BKN MANADO			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117111	Barang Konsumsi	246.150	
593111	Beban Persediaan konsumsi		246.150
2) 117199	Persediaan Lainnya	851.400	
593149	Beban Persediaan Lainnya		851.400
X. KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117111	Barang Konsumsi	972.763	
391113	Koreksi Nilai Persediaan		972.763
2) 391113	Koreksi Nilai Persediaan	971.740	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		971.740
3) 391113	Koreksi Nilai Persediaan	1.023	
117199	Persediaan Lainnya		1.023
4) 117111	Barang Konsumsi	171.290	
593111	Beban Persediaan konsumsi		171.290
5) 593149	Beban Persediaan Lainnya	4.395	
117199	Persediaan Lainnya		4.395
6) 117113	Bahan untuk Pemeliharaan	600.800	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		600.800

NO. JURNAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT
XI. KANTOR REGIONAL XIII BKN BANDA ACEH			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 593111	Beban Persediaan konsumsi	420.000	
117111	Barang Konsumsi		420.000
XII. KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117111	Barang Konsumsi	372.200	
593111	Beban Persediaan konsumsi		372.200
XIII. PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN ASN			
<i>Hasil Update Aplikasi Pelaporan, Penyesuaian Nilai Persediaan</i>			
1) 117113	Bahan untuk Pemeliharaan	198.880	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		198.880

*) Koreksi Beban Penyusutan menyesuaikan simulasi perhitungan pada aplikasi SIMAK BMN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmad Syukri'.

Akhmad Syukri



BPK RI

DAFTAR USULAN JURNAL KOREKSI
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
TAHUN 2021

NO. JURNAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SUMBER
I. KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG				
<i>Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan berupa Pekerjaan Pengembangan Sarana Upacara dan Ruang Kerja Bersama dan Koreksi Pencatatan atas Pekerjaan Pengembangan Pintu Masuk/Gerbang Kantor</i>				
1) 133111 523111	Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.289.000	198.289.000	Koreksi BPK
2) 137211 591211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	41.558.397	41.558.397	
3) 591211 391116	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	39.145.415	39.145.415	
<i>Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Komputer Skala Besar berupa Router Internet</i>				
4) 132111 523121	Peralatan dan Mesin Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.570.000	20.570.000	Koreksi BPK
5) 591111 137111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.571.250	2.571.250	
II. KANTOR REGIONAL V BKN DKI JAKARTA				
<i>Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa CCTV</i>				
1) 132111 523121	Peralatan dan Mesin Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.385.350	13.385.350	Koreksi BPK
2) 591111 137111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.338.536	1.338.536	
<i>Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Pemeliharaan Taman</i>				
3) 133111 523111	Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.738.000	65.738.000	Koreksi BPK
4) 591211 137211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	670.796	670.796	
III. KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG				
<i>Koreksi atas Pengesahan Hibah Langsung untuk Hibah yang Belum Disahkan berupa Tanah UPT Jambi</i>				
1) 218211 391131	Hibah Langsung yang Belum Disahkan Pengesahan Hibah Langsung	965.040.000	965.040.000	Koreksi BPK
IV. KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR				
<i>Koreksi atas Kesalahan perhitungan Utang - Belanja Pegawai Yang Masih harus dibayar. (Terdapat perhitungan yang masih bersifat estimasi dan tidak jadi terutang)</i>				
1) 511111 511121 511122 511125 511119 212111	Beban Gaji Pokok PNS Beban Tunj. Suami/Istri PNS Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. PPh PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Utang Kepada Pihak Ketiga - Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	3.141.300 109.350 57.894 71.175	93 3.379.626	Koreksi Mandiri BKN

NO. JURNAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SUMBER
<i>Koreksi atas Pengesahan Hibah Langsung untuk Hibah yang Belum Disahkan berupa Tanah UPT Kupang</i>				
1) 218211 391131	Hibah Langsung yang Belum Disahkan Pengesahan Hibah Langsung	360.000.000	360.000.000	Koreksi BPK
V. KANTOR PUSAT BKN JAKARTA				
<i>Koreksi atas Kesalahan perhitungan Utang - Belanja Pegawai Yang Masih harus dibayar dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar</i>				
1) 511111 511121 511122 511125 511124 511119 212111	Beban Gaji Pokok PNS Beban Tunj. Suami/Istri PNS Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. PPh PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Utang Kepada Pihak Ketiga - Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	2.273.400 227.340 56.178 102.216 2.900.000 692	5.559.826	Koreksi Mandiri BKN
2) 522113 521111 522111 212112	Beban Langganan Air Beban Keperluan Perkantoran Beban Langganan Listrik Utang Kepada Pihak Ketiga - Belanja Barang yang masih harus dibayar	11.166.970 2.480.000 21.245	13.668.215	Koreksi BPK
<i>Koreksi atas Kesalahan perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa ATM BRI dan Sewa Ruangan BNI serta FIDAC</i>				
3) 425131 219211	Pendapatan LO (Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) Pendapatan Diterima Dimuka	732.063.554	732.063.554	Koreksi Mandiri BKN
<i>Koreksi reklasifikasi atas peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan namun masih dicatat sebagai peralatan dan mesin</i>				
4) 166112 132111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Peralatan dan Mesin	315.293.500	315.293.500	Koreksi BPK
5) 137111 169122	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	315.293.500	315.293.500	
VI. KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA				
<i>Koreksi reklasifikasi atas peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan namun masih dicatat sebagai peralatan dan mesin</i>				
1) 166112 132111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Peralatan dan Mesin	171.707.691	171.707.691	Koreksi BPK
2) 137111 169122	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	171.707.691	171.707.691	
VII. PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN ASN				
<i>Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pasang Jendela Kaca Ruang Kerja</i>				
1) 133111 523111	Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88.170.500	88.170.500	Koreksi BPK
2) 137211 591211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.775.527	15.775.527	

NO. JURNAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SUMBER
<i>Koreksi atas Kesalahan perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa ATM BRI</i>				
5) 219211 425131	Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan LO (Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan)	126.645	126.645	Koreksi BPK
VIII. KANTOR REGIONAL XIV BKN MANOKWARI				
<i>Koreksi atas Pengesahan Hibah Langsung untuk Hibah yang Belum Disahkan berupa Mobil Operasional</i>				
1) 218211 391133	Hibah Langsung yang Belum Disahkan Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	354.360.000	354.360.000	Koreksi BPK

*) Koreksi Beban Penyusutan menyesuaikan simulasi perhitungan pada aplikasi SIMAK BMN



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


Akhmad Syukri

LAMPIRAN XIII
BUKTI SETORAN
PENERIMAAN NEGARA

TABEL BUKTI PENERIMAAN NEGARA

No	Keterangan	NTPN	NTB	Jumlah
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran				
1	Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu Kantor Regional I BKN Yogyakarta	B4CBC6U8EBGL80AR	474777085450	Rp 789.050.702,00
JUMLAH				Rp 789.050.702,00
C.5 Piutang Bukan Pajak				
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Cleaning Service Pusbang ASN an PT Pinang Abadi Jaya	DF4372G4UTH8HUJG	210324570118	Rp 18.900.000,00
2	Pengembalian sesuai SPM Nomor 03614/LS/2015 an PT Properindo Jasatama (Temuan BPK)-Pusbang ASN	EE9A555DED2B7T5V	000000256749	Rp 2.200.000,00
3	Pengembalian sesuai SPM Nomor 03302/LS/2015 an PT Sugitek Indo Tama (Temuan BPK)-ROUM	B7DA06U8E2741P5J	000000220854	Rp 14.400.000,00
4	Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) an CV Galvin Mitra Tama	241D21JNF2RM8JNV	000000096348	Rp 5.740.685,00
5	Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) an CV Dwi Cemerlang	4EDBE2G4UTE2LIQK	000000083950	Rp 3.465.435,00
6	Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) an CV Dwi Cemerlang	B390E6U8E2A0MIAR	000000089624	Rp 11.413.160,00
JUMLAH				Rp 56.119.280,00
TOTAL				Rp 845.169.982,00

PENGAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/UKAI

NOHOR TRANSAKSI : 2665452201031134482748
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 03/01/2022 11:30:35 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/UKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 03/01/2022 11:30:35
TANGGAL BUKU : 03/01/22
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 474777086460
NIPN : 84C8C6U8E8GL80AR
STAN : 316355
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 820220103393627
NAMA WAJIB BAYAR : BENDAHARA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA
KEHETRIAN / LEMBAGA : 088
UNIT ESELON I : 01
SATUAN KERJA : 017241
JUMLAH SETORAN : RP. 789,050,702.00
TERBILANG : TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEBILAN JUTA LIMA PULUH RIBU TUJUH RATUS DUA RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEHERLUKAN TANGA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	789050702.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 789,050,702.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 789,050,702.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
13700 1370051 1379003 33 13 03/01/2022 11:30:35 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/UKAI IDR 789,050,702.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/UKAI IDR 789,050,702.00 CR
BILL REF 2665452201031134482748
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 820220103393627 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Cabang branch SUDIRMAN

tanggal date 3-1-2022

harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block letters

VALIDASI
Validation

13700 1370051 1379003 33 11 03/01/2022 11:30:35 AM 7114
CASH IDR 789,050,702.00
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 789,050,702.00 CR
BILL REF 2665452201031134482748
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 820220103393627 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

MATA UANG
Currency



RUPIAH
Local Currency



VALUTA ASING
Foreign Currency

JENIS SETORAN

Deposit Type



TUNAI
Cash



WARKAT SENDIRI
Bank Mandiri's Cheque

DEBET REKENING

Debit Account

PENERIMA

Beneficiary

NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
Provider's/Biller's Name

PNBP

No. PELANGGAN/NIM/NIS/No. MVA
Customer No./Student ID/MVA No.

82022 0103393627

JUMLAH

Total

Rp. 789.050.702

TERBILANG

in Words

TUJUH RATUS DELAPAN PULUH
SEMBILAN JUTA LIMA PULUH RIBU
TUJUH RATUS DUA RUPIAH

PENYETOR/PEMILIK REKENING

Depositor's Name

NAMA/Name

Bendahara Kasier I BKN

ALAMAT & NO. TELEPON/Address & Telephone No.

Jl. Magelang km 7.5 Yk

Tujuan Transaksi underlying transaction

Pengembalian sisa Tup 2021

TANDA TANGAN TELLER
Teller's Signature

TANDA TANGAN PENYETOR
Depositor's Signature



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA LAINNYA**

Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 820220103393627
Tanggal Billing : 03-01-2022 10:52:48
Tanggal Kedaluwarsa : 10-01-2022 10:52:48
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Penyetor : BENDAHARA KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA
Kementerian Negara/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA
Total Disetor : 789.050.702
Terbilang : Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus dua (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail pembayaran tagihan :

Lokasi : -
Akun : 815514 - Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 789.050.702
Keterangan : -

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://penerimaan-negara.info> dan <http://bit.ly/infobayarMPNG2>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090 atau KPPN Khusus Penerimaan di (021) 3840516
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

--o0o--

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210216847707
Tanggal Billing : 16-02-2021 13:29:14
Tanggal Kedaluwarsa : 23-02-2021 13:29:14
Tanggal Bayar : 18-02-2021 10:20:27
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor : 11.413.160 (IDR)
Terbilang : *Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Enam Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 00000089624
NTPN : B390E6U8E2A0MIAR

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 11.413.160 (IDR)
Keterangan : Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) An. CV. Dwi Cemerlang



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210216848212
Tanggal Billing : 16-02-2021 13:31:21
Tanggal Kedaluwarsa : 23-02-2021 13:31:21
Tanggal Bayar : 18-02-2021 10:20:12
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor : 3.465.435 (IDR)
Terbilang : *Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000083950
NTPN : 4EDBE2G4UTE2LIQK

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 3.465.435 (IDR)
Keterangan : Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) An. CV. Dwi Cemerlang



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210216849151
Tanggal Billing : 16-02-2021 13:33:18
Tanggal Kedaluwarsa : 23-02-2021 13:33:18
Tanggal Bayar : 18-02-2021 10:20:45
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor : 5.740.685 (IDR)
Terbilang : Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000096348
NTPN : 241D21JNF2RM8JNV

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 5.740.685 (IDR)
Keterangan : Pengembalian (Temuan BPK Tahun 2015) An. CV. Galvin Mitra Tama



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210119697587
Tanggal Billing : 19-01-2021 11:27:28
Tanggal Kedaluwarsa : 26-01-2021 11:27:28
Tanggal Bayar : 21-01-2021 14:28:43
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor : 14.400.000 (IDR)
Terbilang : Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000220854
NTPN : B7DA06U8E2741P5J

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 14.400.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian sesuai SPM No. 03302/LS/2015 An. PT. SUGITEK INDO TAMA (Temuan BPK)-ROUM



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210119701695
Tanggal Billing : 19-01-2021 11:49:34
Tanggal Kedaluwarsa : 26-01-2021 11:49:34
Tanggal Bayar : 21-01-2021 14:30:19
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Edi Firmansyah
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor : 2.200.000 (IDR)
Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 00000256749
NTPN : EE9A555DED2B7T5V

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 2.200.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian sesuai SPM No. 03614/LS/2015 An. PT. PROPERINDO
JASATAMA (Temuan BPK)-PUSBANG ASN



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820210323683952
Tanggal Billing : 23-03-2021 14:16:04
Tanggal Kedaluwarsa : 30-03-2021 14:16:04
Tanggal Bayar : 24-03-2021 08:16:13
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PT. Pinang Abadi Jaya
Kementerian/Lembaga : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Unit Eselon I : Badan Kepegawaian Negara
Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUSAT JAKARTA
Total Disetor : 18.900.000 (IDR)
Terbilang : *Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 210324570118
NTPN : DF4372G4UTH8HUJG

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 18.900.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan pembayaran cleaning service Pusbang ASN An. PT. Pinang Abadi Jaya (Temuan BPK)

LAMPIRAN XIV

LAPORAN HASIL REVIU (LHR) PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Badan Kepegawaian Negara. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif/ efektif dengan pengecualian/ mengandung kelemahan material*)**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai / tidak memadai**)**.

Jakarta, 21 Desember 2021
Sekretaris Utama BKN
Selaku Ketua Tim Penilai UAPA BKN T.A. 2021

/s/ Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP.

**) Pilih salah satu*

****) Pilih salah satu, dengan ketentuan: memadai bila PIPK efektif atau efektif dengan pengecualian; dan tidak memadai bila PIPK mengandung kelemahan material.*

Lampiran
Laporan Hasil Penilaian

A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai

1. Persediaan
2. Peralatan dan Mesin

B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan

No	Temuan			Rekomendasi
	Uraian	Sebab	Akibat	
A.	Kelemahan Material			
	-			
B.	Kelemahan Signifikan			
	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN				
1.	Jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	Belum ada pemantauan berkelanjutan & kalkulasi dari pusat terkait pemenuhan pejabat/pegawai	Workload pekerjaan yang tinggi belum bisa dihandle dengan baik sebagai akibat dari kurang seimbang nya kebutuhan kerja dengan jumlah pegawai yang tersedia	Penambahan pejabat/pegawai sesuai dan seimbang dengan analisis beban kerja
C. Kelemahan yang Berdampak Rendah				
Kantor Pusat BKN				
- Tidak Ada Kelemahan				
Kantor Regional I BKN Yogyakarta				
- Tidak Ada Kelemahan				
Kantor Regional II BKN Surabaya				
	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Review atas data olahan tidak efektif	Hasil data olahan aplikasi berdasarkan data yang diinput tidak efektif	Data yang disajikan tidak tepat	Melakukan penelitian dokumen apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak
2.	Pemutakhiran data terhadap kondisi barang peralatan dan mesin yang dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN tidak efektif	Belum dilakukan pemutakhiran data (update) terhadap kondisi barang peralatan dan mesin yang dicatat dalam aplikasi	Akibatnya ditemukan perbedaan nilai/jumlah dan kondisi barang/jasa pada aplikasi dan	Perlu adanya update data secara berkala oleh pengelola BMN khususnya barang peralatan dan mesin. Memperbaiki Daftar Barang Ruangan Per

		SIMAK BMN	factual	Desember 2021 (saat ini yang tercatat per Juli 2020)
3.	Penggunaan Mata Anggaran Kegiatan Tidak Efektif	Terdapat kesalahan akun, seharusnya 532119 tetapi tercatat 532111	Pada Laporan Keuangan terdapat salah catat	Memperbaiki akun menjadi yang benar 532119
4.	Analisis dan evaluasi risiko dalam pencapaian tujuan oleh unit kerja belum efektif	SDM yang ada belum mempunyai daya Analisa dan evaluasi yang memadai serta belum dilakukannya pemutakhiran data Risiko yang mungkin terjadi	Tujuan unit kerja tidak akan tercapai dengan baik	Melakukan update Form Risiko
5.	Penanganan risiko dalam pencapaian tujuan yang oleh unit kerja tidak efektif	SDM yang ada belum mempunyai cara yang tepat dalam memitigasi risiko serta belum dilakukannya pemutakhiran data Risiko yang mungkin terjadi	Tujuan unit kerja tidak akan tercapai dengan baik	Melakukan update Form Risiko
6.	Tindak lanjut atas perbedaan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan tidak efektif	Belum dilakukannya reviu internal unit kerja yang memadai	Tujuan unit kerja tidak akan tercapai dengan baik	Reviu Triwulanan dengan Biro Perencanaan
7.	Mekanisme otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting oleh unit kerja tidak efektif	Belum adanya standarisasi dalam otorisasi dan persetujuan yang baik dan benar	Dokumen yang ada tidak terotorisasi dan disetujui dengan baik	Membuat SOP mengenai otorisasi Digital Signature
8.	Pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus tidak efektif	Belum adanya standarisasi dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi yang baik dan benar	Terlalu banyak macam aplikasi dalam suatu unit kerja	Mengembangkan Aplikasi AREK

Kantor Regional III BKN Bandung

- Tidak ada kelemahan

Kantor Regional IV BKN Makassar

	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit	Dalam beberapa kasus, pemenuhan formasi jabatan yg	SDM ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi	Melakukan evaluasi atau reviu dokumen sesuai dengan kondisi

	kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	diajukan oleh tim Analisis beban kerja unit tidak disetujui oleh bagian formasi/pengadaan	yg dimiliki	kebutuhan kantor
2.	Pengaturan pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki tidak efektif	Sering terjadi perubahan operator yang membuat pembatasan akses atas aset dan aplikasi tdk terkontrol baik	Sehingga pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki tidak efektif	Sebaiknya membuat surat yang mempertegas terkait pembatasan akses dan yang bertanggungjawab terhadap aplikasi tersebut
3.	Inventarisasi BMN tidak efektif	Tidak lakukan update dan dokumentasi secara berkala terhadap BMN unit	Kevalidan data terkait kondisi barang dengan real kurang akurat	Memperbaiki inventarisasi dan lebih update terhadap kondisi aset

Kantor Regional V BKN DKI Jakarta

	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	Anjab dan ABK tidak dievaluasi dan dibandingkan dengan keadaan sebenarnya	Sehingga jumlah pejabat/pegawai pada unit kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	Koordinasi dengan Biro SDM dan mengevaluasi Anjab dan ABK serta membuat usulan permintaan/mutasi pegawai

Kantor Regional VI BKN Medan

- Tidak ada kelemahan

Kantor Regional VII BKN Palembang

	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Penggunaan Mata Anggaran Kegiatan Tidak Efektif	Disebabkan adanya kesalahan dalam melakukan penginputan akun pada aplikasi SAS	Terdapat kesalahan akun seharusnya akun 521811 tetapi tercatat 521119. Sehingga terjadi salah saji akun pada Laporan Keuangan Bulanan Kanreg VII BKN Palembang	Verifikasi Spby/ penginputan dalam aplikasi dilakukan bertingkat
2.	Analisis dan evaluasi risiko dalam pencapaian tujuan oleh unit kerja tidak efektif	Sebab kemampuan Analisa yang kurang memadai dikarenakan kurang memahami aturan secara komprehensif	Tidak dapat terdeteksi secara dini resiko yang ditimbulkan	Mengupdate form resiko

3.	Penanganan risiko dalam pencapaian tujuan yang oleh unit kerja tidak efektif	Sebab belum tersusun standarisasi penanganan risiko yang baku	Penanganan terhadap resiko yang ditimbulkan kurang efektif	Mengupdate form resiko
4.	Mekanisme otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting oleh unit kerja tidak efektif	Sebab belum tersusun standarisasi mekanisme otorisasi dan persetujuan (approval) yang baku	Penanganan terhadap otorisasi dan approval yang ditimbulkan kurang efektif	Membuat SOP otorisasi atas transaksi kejadian penting

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

- Tidak Ada Kelemahan

Kantor Regional IX BKN Jayapura

- Tidak Ada Kelemahan

Kantor Regional X BKN Denpasar

- Tidak Ada Kelemahan

Kantor Regional XI BKN Manado

- Tidak Ada Kelemahan

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

- Tidak ada kelemahan

Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh

- Tidak Ada Kelemahan

Kantor Regional XIV BKN Manokwari

- Tidak Ada Kelemahan

Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN

	Uraian	Sebab	Akibat	Rekomendasi
1.	Pemberian sanksi yang telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku tidak efektif	Belum ada pemantauan berkelanjutan dan evaluasi mengenai kebijakan dan prosedur yang berlaku	Potensi ketidakefektifan kebijakan dan prosedur semakin besar dan akan mempengaruhi kualitas prosedur	Memperkuat pondasi, mematangkan teknis, dan mensosialisasikannya terkait kebijakan dan prosedur yang berlaku
2.	Belum ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja	Belum ada analisa komprehensif terkait potensi kejadian perubahan	Adanya sikap <i>resistant to change</i> meskipun beberapa unit kerja sedang mengalami dan mempelajari perubahan.	Pengetatan pengawasan dan breakdown potensi kejadian terkait perubahan berdampak signifikan pada unit kerja.

Tabel E. Penilaian Kelemahan Gabungan

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan : UAPA Badan Kepegawaian Negara
 Akun Signifikan : Persediaan, Peralatan dan Mesin

No	Uraian Kelemahan	Kantor Regional I Yogyakarta	Kantor Regional II Surabaya	Kantor Regional III Bandung	Kantor Regional IV Makassar	Kantor Regional V DKI Jakarta	Kantor Regional VI Medan	Kantor Regional VII Palembang	Kantor Regional VIII Banjarmasin	Kantor Regional IX Jayapura	Kantor Regional X Denpasar	Kantor Regional XI Manado	Kantor Regional XII Pekanbaru	Kantor Regional XIII Aceh	Kantor Regional XIV Manokwari	Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN	Kantor Pusat BKN	Rata-rata	Simpulan Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Simpulan Menurut Tim Penilai UAPA
-1-		-2-															-3-	-4-	-5-	-6-	
1	Penggunaan Mata Anggaran Kegiatan Tidak Efektif	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0
2	Analisis dan evaluasi risiko dalam pencapaian tujuan oleh unit kerja belum efektif	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0
3	Penanganan risiko dalam pencapaian tujuan yang oleh unit kerja belum efektif	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0
4	Mekanisme otorisasi dan persetujuan (approval) atas transaksi dan kejadian penting oleh unit kerja tidak efektif	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0	0
5	Review atas data olahan aplikasi tidak efektif	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0
6	Pemutakhiran data terhadap kondisi barang peralatan dan mesin yang dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN tidak efektif	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0
7	Tindak lanjut atas perbedaan capaian kinerja dengan kinerja yang direncanakan tidak efektif	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0
8	Pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus tidak efektif	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0
9	Jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja dengan analisis beban kerja tidak efektif	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.25	0	0	0
10	Pengaturan pembatasan akses atas aset dan aplikasi yang dimiliki tidak efektif	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0
11	Inventarisasi BMN belum efektif	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0
12	Pemberian sanksi yang telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku tidak efektif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.06	0	0	0
13	Belum ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.06	0	0	0
* Keterangan : - **Total Salah Saji Teridentifikasi : - ***Simpulan PIPK Gabungan: Pengendalian Intern Efektif (PIE)																					

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL REVIU
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : 043/AI.02/LHR/H/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

PENDAHULUAN

A. Penugasan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan dilaksanakan penilaian PIPK secara mandiri (*control self assessment*) oleh manajemen.

Reviu PIPK oleh APIP sebagai pihak eksternal **bertujuan** untuk memastikan bahwa hasil penilaian PIPK yang dilakukan oleh manajemen sebagai pihak internal bebas dari subjektivitas sehingga hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta dapat meningkatkan objektivitas penilaiannya.

Penugasan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan oleh APIP didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Reviu terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah (PIPK) pada Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas nomor : 004.0/A1.02/TU/H/ 2022 tanggal 7 Januari 2022.

B. Proses Reviu

Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya serta ketersediaan auditor APIP yang ditugaskan untuk melakukan reviu PIPK maka entitas akuntansi yang direviu dilakukan secara uji petik, karena penentuan persediaan dan belanja modal (peralatan mesin) sebagai akun signifikan oleh tim penilai dan disetujui oleh manajemen, berdasarkan hal tersebut uji petik dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Entitas akuntansi yang memiliki nilai Asset terbesar di neraca dan/atau;
 2. Entitas akuntansi yang memiliki belanja modal yang paling besar.
 3. Entitas akuntansi yang memiliki permasalahan pada saat reviu LK TW 3 TA 2021
 4. Entitas akuntansi yang belum pernah dijadikan sampel pada reviu PIPK sebelumnya
- Dari pertimbangan sebagaimana di atas maka untuk tingkat entitas akuntansi yang dilakukan reviu terdiri dari Kantor Pusat BKN, Kantor Regional X BKN Denpasar dan

Kantor Pusat Pengembangan ASN BKN.

Prosedur reviu dilakukan dengan :

1. Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap kertas kerja penilaian dari tim penilai untuk menilai kecukupan identifikasi proses/transaksi utama pelaporan keuangan, kecukupan identifikasi risiko utama, dan melihat apakah seluruh risiko telah dimitigasi dengan pengendalian utama, reviu dokumen juga dilakukan untuk menilai pengujian pengendalian intern tingkat entitas (PITE) yang dilakukan, dan ketepatan pengambilan sampel pengujian atribut pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai

2. Verifikasi dan Konfirmasi

Verifikasi dilakukan terhadap bukti dukung penilaian PITE, sampel pengujian atribut pengendalian serta dilakukan konfirmasi kepada tim penilai atas bukti – bukti dukung penilaian tersebut.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Tim Penilai, operator aplikasi SAIBA, SIMAK dan aplikasi persediaan untuk menilai pengujian PUTIK dan pengujian pengendalian aplikasi yang dilakukan oleh tim penilai.

4. *Reperformance*

Reperformance (reviu ulang suatu pekerjaan) dilakukan untuk pengujian atribut pengendalian untuk melihat konsistensi pelaksanaan pengendalian terutama dalam rangka melihat dampak terhadap salah saji yang diakibatkan pengendalian yang tidak andal.

5. Analisis

Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian atau simpulan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.

C. Hasil Reviu

1. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

- 1) Risiko Utama kesalahan klasifikasi akun dari proses/transaksi utama Belanja Modal (PM) dan Persediaan belum semua diidentifikasi dan dimitigasi;
- 2) Proses/transaksi utama belum mencakup semua proses transaksi utama yang seharusnya. Proses transaksi utama pada belanja modal khususnya aset tetap sebaiknya dimulai dari proses awal sampai dengan akhir;
- 3) Pengendalian utama Verifikasi, pengendalian akses, *stockopname* belum cukup untuk memitigasi risiko kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, karena belum didukung oleh aplikasi dan masih diperlukan konfirmasi secara manual antara verifikator, Bendahara pengeluaran dan Operator SIMAK BMN.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

- 1) Proses transaksi utama belum semua diidentifikasi dan dimitigasi
- 2) Pengendalian utama Pemeriksaan nota pesanan dan berita jalan oleh petugas persediaan dan Penggunaan aplikasi dalam pencatatan penerimaan barang belum cukup memitigasi risiko
- 3) Risiko utama pada proses transaksi utama belum seluruhnya diidentifikasi dan dimitigasi
- 4) Risiko berkenaan proses/transaksi utama Pelaporan Barang Persediaan belum semua diidentifikasi dan dimitigasi
- 5) Pengendalian utama terkait Pengendalian Akses terhadap aplikasi Persediaan dalam proses transaksi Pelaporan Barang Persediaan belum cukup memitigasi risiko.

c. Pusat Pengembangan ASN

Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

- 1) Proses/transaksi utama belum mencakup semua proses transaksi utama yang seharusnya. Proses transaksi utama pada persediaan dan peralatan mesin

sebaiknya dimulai dari proses awal sampai dengan akhir (perencanaan hingga pelaporan);

- 2) Pengendalian utama Rekonsiliasi Bulanan belum dapat memitigasi risiko yang ada. Rekonsiliasi merupakan pengendalian detektif untuk menemukan kejadian yang tidak diharapkan, atau kesalahan (risiko sudah terjadi), belum ada pengendalian untuk pencegahan;
- 3) Tidak teridentifikasinya risiko dengan baik yang dapat mengakibatkan kurang tepat dan tidak efektifnya pengendalian yang dirancang (terdapat potensi pengendalian tidak terancang karena gagal dalam mengidentifikasi risiko)

2. Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya

Identifikasi Risiko dan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan signifikan sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Berdasarkan hasil reviu terhadap Tabel A1-Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian tim penilai tidak membuat hasil perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang mereka nilai, karena tim penilai menilai Tabel A sudah memadai.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Berdasarkan hasil reviu terhadap Tabel A1-Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian tim penilai tidak membuat hasil perbaikan identifikasi risiko dan pengendalian yang mereka nilai, karena tim penilai menilai Tabel A sudah memadai.

c. Pusat Pengembangan ASN

Berdasarkan hasil reviu terhadap tabel A1-Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendalian, tim penilai melakukan evaluasi pada Identifikasi Risiko dan rancangan pengendalian yang telah disusun, sehingga koreksi atau feedback yang diberikan tepat dan dituangkan dalam Tabel A1.

3. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE)

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas tidak terdapat penyimpangan signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PITE dan **telah membuat penilaian secara wajar** dalam kondisi sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Terdapat dokumen manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko, bukti hasil wawancara, survei maupun observasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Terdapat dokumen, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Pusat BKN Jakarta memperoleh nilai 98% yang artinya 98% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 2% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Tidak terdapat dokumen mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi,

dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja dan bukti hasil wawancara.

3) Kegiatan Pengendalian

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Tidak terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Tidak terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Kantor Regional X BKN Denpasar memperoleh nilai 96% yang artinya 96% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 4% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada. Namun persentase skor faktor-faktor PITE hasil reviu memperoleh nilai 76% yang artinya 76% simpulannya faktor yang dinilai ada dan 24% simpulannya faktor yang dinilai belum ada/ belum terdapat bukti yang memadai atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

c. Pusat Pengembangan ASN

Pengujian pengendalian intern tingkat entitas terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PITE dan membuat penilaian secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

2) Penilaian Risiko

Terdapat dokumen manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko, bukti hasil wawancara, survei maupun observasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Terdapat bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

4) Informasi dan Komunikasi

Terdapat dokumen, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

5) Pemantauan

Terdapat dokumen pelaksanaan pengendalian, bukti hasil wawancara dan survei maupun observasi.

Persentase skor faktor-faktor PITE yang dinilai oleh tim penilai Pusat Pengembangan ASN memperoleh nilai 94% yang artinya 94% simpulannya faktor yang dinilai ada dan sebanyak 6% simpulannya faktor yang dinilai tidak ada atau tidak relevan dengan kondisi yang ada.

4. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)

Pengujian PUTIK untuk tingkat entitas akuntansi, terdapat penyimpangan signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian PUTIK terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian secara wajar namun belum sesuai dengan PMK No. 17/PMK.09/2019.

1) Area Akses Logical :

- a) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- b) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses (sudah)
- c) Matrik akses pengguna (*user acces matrix /UAM*) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- d) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;
- e) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- f) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif;
- g) Kata sandi *default* untuk akun - akun *default* di database, server dan aplikasi telah diubah;
- h) *Penetration testing/ vulnerability assessment* dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang disetujui;
- i) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

2) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

- a) Implementasi prosedur backup dan restore secara konsisten (sudah);
- b) *Service level Agreement* (SLA) atau *Operational level Agreement* (OLA) secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;
- c) Implementasi dan uji berkala atas DRP;
- d) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll);
- e) Gangguan atau insiden operational TI diidentifikasi, ditangani, direviu dan dianalisa dengan tepat waktu (sudah);
- f) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Pengujian PUTIK terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian belum secara wajar. Pengujian yang dilakukan hanya melakukan penelitian dokumen apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Dalam kondisi tersebut belum cukup untuk memenuhi pengujian yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penilai.

1) Area Akses Logical :

- a) Program *security awarness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara.
- b) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses.
- c) Matrik akses pengguna (user acces matrix /UAM) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala
- d) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin
- e) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya

- f) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif
- g) Kata sandi default untuk akun - akun default di database, server dan aplikasi telah diubah
- h) *Penetration testing/ vulnerability assesment* dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang disetujui.
- i) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

2) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

- a) Implementasi prosedur backup dan restore secara konsisten;
- b) *Service level Agreement (SLA)* atau *Operational level Agreement (OLA)* secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;
- c) Implementasi dan uji berkala atas DRP;
- d) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll);
- e) Gangguan atau insiden operational TI diidentifikasi, ditangani, direviu dan dianalisa dengan tepat waktu;
- f) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

c. Pusat Pengembangan ASN

Pengujian PUTIK terdapat penyimpangan tidak signifikan yaitu berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji PUTIK dan membuat penilaian belum secara wajar. Pengujian yang dilakukan hanya melakukan penelitian dokumen apakah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak. Dalam kondisi tersebut belum cukup untuk memenuhi pengujian yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penilai dikarenakan belum sesuai dengan PMK No. 17/PMK.09/2019.

1) Area Akses Logical :

- a) Program *security awareness* disosialisasikan ke pengguna, termasuk pengguna sementara;
- b) Pemantauan terhadap penggunaan hak akses;

- c) Matrik akses pengguna (*user acces matrix /UAM*) di setiap lapisan, baik aplikasi, OS, DB, dan layanan jaringan disusun dan divalidasi secara berkala;
- d) Hak akses dari pegawai yang dimutasi atau mengundurkan diri, pihak ketiga yang kontraknya telah habis, dan individu yang melanggar standar keamanan informasi dan tengah menjalani proses hukum, dicabut sesegera mungkin;
- e) Akun pengguna (umum maupun khusus) didefinisikan secara individual untuk memastikan akuntabilitasnya;
- f) Akses remote dan jaringan nirkabel diamankan dengan pengendalian secara teknis (misal segmentasi jaringan) dan administratif;
- g) Kata sandi *default* untuk akun - akun *default* di database, server dan aplikasi telah diubah;
- h) *Penetration testing/ vulnerability assessment* dilakukan pada segmen sistem/ jaringan yang sesuai berdasarkan profil risikonya dan segala kelemahan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang disetujui;
- i) Jejak audit (*Audit trail*) di aplikasi diaktifkan dan direviu secara berkala.

2) Area Operasional TIK dan Kelangsungan Layanan

- a) Implementasi prosedur backup dan restore secara konsisten;
- b) *Service level Agreement (SLA)* atau *Operational level Agreement (OLA)* secara formal didefinisikan antara pihak - pihak terkait;
- c) Implementasi dan uji berkala atas DRP;
- d) Perencanaan kapasitas dan pemantauan utilisasi infrastruktur dan kinerja sistem yang kritis secara konsisten (termasuk performa, beban/utilisasi jaringan, deteksi gangguan, virus, performa *helpdesk*, dll);
- e) Gangguan atau insiden operational TI diidentifikasi, ditangani, direviu dan dianalisa dengan tepat waktu;
- f) Pengendalian fisik diimplementasikan secara memadai pada lingkungan data center dan fasilitas pemrosesan lainnya.

5. Pengujian Atribut Pengendalian (C1)

Pengujian atribut pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi terdapat penyimpangan tidak signifikan karena berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji Atribut Pengendalian dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut:

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian atribut pengendalian pada Kantor Pusat BKN Jakarta untuk pengambilan sampelnya sudah tepat dan wajar.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Pengujian atribut pengendalian pada Kantor Regional X BKN Denpasar tanpa penyimpangan karena berdasarkan hasil reviu, tim penilai telah menguji Atribut Pengendalian dan membuat penilaian secara wajar dengan kondisi sebagai berikut :

1) Pengujian pengendalian Pemeriksaan nota pesanan dan berita jalan oleh petugas persediaan

Berdasarkan hasil reviu dokumen nota pesanan dan berita jalan dan konfirmasi kepada tim penilai, bahwa tim penilai telah menentukan sampel dengan tepat dan pengujian atribut pengendalian yang dilakukan secara sensus.

2) Pengujian pengendalian Penggunaan aplikasi dalam pencatatan penerimaan barang

Berdasarkan hasil reviu dokumen Laporan Persediaan dari aplikasi persediaan dan konfirmasi kepada tim penilai, bahwa tim penilai telah menentukan sampel dengan tepat dan pengujian atribut pengendalian yang dilakukan secara sensus.

3) Pengujian pengendalian Pemeriksaan Fisik

Berdasarkan hasil reviu dokumen kartu Gudang dan Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan (BAOPSIK) dan konfirmasi kepada tim penilai, bahwa tim penilai telah menentukan sampel dengan tepat dan pengujian atribut pengendalian yang dilakukan secara sensus

c. Pusat Pengembangan ASN

Berdasarkan hasil pengujian pada Atribut Pengendalian, masih banyak sampel dokumen yang tidak terlampir sehingga diragukan ketepatan tim penilai dalam

menentukan sampel, dan tidak dapat diketahui kriteria yang digunakan dalam menguji keandalan atribut pengendalian.

6. Pengujian Pengendalian Aplikasi (C2)

Pengujian Pengendalian Aplikasi untuk tingkat entitas akuntansi terdapat penyimpangan tidak signifikan karena berdasarkan hasil revidu, tim penilai telah menguji Pengendalian Aplikasi dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat BKN

Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Pusat BKN Jakarta dilakukan terhadap pengendalian utama pengendalian input (*field* nilai pada aplikasi persediaan) dan Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dengan hasil pengujian “andal”. Berdasarkan Tabel A untuk pengendalian utama Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada Tabel C.2.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Regional X Denpasar dilakukan terhadap pengendalian utama Pemeriksaan jumlah penerimaan barang persediaan pada Aplikasi Persediaan, Pengendalian akses terhadap update nilai persediaan pada aplikasi persediaan saat pelaporan, Pembuatan rekap transaksi oleh operator aplikasi SIMAK BMN, Rekonsiliasi internal data BMN dengan Data Keuangan dengan hasil pengujian “andal”. Berdasarkan tabel A untuk pengendalian utama tersebut dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.2.

c. Pusat Pengembangan ASN

Pengujian Pengendalian Aplikasi pada Kantor Pusbang ASN dilakukan terhadap pengendalian utama pengendalian input (*field* nilai pada aplikasi persediaan) dan Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dengan hasil pengujian “andal”. Berdasarkan tabel A untuk pengendalian utama Rekonsiliasi (antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA) dinilai sudah memadai sehingga tidak perlu dilakukan pengujian atribut pengendalian pada tabel C.2.

7. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian

Pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian untuk tingkat entitas akuntansi terdapat penyimpangan tidak signifikan karena berdasarkan hasil revidu, tim penilai telah menguji dan membuat penilaian belum secara wajar dengan kondisi sebagai berikut:

a. Kantor Pusat BKN

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai telah wajar dalam kondisi sebagai berikut :

Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada Tabel B1, Tabel B2 telah dituangkan pada Tabel D “efektif”

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai belum secara wajar dalam kondisi sebagai berikut :

Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada tabel B1 terkait pertanyaan “Apakah terdapat tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja?” “Kelemahan tidak signifikan”, dan dituangkan pada tabel D “efektif” akan tetapi masih terdapat unsur – unsur lain pada tabel B1 yang seharusnya dimasukkan ke dalam tabel D dan diberikan usulan koreksi atas hasil pengujian serta tindak lanjut oleh manajemen.

c. Pusat Pengembangan ASN

Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian yang dilakukan oleh tim penilai telah wajar dalam kondisi sebagai berikut :

- 1) Pengujian yang dilakukan oleh Tim penilai pada tabel B1 terkait pertanyaan “Apakah jumlah pejabat/pegawai dalam suatu unit kerja telah sesuai dengan analisis beban kerja?” dengan hasil penelitian lanjutan “Kelemahan signifikan”, dan dituangkan pada tabel D “tidak efektif”.
- 2) Masih terdapat unsur – unsir lain pada Tabel B.1 yang tidak sesuai antara hasil

Reviu, Survei, dan Observasi. Pertanyaan “Apakah pemberian sanksi telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku” memiliki hasil reviu dokumen “Y” dan wawancara “T”. Pertanyaan “Apakah ada mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja?” memiliki hasil reviu dokumen “Y” dan wawancara “T”.

D. REKOMENDASI

1. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai untuk :

a. Kantor Pusat

- 1) Melakukan konfirmasi kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari awal sampai dengan akhir yang terdiri atas :
 - Perencanaan
 - Transaksi
 - Penggunaan dan pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
 - Penghapusan
 - Pelaporan.
- 2) Melakukan usulan koreksi/*feedback* terhadap proses/transaksi utama yang pengendaliannya dinilai belum memadai dan melakukan pemantauan atas usulan koreksi tersebut.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

- 1) Melakukan konfirmasi kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari awal sampai dengan akhir yang terdiri atas :
 - Perencanaan
 - Transaksi
 - Penggunaan dan pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
 - Penghapusan
 - Pelaporan.

- 2) Membuat penambahan pengendalian berupa :
 - Pemeriksaan dokumen *approval* secara berjenjang dari operator
 - Pembatasan akses terhadap operator aplikasi yang diformalkan
 - Koordinasi dan konfirmasi pengiriman ADK Transfer masuk / transfer keluar
- 3) Membuat identifikasi risiko Kesalahan penggunaan Mata Anggaran Kegiatan dan memitigasi risiko dengan pengendalian utama sebagai berikut :
 - Reviu pada saat penyusunan Anggaran
 - Verifikasi dan Validasi terhadap akunMembuat identifikasi risiko Kesalahan pencatatan jumlah barang persediaan antara bon sementara dengan aplikasi persediaan dan memitigasi risiko dengan pengendalian utama pengecekan berulang
- 4) Membuat identifikasi risiko Jumlah barang persediaan antara Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA berbeda dan memitigasi risiko dengan pengendalian utama sebagai berikut :
 - Pengendalian Akses terhadap aplikasi Persediaan
 - Operator melakukan pengecekan bertingkat
- 5) Membuat penambahan pengendalian berupa :
 - Operator melakukan pengecekan bertingkat
 - Berita acara rekonsiliasi pada dokumen pendukung

c. Pusat Pengembangan ASN

- 1) Melakukan konfirmasi kepada pemilik pengendalian terkait Identifikasi risiko, pada semua proses transaksi utama mulai dari awal sampai dengan akhir yang terdiri atas :
 - Perencanaan
 - Transaksi
 - Penggunaan dan pemanfaatan
 - Pemindahtanganan
 - Penghapusan
 - Pelaporan.
- 2) Melakukan usulan koreksi/*feedback* terhadap proses/transaksi utama yang pengendaliannya dinilai belum memadai.

- 3) Memastikan bahwa proses/transaksi utama yang akan diidentifikasi sudah sesuai dengan standar/aturan yang berlaku sehingga pengendalian yang dirancang pada risiko yang melekat pada proses/transaksi utama akan lebih efektif jika risiko dapat diidentifikasi dengan baik;
- 4) Menyusun Profil Risiko untuk semua proses/transaksi utama;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pengendalian yang telah dirancang untuk mengetahui keefektifan pengendalian tersebut dalam memitigasi risiko

2. Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai

a. Kantor Pusat

-

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Tim penilai agar melakukan pengujian dan Penilaian PITE dengan didukung bukti yang relevan seperti bukti wawancara, survei maupun observasi.

c. Pusat Pengembangan ASN

-

3. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai untuk :

a. Kantor Pusat :

Untuk hal tersebut Tim reviu merekomendasikan kepada Tim penilai agar pengujian PUTIK dilaksanakan **hanya** pada dua area berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 yaitu pada area akses logical dan area operasional TIK dan Kelangsungan Layanan secara lengkap.

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Untuk hal tersebut Tim reviu merekomendasikan kepada Tim penilai agar pengujian PUTIK dilaksanakan **hanya** pada dua area berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 yaitu pada area akses logical dan area operasional TIK dan Kelangsungan Layanan secara lengkap.

c. Pusat Pengembangan ASN

Tim penilai agar pengujian PUTIK dilaksanakan pada dua area berdasarkan PMK No 17/PMK.09/2019 yaitu pada area akses logical dan area operasional TIK dan Kelangsungan Layanan secara lengkap.

4. Pengujian Atribut Pengendalian

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai :

a. Kantor Pusat

-

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

-

c. Pusat Pengembangan ASN

- 1) Melakukan pengujian atribut pengendalian pada dokumen sampel pada Tabel C1 sesuai dengan dokumen yang tertuang pada dokumen pendukung tabel A. Tujuan pada Tabel C1 adalah untuk menguji ketepatan dokumen2 pendukung dalam pengendalian yang dirancang pada tabel A, maka dari itu dokumen yang diuji pada Tabel C1 harus selaras dengan dokumen pendukung tabel A;
- 2) Memastikan bahwa dokumen2 tersebut telah dilengkapi dengan atribut2 sebagaimana dengan yang tertuang pada tabel A. Berdasarkan hasil reuiu masih banyak dokumen yang tidak dilengkapi dengan atribut yang ditetapkan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian sehingga keandalan dokumen yang diuji dapat diyakini
- 4) Memeriksa atribut yang tertuang dalam dokumen dengan lebih teliti dan melakukan reperformance jika ditemukan dokumen dengan atribut yang tidak lengkap

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian

Untuk hal tersebut kami **merekomendasikan** tim penilai untuk :

a. Kantor Pusat

-

b. Kantor Regional X BKN Denpasar

Tim penilai agar melakukan pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian secara wajar dan didukung oleh bukti yang memadai.

c. Pusat Pengembangan ASN

Tim penilai agar melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian terkait unsur-unsur pertanyaan dengan jawaban yang bersebrangan, berdasarkan bukti-bukti yang memadai agar hasil penelitian lanjutan dapat diyakini keandalannya.

E. TINDAK LANJUT

Terhadap Rekomendasi Reviu yang diberikan Tim Penilai akan menindaklanjuti pada Penilaian PIPK berikutnya

F. Simpulan

Setelah mempertimbangkan tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Penilai PIPK maka simpulan PIPK berdampak dengan penyimpangan signifikan

Jakarta, 22 Februari 2021

Plh. Inspektur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Riyantie Sri Astuti, SE
NIP. 197712172006042003



LAMPIRAN XV
CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP.187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang perubahan kelima Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
15. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKN adalah tersusunnya sistem (norma, standar, dan prosedur) manajemen kepegawaian secara nasional. Sedangkan hasil (*outcome*) yang hendak dicapai oleh BKN adalah "Terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian Secara Nasional". *Outcome* tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan melalui berbagai program dan kegiatan dari seluruh unit/satuan kerja BKN.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Badan Kepegawaian Negara Periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kebijakan Penatausahaan atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar:

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap:

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang:

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah TPA, TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya:

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2. Kebijakan Akuntansi atas Penyusunan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 1.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

I. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditata usahakan dan dikelola oleh BKN.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun 2021 Audited ini adalah sebesar Rp4.014.796.075.085,00 (*empat triliun empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp3.950.769.706.634,00 (*Tiga triliun sembilan ratus lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Tahun 2021 Audited sebesar Rp 273.053.480.765,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*), nilai mutasi kurang sebesar Rp 209.027.112.314,00 (*dua ratus sembilan milyar dua puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tiga ratus empat belas rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited merupakan himpunan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada 16 Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1 Satker Kantor Pusat BKN Jakarta (088.01.0199.017220) dan 15 Satker Kantor Daerah yang terdiri dari:

1. Kantor Regional I BKN Yogyakarta (088.01.0400.017241)
2. Kantor Regional II BKN Surabaya (088.01.0500.450454)
3. Kantor Regional III BKN Bandung (088.01.0200.017237)
4. Kantor Regional IV BKN Makassar (088.01.1900.560635)
5. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta (088.01.0100.606254)
6. Kantor Regional VI BKN Medan (088.01.0700.606261)
7. Kantor Regional VII BKN Palembang (088.01.1100.622372)
8. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin (088.01.1500.622386)
9. Kantor Regional IX BKN Jayapura (088.01.2500.622390)
10. Kantor Regional X BKN Denpasar (088.01.2200.667882)
11. Kantor Regional XI BKN Manado (088.01.1751.667896)
12. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru (088.01.0900.667901)
13. Kantor Regional XIII BKN Aceh (088.01.0600.667752)
14. Kantor Regional XIV BKN Manokari (088.01.3300.667652)
15. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (088.01.0200.020505)

Laporan BMN ini disusun menggunakan system aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca.
2. Laporan Barang Persediaan.
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan).
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
5. Laporan Aset Tak Berwujud (ATB).
6. Laporan Barang Bersejarah.
7. Laporan Kondisi Barang.
8. Laporan Penyusutan.
9. Laporan Barang Rusak Berat.
10. Laporan Barang Hilang.
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Intemal SAK-SIMAK pada Badan Kepegawaian Negara.
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN.
15. Arsip Data Komputer (ADK).

II. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2021 Audited

Nilai BMN per 01 Januari 2021 Audited adalah sebesar Rp3.950.769.706.634,00 (*tiga triliun sembilan ratus lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp3.949.012.125.670,00 (*tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar dua belas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp1.757.580.964,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebagai berikut:

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2021 Audited sebesar Rp10.159.232.764,00 (*sepuluh milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) terdiri atas Saldo awal sebesar Rp11.732.536.375,00 (*Sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp 1.573.303.611,00 (*satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga*

juta tiga ratus tiga ribu enam ratus sebelas rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Mutasi barang persediaan

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111 Barang Konsumsi	Rp 10.141.036.187,00	Rp 1.265.593.022,00	Rp 8.875.443.165,00
117113 Bahan Pemeliharaan	Rp 606.908.833,00	Rp 159.799.983,00	Rp 447.108.850,00
117114 Suku Cadang	Rp 10.534.227,00	Rp 2.434.527,00	Rp 8.099.700,00
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -
117128 Barang Persediaan Lainnya Untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
117131 Bahan Baku	Rp 53.156.848,00	Rp 22.564.205,00	Rp 30.592.643,00
117199 Persediaan Lainnya	Rp 920.900.280,00	Rp 122.911.874,00	Rp 797.988.406,00
JUMLAH	Rp 11.732.536.375,00	Rp 1.573.303.611,00	Rp 10.159.232.764,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang dari aplikasi Persediaan masing-masing satuan kerja adalah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp29.066.050,00 (*dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh rupiah*).

a. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited seluas 568.468 m² sebesar Rp2.309.435.980.187,00 (*Dua triliun tiga ratus sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 499.843 m² sebesar Rp2.302.109.905.449,00 (*Dua triliun tiga ratus dua milyar seratus sembilan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*). Mutasi tambah seluas 70.805 m² dengan nilai sebesar Rp7.863.728.506,00 (*tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah*), mutasi kurang seluas 2.184 m² dengan nilai sebesar Rp537.653.768,00 (*lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Hibah (Masuk)	Rp 2.216.274.738,00	Rp -	Rp 2.216.274.738,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 537.653.768,00	Rp -	Rp 537.653.768,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 24.710.000,00	Rp -	Rp 24.710.000,00
Pengembangan Melalui KDP	Rp 5.085.090.000,00	Rp -	Rp 5.085.090.000,00
Jumlah	Rp 7.863.728.506,00	Rp -	Rp 7.863.728.506,00

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp (537.653.768,00)	-	Rp (537.653.768,00)
Jumlah	Rp (537.653.768,00)	-	Rp (537.653.768,00)

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 m² bidang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	568.468	2.309.435.980.187
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m²/Rp0,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ ditatausahakan oleh Badan Kepegawaian Negara yaitu:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Sengketa	-	0,00
Tidak terdapat bukti kepemilikan	-	0,00
Dikuasai pihak lain	6.861	Rp89.122.794.250,00

Dengan penjelasan sebagai berikut

b.1. Tanah yang digunakan pihak lain terdiri atas:

b.1.1. Tanah dihuni pensiunan pegawai Kanreg I BKN Yogyakarta di Kampung

Sapen GK.I/445 seluas 619 m² dengan nilai sebelum revaluasi BMN senilai Rp.427,110,000,00 nilai setelah di revaluasi sebesar Rp3.037.866.000,00 serta tanah di Kampung Gendeng GK/IV 707 seluas 1,869 m² dengan nilai sebelum revaluasi BMN senilai Rp.1.214.850.000,00 dan nilai setelah revaluasi BMN senilai Rp.7.906.640.000,00

- b.1.2 Terdapat Pemanfaatan tanah seluas 4.060 m² untuk 15 (lima belas) Unit Rumah Negara Golongan II Tidak Sesuai dengan Ketentuan pada Kantor Pusat BKN Jakarta senilai Rp77.478.342.000,00 yang beralamat di Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat dihuni oleh pensiunan dan keluarga almarhum pensiunan.
- b.1.3 Pada Kanreg II BKN Surabaya terdapat tanah seluas 127 m² senilai Rp284.003.750,00 yang dihuni oleh Nurchasanah dan tanah seluas 186 m² senilai Rp415.942.500,00 yang dihuni oleh I Putu Adnyana, S.H. Kedua tanah tersebut telah dilakukan pelepasan dan penyerahan dengan diterbitkannya 2 SHM dengan No 1201 dan No 1202, namun atas kedua pelepasan tersebut masih belum dapat dikeluarkan dari pencatatan Aplikasi SIMAK-BMN karena masih dalam proses koordinasi dan konsultasi dengan BKN Pusat, KPKNL Surabaya dan Instansi serta pihak-pihak terkait.

Selain itu terdapat hibah tanah seluas 50.000 m² dari Pemerintah Kabupaten Sorong Pada hari Rabu, 28 September 2016 sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 800/416/ADPEM/2018 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 dengan nilai Rp2.150.000.000,00 (*Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*,) tetapi Tanah hibah tersebut belum memiliki sertifikat tanah karena masih dalam pengurusan oleh Pemkab Sorong. Tahun 2017 Pemkab Sorong mencabut Hibah Tanah seluas 50.000 m² sesuai dengan SK Bupati Sorong Nomor: 012.5/KEP.173/IV/TAHUN 2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 800/415/KEP ADPEM/2016 tentang hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Sorong untuk Kantor Regional XIV BKN dan atau Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN yang isinya tanahnya akan dipindahkan ke lokasi berbeda. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sorong menghibahkan Tanah Pengganti untuk Kantor Regional XIV BKN Manokwari yang berlokasi di Aimas-Kab Sorong dengan luas 30.000 m² dengan nilai Rp4.600.000.000,- (*Empat milyar enam ratus juta rupiah*) sesuai dengan BAST Hibah Tanah Nomor: 34/A/KS/IX/2020 tanggal 24 September 2020 antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Badan Kepegawaian Negara disertai dengan penyerahan Sertifikat Tanah sebanyak dua sertifikat rincian 1

(satu) sertifikat seluas 20.000 m² dengan No. 33.02.06.01.4.00033 dan 1 (satu) sertifikat seluas 10.000 m² dengan No.33.02.06.01.4.00034 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Kepegawaian Negara.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 69.257 unit/buah sebesar Rp 609.500.991.813,00 (*enam ratus sembilan milyar lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 68.307 unit/buah sebesar Rp570.172.704.282,00 (*lima ratus tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*), mutasi tambah sejumlah 3.119 unit/buah sebesar Rp 58.057.137.267,00 (*lima puluh delapan milyar lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 2.169 unit/buah sebesar Rp 18.700.735.786,00 (*delapan belas milyar tujuh ratus juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

c.1. Alat Besar (3.01);

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited dengan jumlah 209 unit sebesar Rp37.617.120.241,00 (*tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sejumlah 171 unit sebesar Rp 33.431.417.106,00 (*tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu seratus enam rupiah*) mutasi tambah 47 unit dengan nilai sebesar Rp 5.134.776.660,00 (*lima milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah*) dan mutasi kurang 9 unit dengan nilai sebesar Rp 949.073.525,00 (*sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 4.681.403.660,00	Rp -	Rp 4.681.403.660,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 357.650.500,00	Rp -	Rp 357.650.500,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 95.722.500,00	Rp -	Rp 95.722.500,00
Jumlah	Rp 5.134.776.660,00	Rp -	Rp 5.134.776.660,00

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	Rp -		Rp -
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp 949.073.525,00		Rp 949.073.525,00
Jumlah	Rp 949.073.525,00		Rp 949.073.525,00

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	200	Rp 36,760,288,887.00
Rusak Ringan	1	Rp 3,480,329.00
Rusak Berat	8	Rp 853,351,025

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp 949.073.525,00 (*sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).

c.2. Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 299 unit sebesar Rp 35.293.467.558,00 (*tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total sejumlah 308 unit sebesar Rp 38.158.850.370,00 (*tiga puluh delapan milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) mutasi tambah sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp 643.684.488,00 (*enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 22 unit dengan nilai sebesar Rp 3.509.067.300, 00 (*tiga milyar lima ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 65.824.488,00	Rp -	Rp 65.824.488,00
Hibah Masuk	Rp 577.860.000,00	Rp -	Rp 577.860.000,00
Jumlah	Rp 643.684.488,00	Rp -	Rp 643.684.488,00

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (3.509.067.300,00)	Rp -	Rp (3.509.067.300,00)
Jumlah	Rp (3.509.067.300,00)	Rp -	Rp (3.509.067.300,00)

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	299	Rp 30,647,769,458
Rusak Ringan	7	Rp 1,136,630,800
Rusak Berat	22	Rp 3,509,067,300

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 22 unit dengan nilai sebesar Rp3.509.067.300,00 (*tiga milyar lima ratus sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*).

c.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 75 unit sebesar Rp5.436.722.820,00 (*lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 69 unit sebesar Rp5.138.549.785,00 (*lima milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*) mutasi tambah sejumlah 6 unit dengan nilai sebesar Rp298.173.035,00 (*dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 100.090.035,00	Rp 446.000,00	Rp 100.536.035,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 197.637.000,00	Rp -	Rp 197.637.000,00
Jumlah	Rp 297.727.035,00	Rp 446.000,00	Rp 298.173.035,00

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
-	-	-	-

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	75	Rp5.436.722.820,00
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	-	Rp -

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional adalah 0 unit/ Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.4. Alat Pertanian (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 6 buah sebesar Rp49.107.300,00 (*Empat puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 7 buah sebesar Rp199.807.300,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 1 buah dengan nilai sebesar Rp150.700.000,00 (*Seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi Kurang Alat Pertanian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari penggunaannya	150.700.000	-	-
Jumlah	150.700.000		

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Pertanian diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	49,107,300.00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	1	150,700,000.00

Kelompok barang Alat Pertanian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 buah dengan nilai sebesar Rp150.700.000,00 (*Seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

c.5. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 51.831 unit/buah sebesar Rp 221.006.243.963,00 (*dua ratus dua puluh satu milyar enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 51.565 unit/buah sebesar Rp217.603.835.525,00 (*dua ratus tujuh belas milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 1.686 unit/buah dengan nilai sebesar Rp 7.769.760.601,00 (*tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus satu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 1.420 unit/buah dengan nilai sebesar Rp 4.367.352.163,00 (*empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Saldo Awal	Rp -	Rp 89.680.000,00	Rp 89.680.000,00
Pembelian	Rp 7.115.149.441,00	Rp 223.157.600,00	Rp 7.338.307.041,00
Transfer Masuk	Rp 7.590.000,00	Rp -	Rp 7.590.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 67.775.000,00	Rp 7.521.360,00	Rp 75.296.360,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 258.887.200,00	Rp -	Rp 258.887.200,00
Jumlah	Rp 7.449.401.641,00	Rp 320.358.960,00	Rp 7.769.760.601,00

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp 7.888.750,00	Rp -	Rp 7.888.750,00
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 58.425.000,00	Rp 7.521.360,00	Rp 65.946.360,00
Penghapusan	Rp 1.650.000,00	Rp -	Rp 1.650.000,00
Transfer Keluar	Rp 7.590.000,00	Rp -	Rp 7.590.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp 4.284.277.053,00	Rp -	Rp 4.284.277.053,00
Jumlah	Rp 4.359.830.803,00	Rp 7.521.360,00	Rp 4.367.352.163,00

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	51.333	Rp 220.732.833.761,00
Rusak Ringan	498	Rp 273.410.202,00
Rusak Berat	1.365	Rp 4.284.277.053,00

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1,365 unit/buah sebesar Rp4.284.277.053,00 (*empat milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah*).

c.6. Alat Studio, Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 2.037 unit/buah sebesar Rp33.445.306.861,00 (*tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebesar 2.008 unit/buah sebesar Rp 32.244.786.376,00 (*tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 132 buah dengan nilai sebesar Rp2.434.089.520,00 (*dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 103 buah dengan nilai sebesar Rp1.233.569.035,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 2.303.343.061,00	Rp 11.896.459,00	Rp 2.315.239.520,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 17.100.000,00	Rp -	Rp 17.100.000,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 101.750.000,00	Rp -	Rp 101.750.000,00
Jumlah	Rp 2.422.193.061,00	Rp 11.896.459,00	Rp 2.434.089.520,00

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp (17.100.000,00)	Rp -	Rp (17.100.000,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (1.215.769.035,00)	Rp (700.000,00)	Rp (1.216.469.035,00)
Jumlah	Rp (1.232.869.035,00)	Rp (700.000,00)	Rp (1.233.569.035,00)

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2,197	Rp 32,158,881,926.00
Rusak Ringan	9	Rp 69,955,900.00
Rusak Berat	101	Rp 1,216,469,035.00

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sejumlah 101 buah senilai Rp1,216,469,035.00 (*satu milyar dua ratus enam belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah*).

c.7. Alat Kedokteran dan Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 544 buah sebesar Rp 1.051.978.202,00 (*satu milyar lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 556 buah sebesar Rp 848.505.320,00 (*delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 14 buah dengan nilai sebesar Rp 223.558.032,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 26 buah dengan nilai sebesar Rp 20.085.150,00 (*dua puluh juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 222.519.632,00	Rp 1.038.400,00	Rp 223.558.032,00
Jumlah	Rp 222.519.632,00	Rp 1.038.400,00	Rp 223.558.032,00

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp 19.566.500,00	Rp 518.650,00	Rp 20.085.150,00
Jumlah	Rp 19.566.500,00	Rp 518.650,00	Rp 20.085.150,00

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	518	Rp 1.031.893.052,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	26	Rp20.085.150,00

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 26 buah sebesar Rp20,085,150.00 (*dua puluh juta delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*).

c.8. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 136 buah sebesar Rp5.966.518.494,00 (*lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 141 buah sebesar Rp5.731.980.994,00 (*lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 20 buah dengan nilai sebesar Rp258.912.500,00 (*dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 25 buah dengan nilai sebesar Rp24.375.000,00 (*dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 90.849.000,00	Rp -	Rp 90.849.000,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 168.063.500,00	Rp -	Rp 168.063.500,00
Jumlah	Rp 258.912.500,00	Rp -	Rp 258.912.500,00

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp 24.375.000	Rp -	Rp 24.375.000
Jumlah	Rp 24.375.000	Rp -	Rp 24.375.000

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	111	Rp 5,942,143,494.00
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	25	Rp 24,375,000.00

Kelompok barang Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 25 buah sebesar Rp24.375.000,00 (*dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

c.9. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 14.022 buah sebesar Rp267.123.246.274,00 (*dua ratus enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 13.384 buah sebesar Rp233.925.580.596,00 (*dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 1.200 buah dengan nilai sebesar Rp41.215.323.431,00 (*empat puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 562 buah dengan nilai sebesar Rp8.017.657.753,00 (*delapan milyar tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 29.324.812.276,00	Rp 13.438.500,00	Rp 29.338.250.776,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 24.376.000,00	Rp -	Rp 24.376.000,00
Transfer Masuk	Rp 3.667.506.980,00	Rp -	Rp 3.667.506.980,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 8.002.468.700,00	Rp -	Rp 8.002.468.700,00
Perolehan Lainnya	Rp -	Rp 20.225.200,00	Rp 20.225.200,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 162.152.900,00	Rp -	Rp 162.152.900,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	Rp -	Rp 342.875,00	Rp 342.875,00
Jumlah	Rp 41.181.316.856,00	Rp 34.006.575,00	Rp 41.215.323.431,00

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	Rp 3.642.706.980,00	Rp -	Rp 3.642.706.980,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp 4.164.914.098,00	Rp -	Rp 4.164.914.098,00
Penghapusan	Rp 27.315.700,00	Rp -	Rp 27.315.700,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp 20.225.200,00	Rp -	Rp 20.225.200,00
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 162.152.900,00	Rp -	Rp 162.152.900,00
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	Rp -	Rp -	Rp -
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	Rp 342.875,00	Rp -	Rp 342.875,00
Jumlah	Rp 8.017.657.753,00	Rp -	Rp 8.017.657.753,00

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	14.022	Rp 267.123.246.274,00
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	412	Rp 4.164.914.098,00

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 412 buah sebesar Rp4.164.914.098,00 (*empat milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

c.10. Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 58 buah sebesar Rp2.248.578.500,00 (*Dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 57 buah sebesar Rp2.169.719.500,00 (*Dua milyar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 1 buah dengan nilai sebesar Rp78.859.000,00 (*Tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 78.859.000,00		Rp 78.859.000,00
Jumlah	Rp 78.859.000,00	Rp -	Rp 78.859.000,00

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transfer Keluar	Rp -		Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	58	Rp 2.248.578.500,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Keselamatan Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.11. Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 8 buah sebesar Rp54.978.600,00 (*Lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 9 buah sebesar Rp511.948.410,00 (*Lima ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 1 buah dengan nilai sebesar Rp456.969.810,00 (*Empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp -	-	Rp -
Jumlah	Rp -	-	Rp -

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp 456.969.810,00	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 456.969.810,00	Rp -	Rp -

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	Rp 54,978,600.00
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	1	Rp 456,969,810.00

Kelompok barang Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit senilai Rp456.969.810,00 (Empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

c.12. Rambu – Rambu (3.18)

Saldo Rambu - Rambu pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 26 unit sebesar Rp152.965.000,00 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas Saldo awal total jumlah barang sebanyak 26 unit sebesar Rp152.965.000,00 (*seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Mutasi Kurang Rambu – Rambu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*),

sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Rambu – Rambu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	26	Rp 152.965.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Rambu - Rambu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.13. Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Peralatan Olah Raga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 6 buah sebesar Rp54.758.000,00 (*Lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 6 buah dengan nilai sebesar Rp54.758.000,00 (*Lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	6	Rp 54.758.000,00
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	-	Rp -

Kelompok barang Peralatan Olah Raga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

c.16. Akumulasi Penyusutan

Tabel 3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

KODE	URAIAN	PENYUSUTAN					
		INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABLE	GABUNGAN		
30103	ALAT BANTU	Rp	25.988.371.051	Rp	1.965.500	Rp	25.990.336.551
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Rp	26.422.795.986	Rp	-	Rp	26.422.795.986
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK	Rp	155.545.376	Rp	3.024.920	Rp	158.570.296
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	Rp	4.878.832.281	Rp	-	Rp	4.878.832.281
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Rp	105.345.630	Rp	2.673.840	Rp	108.019.470
30303	ALAT UKUR	Rp	20.788.550	Rp	462.000	Rp	21.250.550
30401	ALAT PENGOLAHAN	Rp	46.585.550	Rp	-	Rp	46.585.550
30501	ALAT KANTOR	Rp	78.809.251.237	Rp	33.899.350	Rp	78.843.150.587
30502	ALAT RUMAH TANGGA	Rp	124.025.452.592	Rp	1.126.389.246	Rp	125.151.841.838
30601	ALAT STUDIO	Rp	22.966.617.526	Rp	11.930.530	Rp	22.978.548.056
30602	ALAT KOMUNIKASI	Rp	4.828.467.189	Rp	68.680.094	Rp	4.897.147.283
30603	PERALATAN PEMANCAR	Rp	828.619.760	Rp	-	Rp	828.619.760
30701	ALAT KEDOKTERAN	Rp	677.971.200	Rp	12.570.030	Rp	690.541.230
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	Rp	31.637.800	Rp	1.419.000	Rp	33.056.800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	Rp	5.117.480.654	Rp	1.557.126	Rp	5.119.037.780
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM	Rp	-	Rp	-	Rp	-
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Rp	1.861.650	Rp	-	Rp	1.861.650
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Rp	9.326.429	Rp	-	Rp	9.326.429
30807	PERALATAN LABORATORIUM	Rp	-	Rp	-	Rp	-
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI	Rp	-	Rp	825.000	Rp	825.000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Rp	-	Rp	-	Rp	-
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-
31001	KOMPUTER UNIT	Rp	78.477.617.887	Rp	-	Rp	78.477.617.887
31002	PERALATAN KOMPUTER	Rp	143.463.088.461	Rp	106.384.563	Rp	143.569.473.024
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Rp	-	Rp	-	Rp	-
31502	ALAT PELINDUNG	Rp	-	Rp	-	Rp	-
31503	ALAT SAR	Rp	1.628.967.126	Rp	-	Rp	1.628.967.126
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	Rp	7.885.900	Rp	-	Rp	7.885.900
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Rp	26.458.488	Rp	-	Rp	26.458.488
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Rp	138.788.578	Rp	12.900.000	Rp	151.688.578
31901	PERALATAN OLAH RAGA	Rp	54.758.000	Rp	-	Rp	54.758.000
JUMLAH		Rp	518.712.514.901,00	Rp	1.384.681.199,00	Rp	520.097.196.100,00

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 478 unit sebesar Rp841.382.683.975,00 (*delapan ratus empat puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 464 unit sebesar Rp833.851.736.323,00 (*delapan ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*) mutasi tambah 20 unit sebesar Rp8.808.858.392,00 (*delapan milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang 6 unit sebesar Rp 1.277.910.740,00 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

d.1. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebanyak 448 unit sebesar Rp827.845.036.609,00 (*delapan ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 436 unit sebesar Rp821.220.171.357,00 (*Delapan ratus dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 18 unit sebesar Rp7.902.775.992,00 (*tujuh milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*) dan mutasi kurang 6 unit sebesar Rp1.277.910.740,00 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Saldo Awal	Rp 129.160.000,00	Rp -	Rp 129.160.000,00
Pembelian	Rp 25.638.400,00	Rp -	Rp 25.638.400,00
Hibah Masuk	Rp 1.366.909.000,00	Rp -	Rp 1.366.909.000,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 2.151.651.567,00	Rp -	Rp 2.151.651.567,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 576.220.908,00	Rp -	Rp 576.220.908,00
Reklasifikasi Masuk	Rp 1.040.878.000,00	Rp -	Rp 1.040.878.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp 1.711.093.772,00	Rp -	Rp 1.711.093.772,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 373.114.500,00	Rp -	Rp 373.114.500,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 237.032.740,00	Rp -	Rp 237.032.740,00
Pengembangan Melalui KDP	Rp 291.077.105,00	Rp -	Rp 291.077.105,00
Jumlah	Rp 7.773.615.992,00	Rp -	Rp 7.902.775.992,00

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Keluar	Rp 1.040.878.000,00	Rp -	Rp 1.040.878.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 237.032.740,00	Rp -	Rp 237.032.740,00
Jumlah	Rp 1.277.910.740,00	Rp -	Rp 1.277.910.740,00

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	416	818.835.488.012
Rusak Ringan	32	9.009.548.597
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.2. Candi/Tugu Peringatan/Prasasti (4.02)

Saldo Candi/Tugu Peringatan/Prasasti pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 5 unit/buah sebesar Rp51.419.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Mutasi Kurang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	51.419.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Candi/Tugu Peringatan/Prasasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.3. Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebanyak 25 unit/buah sebesar Rp 13.486.228.366,00 (*tiga belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 23 unit/buah sebesar Rp12.580.145.966,00 (*Dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*), mutasi tambah sejumlah 2 unit/buah dengan nilai sebesar Rp 906.082.400,00 (*tujuh ratus sepuluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0.00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 499.327.000	Rp -	Rp 499.327.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 210.805.800	Rp -	Rp 210.805.800
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 195.949.600	Rp -	Rp 195.949.600,00
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi kesalahan input IP	Rp -		Rp -
Jumlah	Rp 906.082.400,00	Rp -	Rp 906.082.400,00

Mutasi Kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	19	12.719.651.741
Rusak Ringan	6	766.576.625
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Tugu/Tanda Batas yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

d.4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 98.502.200.147,00
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp 12.490.011.258,00
4.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Rp 4.919.564,00
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	Rp 1.365.893.923,00
	JUMLAH	Rp 112.363.024.892,00

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebanyak 53.485 m² sebesar Rp23.958.841.060,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 53.484 m² sebesar Rp22.986.611.820,00 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah*), mutasi tambah 1 m² sebesar Rp972.229.240,00 (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 m² sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

e.1. Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 53.426 m² sebesar Rp16.124.321.000,00 (*Enam belas milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 53.426 m² sebesar Rp16.124.321.000,00 (*Enam belas milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi semu hasil Koreksi hasil Revaluasi		Rp -	
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi Pencatatan	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi semu hasil Koreksi hasil Revaluasi	Rp -		Rp -
Koreksi BMN ditemukan kembali	Rp -		Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m²dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m²dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	48356	15,287,298,000.00
Rusak Ringan	5,070	837,023,000.00
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.2. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 27 unit sebesar Rp2.764.941.783,00 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 27 unit sebesar Rp2.764.941.783,00 (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*) mutasi tambah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah unit 0 m² dengan nilai sebesar Rp.00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi Kesalahan input IP	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp -

Mutasi Kurang Irigasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Irigasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	25	Rp 2,444,192,783.00
Rusak Ringan	1	Rp 274,924,000.00
Rusak Berat	1	Rp 825,000.00

Kelompok barang irigasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.3. Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 13 unit dengan nilai sebesar Rp2.872.217.560,00 (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp1.899.988.320,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), mutasi tambah sebanyak 1 unit sebesar Rp972.229.240,00 (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 802.655.000,00	Rp -	Rp 802.655.000,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 169.574.240,00	Rp -	Rp 169.574.240,00
Jumlah	Rp 972.229.240,00	Rp -	Rp 972.229.240,00

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	13	2,872,217,560.00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.4. Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 19 unit sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 19 unit dengan nilai sebesar Rp2.197.360.717,00 (*Dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)

Dari jumlah Jaringan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	19	Rp 2.197.360.717
Rusak Ringan	-	Rp -
Rusak Berat	-	Rp -

Kelompok Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (*Nol rupiah*).

e.5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel5. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

JALAN DAN JEMBATAN		Rp 14.517.033.943,00
5.01.01	Jalan	Rp 14.516.784.715,00
5.01.02	Jembatan	Rp 249.228,00
IRIGASI		Rp 560.788.775,00
5.02.01	Bangunan Air Irigasi	Rp 21.448.477,00
5.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Rp 17.391.078,00
5.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Rp 6.571.400,00
5.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Rp 394.225.388,00
5.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp 68.997.042,00
5.02.07	Bangunan Air Kotor	Rp 52.155.390,00
JARINGAN		Rp 2.094.937.122,00
5.03.01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	Rp 181.172.663,00
5.03.06	Instalasi Gardu Listrik	Rp 163.414.922,00
5.03.10	Instalasi Lain	Rp 951.173.820,00
5.04.01	Jaringan Air Minum	Rp 53.651.024,00
5.04.02	Jaringan Listrik	Rp 705.917.437,00
5.04.03	Jaringan Telepon	Rp 39.607.256,00
JUMLAH		Rp 17.172.759.840,00

f. Aset Tetap Dalam Renovasi

f.1. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (6.07)

Saldo Gedung dan Bangunan dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 29 unit/buah sebesar Rp17.738.647.198,00 (*tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 28 unit/buah sebesar

Rp11.837.310.298,00 (*Sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah sejumlah mutasi tambah sejumlah 25 unit/buah sebesar Rp 15.828.414.120,00 (*lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 24 unit/buah sebesar Rp 9.927.077.220,00 (*sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 2.515.003.869,00	Rp -	Rp 2.515.003.869,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 12.769.391.584,00	Rp -	Rp 12.769.391.584,00
Transaksi Semu Perolehan K3 - Aktif	Rp 432.104.317,00	Rp -	Rp 432.104.317,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 111.914.350,00	Rp -	Rp 111.914.350,00
Jumlah	Rp 15.828.414.120,00	Rp -	Rp 15.828.414.120,00

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Intrakomptabel (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 8.824.246.559,00	Rp -	Rp 8.824.246.559,00
Koreksi Pencatatan	Rp 670.726.344,00	Rp -	Rp 670.726.344,00
Transaksi Semu Penghapusan K3 - Aktif	Rp 432.104.317,00	Rp -	Rp 432.104.317,00
Jumlah	Rp 9.927.077.220,00	Rp -	Rp 9.927.077.220,00

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah sebanyak 0 unit/buah kuantitas dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	26	Rp 15,474,895,426
Rusak Ringan	3	Rp 2,263,751,772
Rusak Berat	-	-

Kelompok Gedung dan Bangunan dalam Renovasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

f.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Tabel 6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.07.02	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Rp -
6.07.03	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Rp 1.728.710.709,00
6.07.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Rp 89.672.000,00
	Jumlah	Rp 1.818.382.709,00

g. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited sejumlah 11.959 sebesar Rp1.795.812.895,00 (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal 11.963 sebesar Rp 1.787.852.595,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 27 buah sebesar Rp21.030.000,00 (*dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 31 buah sebesar Rp13.069.700,00 (*tiga belas juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

g.1. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 11.932 buah sebesar Rp1.669.732.895,00 (*satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 11.936 buah sebesar Rp1.667.252.595,00 (*Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) mutasi tambah sejumlah 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.750.000,00 (*dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 5 buah dengan nilai sebesar Rp269.700,00 (*dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 2.750.000,00	Rp -	Rp 2.750.000,00
Jumlah	Rp 2.750.000,00	Rp -	Rp 2.750.000,00

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp 269.700,00	Rp -	Rp 269.700,00
Jumlah	Rp 269.700,00	Rp -	Rp 269.700,00

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	11,927	Rp 1,667,033,195
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	5	269,700.00

Kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 5 buah sebesar Rp269.700,00 (*dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

g.2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (6.02);

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 27 buah sebesar Rp126.080.000,00 (*seratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 27 buah sebesar Rp120.600.000,00 (*Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 26 buah dengan nilai sebesar Rp18.280.000,00 (*delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 26 buah dengan nilai sebesar Rp 12.800.000,00 (*minus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Pembelian	Rp 7.480.000,00	Rp -	Rp 7.480.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 10.800.000,00	Rp -	Rp 10.800.000,00
Jumlah	Rp 18.280.000,00	Rp -	Rp 18.280.000,00

Mutasi Kurang Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 8.800.000,00	Rp -	Rp 8.800.000,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp 4.000.000,00	Rp -	Rp 4.000.000,00
Jumlah	Rp 12.800.000,00	Rp -	Rp 12.800.000,00

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00.

Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	27	126,080,000.00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

g.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Kode	Uraian	Akumulasi Penyusutan (Rp)
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00
6.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00
6.02.01	Barang Bercorak Kesenian	29.800.000,00
6.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
	JUMLAH	29.800.000,00

h. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebesar Rp1.470.688.262,00 (*satu milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp224.384.887,00 (*Dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp19.496.624.757,00 (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp18.250.321.382,00 (*delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).

Mutasi Tambah KDP tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Perolehan/Penambahan KDP	Rp 599.167.375,00
Pengembangan KDP	Rp 13.910.597.382,00
Hibah Masuk KDP	Rp 4.986.860.000,00
Jumlah	Rp 19.496.624.757,00

Mutasi Kurang KDP tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi	Rp 18.250.321.382,00
Jumlah	Rp 18.250.321.382,00

i. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebesar Rp 199.353.196.931,00 (*seratus sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp196.066.664.605,00 (*seratus sembilan puluh enam milyar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 162.643.298.483,00 (*seratus enam puluh dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp 159.356.766.157,00 (*minus seratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*)

i.1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

i.2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 283 unit/buah sebesar Rp142.393.801.295,00 (*seratus empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah

tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 308 unit/buah sebesar Rp150.148.317.195,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 16 unit/buah dengan nilai sebesar Rp117.820.291.048,00 (*seratus tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 41 unit/buah dengan nilai sebesar Rp125.574.806.948,00 (*seratus dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:

i.2.1 Hak Cipta

Saldo Hak Cipta pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hak Cipta tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Dari jumlah Hak Cipta di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp,00 (*Nol rupiah*).

Hak Cipta yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

i.2.2 Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 280 unit/buah sebesar Rp 142.158.642.445,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*). Jumlah

tersebut terdiri atas saldo awal 305 unit/buah sebesar Rp149.913.158.345,00 (*Seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*), mutasi tambah sejumlah 16 unit/buah dengan nilai sebesar Rp117.820.291.048,00 (*seratus tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 41 unit/buah dengan nilai sebesar Rp125.574.806.948,00 (*seratus dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Pembelian	Rp 1.022.246.500,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 767.000.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp 141.455.000,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 114.040.524.048,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp 1.849.065.500,00
Jumlah	Rp 117.820.291.048,00

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp 95.743.829.434,00
Penghapusan	Rp 555.170.750,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp 29.275.806.764,00
Jumlah	Rp 125.574.806.948,00

Dari jumlah Software di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Software yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 25 unit/buah sebesar Rp29.275.806.764,00 (*minus dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*).

i.2.3 Lisensi

Saldo Lisensi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp39.658.850,00 (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima*

puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp39.658.850,00 (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-

Mutasi Kurang Lisensi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	-

Dari jumlah Lisensi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp,00 (*Nol rupiah*).

Lisensi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

i.2.3 Hasil Kajian Penelitian

Saldo Hasil Kajian Penelitian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 1 unit/buah sebesar Rp195.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar 1 unit/buah sebesar Rp195.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh lima juta rupiah*) mutasi tambah sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Hasil Kajian Penelitian tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
	-

Dari jumlah Hasil Kajian Penelitian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit/buah dengan nilai sebesar Rp,00 (*Nol rupiah*).

Hasil Kajian Penelitian yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/buah sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

i.3. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sejumlah 1.482 unit/buah sebesar Rp 56.959.395.636,00 (*lima puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 1.146 unit/buah sebesar Rp45.918.347.410,00 (*empat puluh lima milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah*), mutasi tambah sejumlah 1.996 buah/unit dengan nilai sebesar Rp 44.056.007.435,00 (*empat puluh empat milyar lima puluh enam juta tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 1.660 buah/unit dengan nilai sebesar Rp 33.014.959.209,00 (*minus tiga puluh tiga milyar empat belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*)

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 44.053.570.135,00	Rp 1.218.650,00	Rp 44.054.788.785,00

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	Rp 18.403.767.114,00	Rp -	Rp 18.403.767.114,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp 14.449.643.670,00	Rp 20.093.425,00	Rp 14.469.737.095,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp 141.455.000,00	Rp -	Rp 141.455.000,00

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited per golongan barang adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Golongan Barang		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 9.608.315.272,00	Rp 700.000,00	Rp 9.609.015.272,00
2.	Aset Tak Berwujud	Rp 47.350.380.364,00		Rp 47.350.380.364,00
JUMLAH		Rp 56.958.695.636,00	Rp 700.000,00	Rp 56.959.395.636,00

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah adalah :

Tabel 9. Akumulasi Penyusutan BMN yang telah dihentikan penggunaannya

Kode	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
30103	ALAT BANTU	Rp 804.397.087,00	Rp -
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Rp 414.560.000,00	Rp -
30401	ALAT PENGOLAHAN	Rp 150.700.000,00	Rp -
30501	ALAT KANTOR	Rp 790.662.129,00	Rp -
30502	ALAT RUMAH TANGGA	Rp 1.872.461.660,00	Rp -
30601	ALAT STUDIO	Rp 981.344.288,00	Rp 490.000,00
30602	ALAT KOMUNIKASI	Rp 530.572.400,00	Rp -
30701	ALAT KEDOKTERAN	Rp 18.604.000,00	Rp -
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	Rp 460.560.894,00	Rp -
31001	KOMPUTER UNIT	Rp 2.384.824.178,00	Rp -
31002	PERALATAN KOMPUTER	Rp 938.580.409,00	Rp -
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Rp 27.925.758,00	Rp -
80101	ASET TAK BERWUJUD	Rp 46.688.855.240,00	Rp -
JUMLAH		Rp 56.064.048.043,00	Rp 490.000,00

1. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited

a. Barang Milik Negara per Akun Neraca

Nilai BMN Intrakomptabel pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebesar Rp4.012.698.362.512,00 (*empat triliun dua belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Penyajian nilai BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET LANCAR						
1	Persediaan	Rp 10.159.232.764	0,25	Rp -	0,00	Rp 10.159.232.764	0,25
	Sub Jumlah (1)	Rp 10.159.232.764	0,25	Rp -	0,00	Rp 10.159.232.764	0,25
II	ASET TETAP						
1	Tanah	Rp2.309.435.980.187	57,55	Rp -	0,00	Rp2.309.435.980.187	57,52
2	Peralatan Mesin	Rp 607.409.829.240	15,14	Rp2.091.162.573	0,00	Rp 609.500.991.813	15,18
3	Gedung & Bangunan	Rp 841.376.833.975	20,97	Rp 5.850.000	0,00	Rp 841.382.683.975	20,96
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 23.958.841.060	0,60	Rp -	0,00	Rp 23.958.841.060	0,60
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 1.795.812.895	0,04	Rp -	0,00	Rp 1.795.812.895	0,04
6	ATR	Rp 17.738.647.198	0,44	Rp -	0,00	Rp 17.738.647.198	0,44
7	KDP	Rp 1.470.688.262	0,04	Rp -	0,00	Rp 1.470.688.262	0,04
	Sub Jumlah (2)	Rp 3.803.186.632.817	94,78	Rp2.097.012.573	0,00	Rp3.805.283.645.390	94,78
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00
2	Aset Tak Berwujud	Rp 142.393.801.295	3,55	Rp -	0,00	Rp 142.393.801.295	3,55
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	Rp 56.958.695.636	1,42	Rp 700.000	0,00	Rp 56.472.394.445	1,41
	Sub Jumlah (3)	Rp 199.352.496.931	4,97	Rp 700.000	0,00	Rp 199.353.196.931	4,97
	TOTAL	Rp 4.012.698.362.512	100	Rp 2.097.712.573	0,00	Rp 4.014.796.075.085	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Penyajian nilai Penyusutan BMN dalam Neraca

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
III	ASET TETAP						
1	Peralatan Mesin	Rp 518.712.514.901,00	61,52	Rp 1.384.681.199,00	99,90	Rp 520.097.196.100,00	61,58
2	Gedung & Bangunan	Rp 112.362.111.392,00	13,33	Rp 913.500,00	0,07	Rp 112.363.024.892,00	13,30
3	Jalan, dan Jembatan	Rp 14.517.033.943,00	1,72	Rp -	0,00	Rp 14.517.033.943,00	1,72
4	Irigasi	Rp 560.788.775,00	0,07	Rp -	0,00	Rp 560.788.775,00	0,07
5	Jaringan	Rp 2.094.937.122,00	0,25	Rp -	0,00	Rp 2.094.937.122,00	0,25
6	Aset Tetap dlm Renov.(ATR)	Rp 1.818.382.709,00	0,22	Rp -	0,00	Rp 1.818.382.709,00	0,22
7	Aset Tetap Lainnya	Rp 29.800.000,00	0,00	Rp -	0,00	Rp 29.800.000,00	0,00
	Sub Jumlah (1)	Rp 650.095.568.842,00	77	Rp 1.385.594.699,00	100	Rp 651.481.163.541,00	77
III	ASET LAINNYA						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp -	0,00
2	Aset Tak Berwujud (ATB)	Rp 137.067.785.127,00	16,26	Rp -	0,00	Rp 137.067.785.127,00	16,23
3	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional	Rp 9.375.192.803,00	1,11	Rp 490.000,00	0,04	Rp 9.375.682.803,00	1,11
4	ATB yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	Rp 46.688.855.240,00	5,54	Rp -	0,00	Rp 46.688.855.240,00	5,53
	Sub Jumlah (2)	Rp 193.131.833.170,00	23	Rp 490.000,00	0	Rp 193.132.323.170,00	23
	TOTAL	Rp 843.227.402.012,00	100	Rp 1.386.084.699,00	100	Rp 844.613.486.711,00	100

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited per akun

neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan nilai BMN Laporan Barang dan Laporan Keuangan

No.	Golongan Barang	Laporan	Laporan	Selisih
		Barang	Keuangan	
1	Persediaan	Rp 10.159.232.764,00	Rp 10.159.232.764,00	-
2	Tanah	Rp 2.309.435.980.187,00	Rp 2.309.435.980.187,00	-
3	Peralatan dan Mesin	Rp 609.500.991.813,00	Rp 609.500.991.813,00	-
4	Gedung dan Bangunan	Rp 841.382.683.975,00	Rp 841.382.683.975,00	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 23.958.841.060,00	Rp 23.958.841.060,00	-
6	Aset Tetap dlm Renov(ATR)	Rp 17.738.647.198,00	Rp 17.738.647.198,00	-
7	Aset Tetap Lainnya	Rp 1.795.812.895,00	Rp 1.795.812.895,00	-
8	KDP	Rp 1.470.688.262,00	Rp 1.470.688.262,00	-
9	Aset Tak Berwujud	Rp 142.393.801.295,00	Rp 142.393.801.295,00	-
10	Aset Lain-Lain *)	Rp 56.959.395.636,00	Rp 56.959.395.636,00	-
TOTAL		Rp 4.014.796.075.085,00	Rp 4.014.796.075.085,00	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

III. INFORMASI BARANG MILIK NEGARA LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	31 Desember 2017	Rp 3.991.605.216.755,00	Rp 2.269.284.195.260,00	131,76
2	31 Desember 2018	Rp 4.132.204.607.112,00	Rp 140.599.390.357,00	3,52
3	31 Desember 2019	Rp 4.187.534.481.904,00	Rp 55.329.874.792,00	1,34
4	31 Desember 2020	Rp 3.950.769.706.634,00	-Rp 236.764.775.270,00	(5,65)
5	31 Desember 2021	Rp 4.014.796.075.085,00	Rp 64.026.368.451,00	1,62

2. Informasi Pengelola BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebagai berikut:

No.	Golongan Barang	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah (m ²)	Rp 2.117.241.418.533,00	Rp 722.837.990.730,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 511.291.951.695,00	Rp 33.563.882.836,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp 741.450.625.787,00	Rp 116.304.082.453,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 8.495.184.095,00	Rp 8.656.552.150,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 1.664.013.098,00	Rp 3.600.563.852,00
6	Aset Tak Berwujud	Rp 173.367.260.709,00	Rp 4.141.354.400,00
TOTAL		Rp 3.553.510.453.917,00	Rp 889.104.426.421,00

b. Pengelolaan BMN

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	4	2	3	-	9
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna/ Kuasa Pengguna	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang	6	2	9	-	17
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	10	2	12	-	24
8	Selesai serah terima	-	-	12	-	12
9	Gagal/Batal Proses	-	-	-	-	-

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-EI

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

3. BMN dari dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 Audited masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

Daftar SKPD yang sampai dengan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 Audited masih mengelola BMN yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan sebagai berikut:

No	Daftar Satker	Intrakomptabel (neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Berdasarkan hasil penghimpunan dari pengungkapan data Badan Layanan Umum dan informasi penyusutan satuan kerja Badan Layanan Umum, dapat disajikan sebagai berikut:

Kode Satker	Satker Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited, adalah sebagai berikut :

No	SATUAN KERJA	Intrakomptabel (Neraca) (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Gabungan (Rp)
1				
2				
	Total			

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam

laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebesar Rp232.975.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	232.975.000,00	0,00
Total		232.975.000,00	0,00

b. Daftar barang hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebesar Rp13.500.000,00 (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*). BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	0,00
Total		13.500.000,00	0,00

7. BMN Berupa Aset Tetap Yang Dinyatakan Hilang Dan Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2021 Audited, adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kantor Regional IX BKN Jayapura	13.500.000,00	-
2	-	-	-
Total		13.500.000,00	

8. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sudah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kantor Regional IX BKN Jayapura	228.000.000,00	0,00
2	Kantor Regional IV BKN Makassar	4,975,000,00	
Total		232.975.000,00	0,00

9. BMN Berupa BPYBDS

Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited adalah sebagai berikut:

No	SATUAN KERJA	Nilai (Rp)
1		
2		
Total		

10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan serta langkah-langkah strategis yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN antara lain:

- I. Aset berupa gedung dan bangunan masih terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Gedung dan Bangunan Kantor Regional III BKN Bandung senilai Rp4.564.237.000,00 berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat Nomor. S-4130/A/144/1992, tanggal 28 oktober 1992, Kantor Regional III BKN Bandung telah mengajukan permohonan peminjaman tanah tersebut. Departemen Keuangan telah menanggapi dengan surat Nomor: 432/I/1992 dan Surat Kepala PPDIA Bandung tanggal 22 September 1992 tentang Hak Guna Tanah. Akan tetapi, sampai sekarang permohonan pinjam pakai tersebut belum terealisasi.

II. Langkah-langkah strategis sebagai alternatif penyelesaian adalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Badan Kepegawaian Negara, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DJKN dan KPKNL sebagai pembina Penatausahaan BMN ;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan penatausahaan BMN kepada satker-satker dan stakeholder terkait;
- c. Melakukan penatausahaan pengelolaan BMN lebih cermat dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

IV. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- I. *"Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/ Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah."*
- II. *"Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional."*

Dalam rangka mewujudkan Penyajian BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset tetap :

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan.
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi :

1) jalan dan jembatan.

2) bangunan air.

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan Kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020, terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020

Pada Badan Kepegawaian Negara

Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Terdapat kesalahan penggunaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yaitu belanja modal gedung dan bangunan direalisasikan menggunakan anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (MAK 523111) senilai Rp11.440.347.255,00 berupa pekerjaan pemeliharaan ruang kerja gedung II pada Kantor Pusat BKN dan pekerjaan parkir motor pada Kantor Regional III BKN Bandung, sehingga terjadi <i>understated</i> untuk nilai Gedung dan Bangunan.	sudah dilakukan koreksi pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2020.
2	Terdapat kelebihan pembayaran jasa konsultasi instrumen metode kompleks Kantor Pusat BKN sebesar Rp29.400.000,00	sudah dilakukan perbaikan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2021.
3	Terdapat kelebihan pembayaran renovasi gedung lantai 2 kanreg V BKN Jakarta sebesar Rp39.960.000,00	Sudah dilakukan perbaikan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2021.
4	Kelebihan pembayaran belanja persediaan ATK pada Kanreg IX BKN Jayapura berupa pembelian Toner HP Laser Jet 85A sebesar Rp43.555.500,00	Sudah dilakukan perbaikan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2021.
5	Kelebihan pembayaran belanja lisensi Zoom Meeting pada Pusbang Kepegawaian ASN sebesar Rp16.960.430,00	Sudah dilakukan perbaikan pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2021.
6	Kelebihan pembayaran belanja lisensi Zoom	Sudah dilakukan perbaikan

	Meeting pada Kanreg III BKN Bandung sebesar Rp5.911.195,00	pencatatan atas temuan tersebut pada tahun 2021.
7	Terdapat penetapan HPS dan spesifikasi teknis atas tiga pekerjaan pada Pusbang Kepegawaian ASN Tidak Memadai	Berdasarkan Keputusan Kepala Pusbang Kepegawaian ASN Nomor 023/KEP/P A/2020 tanggal 20 Juli 2020, Pusbang Kepegawaian ASN menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 yang didalamnya terdapat PPK. Surat Keputusan menjelaskan tugas PPK antara lain membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak Barang/Jasa, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KP A dengan Berita Acara Penyerahan, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Penanggungjawab

Laporan Pengguna Barang Tahunan

Per 31 Desember 2021

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



BIMA HARIA WIBISANA



Badan Kepegawaian Negara

Jl. Letjend. Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, Indonesia

Tel : (021) 8093423 / 8093008 - Fax : (021) 8010301

www.bkn.go.id

